

# AKTUAL

Edisi 39 | 20 Agustus - 5 September 2015



## LAMPU MERAH RUPIAH

Indonesia diambang pintu krisis ekonomi. Tiongkok sebagai mitra ekonomi pemerintahan Joko Widodo malah memperburuk keadaan dengan devaluasi Yuan. Rupiah kian terpuruk di pasar uang. Pertumbuhan ekonomi yang melemah tanda bahaya untuk kita semua

Aktual Network Mengucapkan

**DIRGAHAYU  
REPUBLIK  
INDONESIA!**

**INDONESIA MERDEKA**

**70<sup>TH</sup>**

**AYO KERJA**

**PENDIRI** M Danial Nafis  
**KOMISARIS** Yudi Latif  
**PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief  
**SEKRETARIS REDAKSI** Tsurayya Zahra  
**REDAKTUR SENIOR** Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Dhia Prekasha Yoedha  
**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Edy Mulyadi, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony  
**DIREKTUR MAJALAH** Wahyu Romadhony  
**REDAKTUR** Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)  
**ASISTEN REDAKTUR** Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Tri Harningsih  
**STAF REDAKSI** Soemitro, Moh Sahlan (Majalah), Fadlan Syam Butho, Maulana Khmal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, Nelson Nafis

**HEAD IT DIVISION:** Yudhi Astira  
**NETWORK:** Tri Wahyudi (Hd), Dewanta, Rendra  
**SMC:** Resya Muhammad Irgi (Hd), Imelda, Taufik, Helmy Aziz, Iqbal Maulana

**KONTRIBUTOR LUAR NEGERI** Fitra Ismu (Meksiko)

**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Joko Pramono (Lumajang Jatim)

**DIREKTUR OPERASIONAL** Rinrin Sukmariana  
**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah  
**STAF KEUANGAN** Zulkarnain, Vinka H P  
**HRD & KESEKRETARIATAN** Nuryana  
**HUBUNGAN INTERNASIONAL:** Fahad Thalib  
**SIRKULASI** Widhi Maulana, Bayu Aji  
**MARKETING OFFICER** Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya, Ranie Anggoro

**ALAMAT REDAKSI**  
 Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810  
 Telp. 021 83794508 ( Hunting )  
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com  
 iklan@aktual.com

**aktual.com**  
 TERHANCAT TERPERCAYA

**aktual**  
 2015

# Berhenti Bermimpi



Belum genap setahun menjabat, Presiden Joko Widodo telah melakukan perombakan kabinet. Lambannya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab digantinya 6 pos kementerian vital. Perombakan yang sudah lama diwacanakan media massa akhirnya benar-benar dilakukan.

Reshuffle ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian nasional dan dunia bisa jadi adalah sebuah pertarungan. Berkaca sedikit ke belakang, rendahnya serapan anggaran salah satunya adalah akibat adanya perubahan nomenklatur pada beberapa kementerian. Pada gilirannya, karena perubahan nomenklatur, program andalan pemerintah tidak dapat dikerjakan dan ujungnya membuat roda perekonomian nasional tidak banyak bergerak.

Kondisi ini diperparah

dengan langkah pemerintah Tiongkok melalukan devaluasi mata uang Yuan terhadap Dollar Amerika. Imbasnya, mata uang di kawasan Asia tidak terkecuali Rupiah terperosok pada kondisi yang mengkhawatirkan. Daya beli masyarakat pun turut terperosok.

Indonesia tahun 2008 sempat mengalami fase seperti ini. Namun kala itu dapat lolos dari krisis ekonomi yang melanda sebagian negara di Asia Tenggara. Kali ini kepemimpinan Joko Widodo ditantang untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi.

Mengganti menteri belum tentu akan mencegah datangnya badai krisis. Perlu serangkaian kebijakan yang ampuh. Kerja yang nyata dan terukur. Tidak bisa lagi Presiden tampil hanya dengan mimpi-mimpi. Jokowi harus kembali ke bumi. Menyelamatkan Ibu Pertiwi. ■

## Laporan Utama

### 26 Semua Berawal dari Jalan Situbondo

Belum terselesaikannya perubahan nomenklatur diakui pemerintah telah menghambat jalannya pemerintahan.



### 30 Rombak Kabinet Penahan Krisis

Enam menteri diganti oleh Jokowi. Perombakan ini merespon positif oleh pasar. Namun pelaku pasar memprediksikan efek devaluasi yuan akan menekan IHSG dan rupiah.



### 32 Ketika Tom Menjadi Menteri

Quvat Investment justru menanggung untung saat terjadi krisis finansial global tahun 2008 dengan cara memborong saham-saham BUMN.



### 34 Tangan-Tangan AS dan Cina Mulai Susun Kekuatan Goyang Jokowi?

Para taipan tim sukses Jokowi seperti Mochtar dan James Riadi yang punya koneksi luas dengan Amerika Serikat, sepertinya mulai dilanda kekhawatiran dan ketidakpastian.



### 40 OPINI

#### Tantangan Presiden Jokowi

Rizal Ramli



### 42 WAWANCARA

#### Budi Waseso: Pegiat Anti Korupsi Bukan Orang Suci

Budi Waseso berjanji akan mengungkap 9 kasus korupsi dengan nilai triliunan rupiah. Ia juga menjawab desakan tentang petisi yang meminta dirinya untuk dicopot.



### 14 NASIONAL

#### Berjasa untuk Negara, Jokowi Anugerahi 46 Tokoh

Saking ketatnya, seleksi bahkan memakan waktu minimal tiga bulan hingga lebih dari setahun. Secara umum, gelar kehormatan sebenarnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo.

### 18 POLITIK

#### Menjaga Tradisi NU di Tanah Kelahirannya

omenklatur ulama menjadi jawaban atas kekacauan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33. Kiai kultural menjadi perantaranya. Di tangan kiai yang jauh dari hiruk-pikuk duniawi itulah demokrasi lima tahunan organisasi Islam terbesar di Indonesia menemui jalan keluar.

### 20 POLITIK

#### Mufakat dalam 10 Menit untuk Haedar

Terpilihnya duet suami-istri Haedar dan Noordjannah mengulang sejarah. Pada awal berdirinya di Yogyakarta tahun 1912 silam, organisasi ini juga dipimpin duet suami-istri pendirinya, KH Ahmad Dahlan dan Siti Walidah.

### 46 HUKUM

#### Kronologi Penetapan OC Kaligis Sebagai Tersangka

KPK mendapat petunjuk untuk menjerat OC Kaligis berasal dari pengakuan anak buahnya yang bernama, Yagari Bhastara Guntur alias Gerry yang sudah terlebih dulu dicokok KPK.

### 50 EKONOMI

#### Jepang - Cina Balapan Proyek Kereta Cepat

Jepang memasang langkah kuda untuk merebut proyek kereta api cepat agar tidak jatuh ke tangan Cina.

### 54 GEOPOLITIK

#### Mengamati TiSA

Wikileaks kembali merilis sejumlah data soal perdagangan global.

### 56 INTERNASIONAL

#### Fajar Baru Kesepakatan Nuklir Iran

Kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara P5+1 menjadi momen yang bersejarah. Pembatasan program nuklir Iran akan diimbangi dengan berakhirnya sanksi ekonomi dan embargo terhadap Iran.

### 56 INTERNASIONAL

#### Najib Tersandung Tuduhan Korupsi

Citra pemerintah Malaysia tercoreng oleh dugaan aliran dana dari perusahaan 1MDB ke rekening pribadi Perdana Menteri Najib Razak. Meski diduga terlibat megakorupsi, posisi Najib sementara masih kuat.

3 Tatap Redaksi

5 Terkini

6 Kaki Hari

12 Lensa Aktual

16 Kilas Nasional

22 Kilas Politik

48 Kilas Hukum

52 Kilas Ekonomi

66 Kilas Daerah

62 Oase



## Atribut PKI Ramaikan Karnaval HUT RI di Pamekasan

Atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) meramaikan karnaval perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-70 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (15/8). Tidak seperti di Universitas Jember yang dilakukan sembunyi-sembunyi, munculnya atribut PKI di Pamekasan dilakukan secara lebih terbuka.

Kemunculan atribut bergambar palu arit warna merah disertai gambar tokoh-tokoh PKI seperti DN Aidit dan Letkol Untung, Karnaval dihadiri langsung Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

"Kok menampilkan PKI ya, padahal ini karnaval memeriahkan Kemerdekaan RI. Di daerah lain ada demo menolak negara minta maaf pada PKI, namun disini berbeda," ucap salah satu pengunjung, Zainul.

Pengunjung lain, M Zuhri, juga mempertanyakan penggunaan simbol-simbol PKI dalam karnaval tersebut. Meski dalam aksinya mereka memperagakan teatrikal kekejaman PKI terhadap para jenderal pada 30 September 1965.

"Saya heran kenapa lambang-lambang PKI yang marak mendapat perlawanan dari masyarakat, bebas berkibar di tengah-tengah karnaval HUT RI," katanya.

Sehabis aksi teatrikal, gambar-gambar tokoh PKI, bendera PKI langsung dimusnahkan oleh anggota Kodim 0826 Pamekasan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengaku tidak mengetahui kemunculan atribut PKI dalam karnaval yang digelar Pemkab. Ia berjanji akan mengevaluasi hajat karnaval bersama Kodim dan Polres Pamekasan.

"Saya baru tahu tadi kalau ada simbol-simbol PKI," ujar Bupati.

Sementara Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letnan Kolonel Armed Mawardi, mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (15/8), para komandan Koramil di Pamekasan akan dievaluasi.

Terkait hal ini pula, ia mengingatkan agar seluruh pihak di Pamekasan meningkatkan pengawasan apabila usai karnaval masih menemukan tindakan serupa.

"Saya perintahkan staf intern untuk memanggil pihak yang terlibat dalam karnaval tadi agar diperiksa dan didalami," kata Mawardi.

Polres Pamekasan sendiri langsung memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kemunculan atribut PKI dalam karnaval. Khususnya panitia karnaval untuk dimintai keterangannya. /Ant-Sukardjito

## Tentara Papua Nugini Turunkan Bendera Merah Putih

Tentara Papua Nugini (PNG) menganggap pengibaran Bendera Merah Putih Republik Indonesia berada pada wilayah netral. Sebab itu Tentara PNG menurunkan Bendera

Merah Putih yang dikibarkan dalam rangka memperingati HUT RI ke-70.

Bendera Merah Putih diketahui dikibarkan di beberapa lokasi di Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Menurut Tentara PNG, seharusnya di wilayah tersebut dikibarkan dua negara berbeda.

Demikian disampaikan Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI, Tantang Sulaiman, didampingi Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Teguh Pudji Rahardjo di Jayapura, Kamis (13/8). Tantang mengetahui hal itu setelah mendapat laporan dari anggotanya.

Atas anggapan Tentara PNG, ia menegaskan bahwa Yakyu, Kampung Rawa Biru merupakan wilayah RI. Oleh karena itu tindakan Tentara PNG disebutnya sangat tidak beralasan.

"Wilayah itu merupakan wilayah RI sehingga tindakan yang dilakukan tentara PNG sangat tidak beralasan," tegasnya.

Danrem 174/Anim Ti Waninggap, Merauke, Brigjen TNI Supartodi, mengungkapkan, selain menurunkan Bendera Merah Putih, Tentara PNG juga datang ke Distrik Sota dengan memberikan bahan makanan kepada 19 kepala keluarga atau sekitar 74 jiwa yang mendiami Yakyu.

Ke-19 kepala keluarga ini awalnya diimingi-imingi sembako berupa 15 mie instan, 15 kornet dan kembang gula dari Tentara PNG agar menurunkan Bendera Merah Putih di wilayahnya.

"Ada sekitar 3 Bendera Merah Putih yang sempat diturunkan oleh tentara PNG. Namun saat tentara itu pergi, warga memasangnya kembali," jelas Supartodi.

Merujuk pada Undang-Undang No 32/2015 tentang Perbatasan di Papua, Yakyu merupakan wilayah NKRI. Pemerintah Indonesia akan berlaku tegas apabila kejadian serupa terulang kembali. Apalagi tindakan Tentara PNG sudah masuk kategori pelanggaran hukum negara.

"Saya bisa perintahkan tembak mereka di tempat, jika kejadian itu langsung saya ketahui. Tentara PNG sudah memasuki negara lain tanpa secara ilegal," kata dia. /Ant-Sukardjito



# Merdeka Tanpa Kepemimpinan

**D**i muka hakim kolonial, pada bagian penutup dari pleidoi “Indonesia Menggugat” (1930), Soekarno bertutur:

“Kami menyerahkan segenap raga dengan serela-relanya kepada tanah air dan bangsa... Juga kami adalah berusaha ikut mengembalikan hak tanah air dan bangsa atau peri kehidupan yang merdeka. Tiga ratus tahun, ya walau seribu tahun pun, tidaklah bisa menghilangkan hak negeri Indonesia dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan itu.”

Dengan pernyataan itu, Soekarno menambatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke dalam jangkar “kebangsaan”. Suatu bangsa, menurut Ernest Renan, terbentuk karena dua hal: bersama-sama menjalani suatu riwayat dan mempunyai keinginan hidup menjadi satu.

Jika penjajahan telah memberi kesamaan riwayat bagi mayoritas penduduk Indonesia, atas dasar imajinasi apakah keinginan hidup untuk bersatu bisa dirajut? Suatu bangsa, kata Ben Anderson, adalah “suatu komunitas politik terbayangkan”; terbayangkan dalam arti selalu menyiratkan “batas” dan “daulat”.

Dalam sejarah Indonesia, berbagai eksperimen pergerakan bergulat dan acapkali bergesekan dalam menentukan batas dan daulat ini. Budi Utomo membatasi imajinasi persatuan kebangsaan itu pada “kejawaan”, Indische Partij pada “kependudukan”, Sarekat Islam pada “keislaman” dan Komunisme Indonesia pada “solidaritas kelas”.

Tetapi semua eksperimen itu gagal, hingga semua gerakan terpaksa

(oleh tekanan sejarah) menyadari perlunya mempertautkan diri ke dalam suatu *historical bloc*; suatu kompleks “kehendak kolektif” yang dihasilkan oleh pertautan ide dan nilai dari berbagai kekuatan sejarah yang tersebar dan terpecah.

Memasuki 1920-an/1930-an, di bawah tekanan malaise ekonomi pasca Perang Dunia I dan depresi ekonomi dunia, negara kolonial semakin menunjukkan watak paranoidnya dengan mengaktifkan rezim “*rust en orde*” (ketentraman dan ketertiban).

Di bawah rezim *draconian* ini, media massa dan rapat umum dikontrol ketat, tokoh-tokoh politik terkemuka ditangkap dan diasingkan. Saat yang sama, kelesuan ekonomi membiakkan kemiskinan dan proletariat intelektual yang menyulut radikalisme. Secara perlahan, semua elemen pergerakan mulai dipersatukan ke dalam blok historis untuk memerdekakan diri dari musuh bersama: negara kolonial.

Dari Belanda, Bung Hatta dan koleganya di Perhimpunan Indonesia mengajukan konsepsi kemerdekaan dengan empat pilar: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan kemandirian.

Tak lain adalah sintesis dari *platform* politik gerakan-gerakan perjuangan terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema Indische Partij, non-kooperasi tema kaum komunis, dan kemandirian tema Sarekat Islam. Sedangkan solidaritas hanyalah simpul yang menyatukan ketiga tema tersebut.

Dari dalam negeri, Soekarno dan sejawatnya datang dengan proposal serupa. Pada 1926, ia menulis di Suluh Indonesia Muda,



“Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, yang memimpikan sintesis antara ketiga ideologi tersebut sebagai fondasi persatuan nasional dan kemerdekaan.

Semuanya tiba pada *kalimatun sawa*, perlunya mengutamakan kemerdekaan politik. Tidak berarti meremehkan persoalan sosio-ekonomi dan tidak pula melupakan sifat multikultur keindonesiaan. Mereka menyadari bahwa perjuangan nasionalisme Indonesia tidaklah berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi harus berlanjut dengan apa yang disebut Sukarno sebagai “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi”; yakni “nasionalisme dan demokrasi yang mencari selamatnya perikemanusiaan dengan mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki”.

Kebanyakan mereka juga menyadari perlunya menyelamatkan kemajemukan Indonesia dari sangkar besi sentralisme negara kolonial. Namun, bagi mereka, kemerdekaan harus diraih terlebih dahulu, dan hanya Indonesia bersatu, yang bersedia menyingkirkan perbedaan-

perbedaan sempitlah, yang bisa meruntuhkan negara kolonial.

Di sini terlihat keunikan formasi negara-bangsa Indonesia. Dalam trayek Eropa Barat, perkembangan kesadaran nasional berjalan paralel dengan formasi negara-(bangsa), sedang di Eropa Tengah/Timur terbentuknya negara-bangsa itu merupakan perpanjangan dari kesadaran etno-kultural. Adapun di Indonesia, negara (baca: negara kolonial) ada terlebih dahulu, kemudian muncul kesadaran dan persatuan nasional sebagai reaksi terhadap negara kolonial.

Dalam literatur sosiologi politik, Indonesia lebih tepat disebut “*state-nation*”, ketimbang “*nation-state*”. Konsekuensinya, negara merupakan alasan pokok bagi konstruksi maupun destruksi rasa kebangsaan.

Dengan konsentrasi pada penempatan “*nation building*” sebagai karsa menggulingkan “negara kolonial”, perhatian terhadap “*state building*” nyaris tak terpikirkan. Padahal dengan berlalunya kolonial, berbagai warisan penjajahan dalam tata-kelola kenegaraan menyusup lewat pintu belakang republik,

melanggengkan struktur-struktur ketidakadilan yang menyulitkan perwujudan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Keberhasilan para perintis kemerdekaan membentuk kesadaran nasionalisme baru, tidak diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan kenegaraan. Konstruksi blok historis warisan pra-kemerdekaan tidak bisa dipertahankan karena ketidakmampuan pemimpin pascakolonial untuk mendefisikan dan menghadapi musuh baru yang lebih sublim: tirani, korupsi, kemiskinan dan kesenjangan.

Untuk masa yang panjang terjadi ketidakselarasan antara watak kenegaraan dan kebangsaan. Watak multikultur kebangsaan Indonesia dinafikan oleh watak sentralistik bangun kenegaraan. Ketimpangan antara pusat dan daerah terjadi dengan pengingkaran terhadap hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Karena penguasaan kapital oleh segelintir pihak di titik pusat, persebaran kapital yang melicinkan mobilitas vertikal dan horisontal terhambat. Sifat insular negeri

kepulauan yang menyulitkan kontak dalam intensitas tinggi tak menemukan jembatan katalisnya. Situasi ini telah lama dirisaukan Bung Hatta. Membandingkan pengalaman Italia (negeri agraris) dan Inggris (negeri industri) dalam mengembangkan persatuan nasional, ia temukan bahwa rasa persatuan nasional di Italia lebih rapuh.

Menurutnya, sifat petani yang terikat hatinya pada tanah menyulitkan mobilitas dan intensitas perhubungannya dengan kalangan yang lebih luas. Rasa persatuan nasional secara umum lebih kuat di negeri industri, di mana rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan disusun bersatu oleh pabrik dan disiplin kerja. Di sini, mobilitas penduduk tidak dipaksakan, semisal lewat transmigrasi, melainkan tumbuh secara sukarela mengikuti pergerakan kapital.

Dalam ketersendatan lalu lintas pergaulan, masyarakat lebih banyak terkungkung dalam kepompong komunalisme. Pengikatan rasa kebangsaan dari *ensemble* komunalisme ini sekadar bertumpu pada solidaritas emosional yang tersisa dari warisan kesamaan sejarah, bahasa dan budaya-keagamaan. Tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena persamaan kepentingan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, fantasi kebertautan kebangsaan itu mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan.

Dengan proses belajar kolektif lebih banyak dimediasikan oleh paguyubuan yang tertutup, ketimbang oleh asosiasi yang terbuka, universum simbolik yang menyediakan kerangka interpretasi sosial lebih membiaskan gramatika komunalisme. Akibatnya, kekecewaan sosial-ekonomi sering sisublimasikan ke dalam sentimen etno-religius.

Buruknya manajemen kenegaraan melemahkan *horizontal comradeship* antar gugus kebangsaan. *Civic nationalism* sebagai watak kebangsaan Indonesia terus-menerus

terancam oleh etno-nationalism. Seperti menjadi suratan tangan, Indonesia dipersatukan oleh negara dan diceraiberaikan oleh negara.

Enam puluh satu tahun setelah Negara ini diproklamirkan, Indonesia masih tetap sebuah proyek yang belum tuntas. Setiap hari ulang tahun kemerdekaan tiba, peringatan Bung Karno kembali mencuat dari alam kuburnya: “Ya, belum ada *‘journey’s end’* bagi kita, –perjuangan kita jauh belum selesai, pembangunan pun menunggu bertimbun-timbun, – hai bangkitlah kembali bangsaku, nyalakanlah kembali dalam jiwamu apa yang kita namakan ‘semangat proklamasi’.”

### Semangat Proklamasi

Apakah gerangan ‘semangat proklamasi’ itu?

“Semangat proklamasi,” ujar Soekarno di ulang tahun kelima kemerdekaan Indonesia, “adalah semangat rela berjoelang, berjoelang mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat-mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat proklamasi adalah semangat membentuk dan membangun Negara...Dan manakala sekarang tampak tanda-tanda kelunturan dan degenerasi, kikislah bersih semua kuman kelunturan dan degenerasi itu, hidupakanlah kembali semangat proklamasi!”

Masih adakah idealisme dan semangat berjoelang di antara kita? Masih. Mahasiswa dan masyarakat madani turun kejalan, memekikkan reformasi, membebaskan negeri dari cengkraman tirani. Selepas kejatuhan Suharto, pelbagai langkah demokratisasi prosedural telah ditempuh dengan transformasi yang nyata: amandemen konstitusi, pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif *fair*, kebebasan berekspresi, keluasan akses informasi, desentralisasi dan otonomisasi, kehadiran institusi-institusi

kenegaraan baru serta pemilihan presiden dan pilkada secara langsung.

Di luar arena politik, kekuatan-kekuatan swadaya masyarakat menceburkan diri di zona-zona bencana dengan ketulusan patriotis yang mengharukan. Terkenang juga para pendekar kebudayaan yang secara berdikari mengirimkan talenta-talenta terbaik bangsa ke ajang kompetisi internasional—semacam olimpiade fisika atau festival kesenian—dan pulang dengan medali tertinggi.

Hanya saja, seperti kata sejarawan H.G. Wells, “Anasir terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa adalah kualitas dan kuantitas tekad yang dimilikinya.” Kita punya idealisme reformasi, tetapi mudah surup oleh kepentingan-kepentingan sempit dan partikular. Kita bentuk partai politik untuk mengagregasikan aspirasi rakyat, namun lekas terpasung oleh ambisi-ambisi elit. Kita susun undang-undang baru demi kebajikan bersama, namun terdistorsi oleh kemauan “yang kuat”. Kita pilih presiden dan pilkada secara langsung demi pemberdayaan rakyat, namun mudah terbajak oleh kekuatan-kekuatan oligarkis. Kita lahirkan cerlang-cerlang individual, namun terbunuh oleh inkonsistensi dan kealpaan sistem meritokrasi.

Masih adakah semangat persatuan di antara kita? Masih. Bahasa Indonesia makin penting sebagai lingua franca, perkawinan antaretnis pun merekatkan keindonesiaan. *Elite settlement* untuk mentransformasikan elit berseteru menjadi elit bersatu dalam prinsip-prinsip dasar kenegaraan mengalami kemajuan. Fanatisisme ideologis, yang mengubur eksperimen demokrasi parlementer, relatif makin cair.

Piagam Jakarta tak lagi menjadi obsesi arus utama politik Muslim. Mayoritas elit mendukung amandemen konstitusi. Tentara rela keluar dari arena politik. Desentralisasi dan distribusi kekuasaan diterima sebagai keniscayaan. Solidaritas nasional juga

terasa di kala bencana mendera.

Hanya saja, solidaritas emosional tersebut mudah roboh oleh kelemahan solidaritas fungsional, karena tak terpenuhinya cita-cita kebajikan dan kesejahteraan bersama. Solidaritas dan demokrasi, menurut Alexis de Tocqueville, memiliki makna di luar politik dan budaya: yakni kesederajatan sosial dan ekonomi. Kesetaraan sosial-ekonomi memunculkan hasrat membentuk asosiasi-asosiasi yang terbuka, tanpa melihat dan dibedakan menurut silsilah. Pada gilirannya, perkumpulan ini melindungi kesetaraan dengan mencegah kelompok lain menjadi dominan. Dengan demikian perkumpulan ini memiliki dua fungsi: mereka berasal dari dan menjaga solidaritas dan demokrasi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, menyimpan potensi erupsi, laksana bara dalam sekam yang dalam sekejap bisa menghancurkan ikatan-ikatan persatuan.

Masih adakah semangat membangun negara di antara kita? Masih. Alim-ulama ingatkan kebangkrutan moral, aparat pembasmi korupsi mulai beraksi, politisi pecundang perankan oposisi, tentara lepaskan aktivitas niaga, pendidik rela berupah rendah, lembaga-lembaga pemantau bersitumbuh, media massa giat beberkan keborokan, pengamat aktif mengkritisi.

Hanya saja, kita mengalami krisis keteladanan dan kepemimpinan. Seperti sindir syair Arab, “Berapa kali kau katakan, negara sedang sakit; sedang engkau adalah penyakit itu. Tunjuk hidung adalah kebiasaanmu; sedang engkau tak tampak menjaga kehormatannya.” Terlalu banyak yang mengeluh dan terlalu sedikit yang memberi contoh.

Mohammad Hatta pernah berkata: “Kualitas pemimpin sepadan dengan caranya mendapat makan.” Ketika para pemimpin negeri berpesta menikmati gaji ke-13, sibus ”jaga imej” atau memenangkan proyek, sedang rakyat banjir airmata

dilanda bencana, menjadi jelas terukur bagaimana kualitas para pemimpin kita.

Sementara para pemimpin berpesta, arus neo-kolonialisme yang membongceng globalisasi semakin luas cakupannya, instan kecepatannya, dan dalam penetrasinya. Secara perlahan kantong-kantong usaha rakyat tergesur, sumberdaya alam terkuras, dan aktiva ekonomi mengalir ke pusat-pusat metropolis. Ledakan Profesor Veith dari masa lampau makin menikam di ulu hati: “Di pantainya tanah Jawa rakyat berdesak-desakan; datang selalu tuan-tuannya setiap masa; mereka beruntun-untun sebagai runtunan awan; tapi anak-anak negeri sendiri tak pernah kuasa.”

#### **Kemerdekaan dan Kepemimpinan**

Setiap kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Soekarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Soekarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan dan persatuan.

Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral kapital.

Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat.

Ditanya oleh Direktur Penjara

Landraad Bandung ikhwal “kehidupan baru” selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama” (Soekarno, 1961).

Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim *rust en orde* pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu *conditio sine qua non* (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan” (Hatta, 1998).

Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka.

Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “Saudara Soekarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.”

Sementara itu, Bung Hatta sendiri menegaskan, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!... Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dijanjurkannya cepat berkembang.”

Kekuatan moral capital itu pada

akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebijakan bersama dalam rumah kebangsaan. "Bahwa keadaan bangsa," ujar Bung Hatta, "tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu."

Ditambahkan oleh Bung Karno, "Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita... Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjuang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu."

Belajar dari kedua mahaguru bangsa tersebut, setidaknya ada empat sumber utama bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi "moral capital" secara politik.

Pertama, basis moralitas; menyangkut nilai-nilai, tujuan serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada konstituennya. Kedua, tindakan politik; menyangkut kinerja pemimpin politik dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya. Ketiga, keteladanan; menyangkut contoh perilaku moral yang konkret dan efektif, yang menularkan kesan otentik dan kepercayaan kepada komunitas politik. Keempat, *consensus building*; kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat.

Dalam suasana krisis nasional sekarang ini, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit

sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik.

Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik kehilangan pahlawan. Tatkala nama pahlawan disebutkan, kita terpaksa harus menoleh ke batu nisan. Pahlawan terlanjur dikuburkan, meninggalkan jagad politik dalam kealpaan panduan. Mereka yang mendambakan teladan, terpaksa harus mencari di dunia rekaan.

Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah.

### **Demokrasi dengan Kepemimpinan yang Lemah**

Ketika reformasi digulirkan, terdapat optimisme yang meluas bahwa demokrasi bisa melahirkan kepemimpinan yang cocok dengan watak bangsanya. Apa yang terjadi, pendulum sejarah Indonesia hanyalah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Padahal, demokrasi memang bermaksud membasmi pemerintahan otoriter, tetapi tak bisa tegak tanpa pemerintahan otoritatif. Kenyataan kini, aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena lemahnya wibawa otoritas atas gerombolan.

Memimpin demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat menjadi simpul kesadaran baru yang terpancar dari suara Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kompas, 08/06.2006). Keinsyafan ini merupakan pertanda baik jika disertai pemahaman yang baik.

Bahwa pemimpin yang baik tidak cukup sekadar berbudi baik dan menarik. Yang lebih penting adalah kesanggupan untuk menginvestasikan potensi kebijakan perseorangan ini ke dalam mesin politik dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Terlampau lama Republik ini dipimpin oleh Presiden yang "lemah". Presiden yang menegakkan wibawanya dengan personalisasi kekuasaan dan kekuatan pemaksa (*might*), bukan dengan menjalankan prinsip-prinsip negara hukum (*right*) yang bersifat impersonal dan imparsial.

Jejak-jejak tradisi kepresidenan seperti itu masih bertahan pada watak para pemimpin negara di era reformasi: dalam kecenderungannya untuk memprioritaskan kepentingan sendiri dan pemujaan diri, dengan keengganan untuk mengembangkan wibawa sistemik dan pelayanan publik.

Tipe kepemimpinan seperti itu memang tak selaras dengan tantangan demokratisasi. Demokrasi yang memuliakan kedaulatan rakyat menghendaki kepemimpinan yang "kuat"; yakni kepemimpinan berbasis hukum dengan menjalankan amanat konstitusi. Di sini, pemimpin negara mesti sadar bahwa demokrasi tak bisa dipisahkan dari konstitusi seperti tercermin dalam istilah "demokrasi konstitusional" (*constitutional democracy*). Istilah ini mengandung makna bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Dengan kepemimpinan yang *committed* terhadap konstitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan sebagai ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat *ad-hoc*, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum untuk kemaslahatan bersama yang bersifat permanen.

Dalam menjalankan demokrasi konstitusional tersebut, kepresidenan merupakan institusi yang sangat krusial. Sebagai satu-satunya pejabat

negara yang dipilih langsung (secara teoritis) oleh seluruh rakyat, Presiden melambangkan harapan masyarakat bahwa amanat konstitusi itu akan diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan dan dijalankan oleh administrasi pemerintahan secara rasional.

Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (*public goods*). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (*public deliberation*) secara bebas, setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedur-prosedur *public deliberation* seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (*right*) dan tanpa ragu (*strong*).

Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acapkali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan proses-proses *public deliberation*, seperti dalam kasus rencana revisi Undang-Undang Perburuhan dan Pencabutan SP3 Suharto. Seringkali pula tak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil *public deliberation*, seperti dalam penetapan anggaran pendidikan dan dalam membiarkan aksi-aksi kekerasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa

berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa ujung pencapaian nilai-nilai ideal kebangsaan harus bermuara pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara kesejahteraan menjadi pertarungan dari kesaktian Pancasila.

Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam penciptaan masyarakat yang lebih transparan dan terbuka di bidang politik. Namun capaian-capaian ini seringkali dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Dalam hal ini, Joseph E. Stiglitz (2005) punya pandangan yang menarik.

“Di Indonesia orang kerap merasakan adanya konflik yang lebih intens: konflik antara kewajiban untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam sebuah sistem yang didasarkan pada aturan, dengan kewajiban moral untuk membantu kerabat dan anggota komunitas di sebuah negara yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan akut, dan ketimpangan yang mencolok.

Ekonomi pasar hanya berjalan baik dalam sebuah sistem yang dipijakkan pada aturan. Dan dalam sistem yang berjalan mulus dengan kesempatan kerja penuh dan rasa keadilan sosial yang luas, kebutuhan untuk ‘membantu’ kerabat sangat bisa dikurangi. Masalahnya, mereka yang berada di negara berkembang diminta untuk meninggalkan ‘jaring pengaman’ dalam ikatan kekeluargaan dan komunal ini, padahal jaring pengaman sosial (dari rejim kesejahteraan) itu sendiri belum tercipta.”

Menciptakan kesejahteraan ekonomi di negara seperti ini, Stiglitz merekomendasikan perlunya keseimbangan antara peran pemerintah dan pasar. Dalam hal ini, negara-negara berkembang harus lebih bebas dan leluasa menentukan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi mereka.

Tidak ada cara tunggal dan sistem yang sempurna, seperti yang sering dikhotbahkan oleh

para arsitek ekonomi di World Bank dan IMF. Seturut dengan itu, pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjalankan amanat konstitusi dalam penguasaan bumi, air, udara dan kekayaan alam bagi kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara, sebagai mata-hati dan mata-nalar rakyat, harus berani mengambil sikap pro-rakyat dalam kasus eksplorasi kekayaan alam yang merugikan bangsa dan negara.

Semuanya itu merupakan prakondisi bagi terpeliharanya kebijakan ketiga: yakni identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Kemunculan Indonesia sebagai perwujudan dari civic nationalism (yang berbasis demokrasi konstitusional), dengan Pancasila sebagai titik-temu solidaritas kolektifnya, mulai mendapatkan ancaman dari meruyaknya aspirasi politik identitas yang bersemangat partikularistik.

Fungsi pemimpin negara sebagai kekuatan moderasi di antara ekstrimitas masyarakat benar-benar sedang diuji. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama.

Presiden/Wakil Presiden kerap kali terkesan melakukan *endorsement* secara sengaja atau tidak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlalu mahal harganya, jika demi mobilisasi dukungan bagi pemilihan mendatang, hal-hal mendasar dari prinsip demokrasi konstitusional dikorbankan.

Krisis selalu mengandung dua sisi: ancaman dan peluang. Untuk memanfaatkan peluang di balik krisis ada kunci yang harus ditemukan. Adapun kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Bagi para pemimpin, ada baiknya menyimak kembali credo Rene de Clerq yang menjadi semboyan Bung Hatta: “Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. ◻





**LENSA AKTUAL**

## **Peluncuran Buku “Tanah Air & Udaraku Indonesia” Chappy Hakim**

(Kiri-kanan) Mantan KASAU Marsekal (Purn) Chappy Hakim, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Mantan Kepala BIN Hendropriyono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menghadiri peluncuran buku mantan KASAU yang berjudul “Tanah Air Udaraku Indonesia” di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Aktual - Munzir



## Berjasa untuk Negara, Jokowi Anugerahi 46 Tokoh

**P**residen Joko Widodo memberikan penghargaan bintang tanda jasa kehormatan kepada sejumlah tokoh dan mantan pejabat negara. Anugerah dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 diberikan kepada 46 orang di Istana Negara, Kamis (13/8).

Sekretaris Militer Laksamana Muda Tri Wahyudi Sukarno, di Istana

Negara, Kamis (13/8), mengatakan, pemberian gelar dilakukan secara ketat melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan.

Gelar Bintang Mahaputra misalnya disebut dia termasuk kategori penilaian yang memakan waktu hingga lebih dari setahun.

Gelar Bintang Mahaputra Adiprada, lanjut dia, pemberiannya secara khusus kepada para menteri

atau setingkat menteri yang sudah menjabat dalam waktu tertentu.

Secara umum, gelar kehormatan sebenarnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Presiden mempertimbangkan masukan dan usulan, baik dari perorangan, organisasi masyarakat ataupun lembaga pemerintahan.

“Masukan-masukan ada yang dari menteri sosial, dari menteri perikanan, itu semua tetap melalui sidang. Keputusan sidang itu dilaporkan Presiden. Nah, Presidenlah yang kemudian mendapat memo dari Ketua Dewan yaitu,



Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pemberian tanda kehormatan kepada tokoh nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8).

Menkopolkam. Kemudian Presiden setuju, baru diproses Keppres,” jelas Tri.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 83/TK/Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015,

#### **Bintang Mahaputra Adipradana**

- Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK)
- Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (mantan Panglima TNI)
- Jenderal Pol (Purn) Sutanto (mantan Kapolri)
- Jenderal Pol (Purn) Bimantoro (mantan Kapolri)

#### **Bintang Mahaputra Utama**

- Achmad Sodiki (mantan hakim MK)
- Hardjono (mantan hakim MK)
- Ahmad Fadli Sumadi (mantan hakim MK)
- Muhammad Alim (hakim MK periode 2010-2015)
- Laksamana TNI (Purn) Marsetio (mantan KSAL)
- Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia (mantan KSAU)
- Harbrinderjit Singh Dillon (mantan utusan khusus Presiden untuk penanggulangan kemiskinan)
- Busyro Muqoddas (mantan Ketua KY dan pimpinan KPK)
- Haryono Umar (mantan komisioner KPK)
- Thahir Saimima (mantan komisioner KY)
- Mustofa Abdullah (mantan anggota KY)
- Zainal Arifin (mantan anggota KY)
- Soekotjo Soeparto (mantan anggota KY)
- Sabam Sirait (mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan)
- Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah)
- Franz Magnis Suseno (filsuf dan budayawan)
- Surya Paloh (tokoh pers nasional)
- Harun Nasution (pengembang budaya moderat)

#### **Bintang Jasa Utama**

- Alm Burhan Muhammad (Duta Besar RI untuk Pakistan)
- Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat)
- Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
- Cornelis (Gubernur Kalimantan Barat)
- Frans Lebu Raya (Gubernur NTT)
- Christiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan)
- Stephanus Malak (Bupati Sorong)
- Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya)
- Didin Hafidhuddin Maturidi (Ketua Badan Amal Zakat Nasional)
- Dato Sri Profesor Tahir

(Mayapada Group)

- Mochtar Riyadi (Lippo Group)
- Schoichiro Toyoda (member of the board Toyota Motor)
- Toshihiro Nikai (Chairman General Council Liberal Democratic Party)

#### **Bintang Jasa Pratama**

- Heri Listiyawati Burhan (istri Duta Besar RI untuk Pakistan)

#### **Bintang Penegak Demokrasi Utama**

- Husni Kamil Manik (Ketua Komisi Pemilihan Umum)
- Muhammad (Ketua Badan Pengawas Pemilu)

#### **Bintang Budaya Parama Dharma**

- Mustofa Bisri (pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin Lteteh, Rembang)
- Gunawan Soesatyo Mohammad (sastrawan, budayawan)
- Alm Petrus Josephus Zoetmulder (ahli sastra Jawa kuno penyusun kamus Jawa kuno-Inggris)
- Alm Wasi Kolodoro/Ki Tjokrowasito (komposer musik karawitan Jawa dan pendukung utama Sendratari Ramayana)
- Alm Hosesein Djajadiningrat (pelopor tradisi keilmuan)
- Alm Nursjiwan Tirtaamidjaja (perancang busana dan batik)
- Alm Hendra Gunawan (pelukis dan pematung)
- Alm Soejoedi Wiryotmojo (arsitek)

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera diberikan berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU 20/2009 kepada para tokoh yang memenuhi tiga kriteria, yakni berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara; pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan beberapa bidang lain yang besar manfaat bagi bangsa dan negara; serta darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. © Soemitro

## Atase Perdagangan Tiongkok Resmikan PLTU Celukan Bawang

Atase Bidang Perekonomian dan Bisnis Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia (Minister Counsellor) Wang Liping (akan) meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Celukan Bawang di Buleleng, Bali.

Pengoperasian PLTU Celukan Bawang yang dapat menghasilkan listrik 3X142 Megawatt tersebut dilakukan pada Selasa (11/8) siang. Selain Wang, Direktur Utama PT China Huadian Engineering Li Qingkui turut meresmikan operasi PLTU tersebut

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa (11/8) pagi, jumlah investasi proyek pembangunan PLTU tersebut sekitar 700 juta dolar AS yang digelontorkan oleh sejumlah perusahaan yaitu PT China Huadian Engineering, PT Merryline International, dan PT General Energy Indonesia.

Pengelola PLTU Celukan Bawang China Huadian berharap pengoperasian pembangkit fase pertama tersebut dapat memenuhi 40 persen kebutuhan listrik Pulau Dewata. Pembangunan PLTU Celukan Bawang menjadi salah satu peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok di bidang energi.

Menurut data Kementerian Perdagangan Tiongkok, total nilai perdagangan kedua negara pada 2014 tercatat sebesar 63,6 miliar dolar AS. Selain itu jumlah investasi asal Negeri Tirai Bambu ke Indonesia tercatat sebesar 1,05 miliar dolar AS. /Ant-Ismed Eka Kusuma



## Bappenas: Target Kemiskinan MDGs 2015 Sulit Tercapai

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan target kemiskinan Millenium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan pada 2015 sulit tercapai karena beberapa indikator masih jauh dari target.

"Target kemiskinan masih berat. Kemiskinan menggunakan target garis kemiskinan sebesar 50 persen untuk 2015," ujar Deputy Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani dalam pengantar lokakarya dan pemaparan 'Pencapaian MDGs Indonesia' di Surabaya, Senin (10/8) malam.

Ia mengatakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional hingga akhir 2014 sebanyak 11,25 persen, sedangkan targetnya adalah 7,55 persen sampai akhir 2015 dari 15,10 persen pada 1990.

Untuk indeks kedalaman kemiskinan, Bappenas yakin akan tercapai karena targetnya berkurang di 2015 dan hingga akhir 2014 menurun menjadi 1,75 persen dari 2,70 persen di 1990.

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari satu dollar AS per kapita per hari berdasarkan data terakhir 2008, Nina mengatakan masih sebanyak 5,9 persen dan kini sudah tercapai sesuai target, yakni 10,30 persen.

Sementara itu, untuk penanggulangan kemiskinan dan kelaparan dengan target menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, ia mengatakan beberapa target dapat tercapai, misalnya prevalensi balita kekurangan gizi, prevalensi balita gizi buruk dan prevalensi balita gizi kurang.

Hingga akhir 2013, ujar Nina, prevalensi balita kekurangan gizi sebanyak 19,60 persen dengan target 15,50 persen, prevalensi balita gizi buruk sebanyak 5,70 persen dengan target 3,60 persen dan prevalensi balita gizi kurang sebesar 13,90



persen dengan target 11,90 persen.

Meski begitu, target proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum, yakni 1.400 kkal per kapita per hari dan 2.000 kkal per kapita per hari memerlukan perhatian khusus untuk menurunkan jumlahnya.

"Pada akhir 2014, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum 1.400 kkal perkapita per hari masih 17,39 persen dari target 8,5 persen, sedangkan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum 2.000 kkal perkapita per hari sebanyak 66,96 persen dari target 35,32 persen," ujar Nina

Sedangkan untuk proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja hingga akhir 2014 sebanyak 42,57 persen, jauh menurun dibandingkan pada 1990 sebanyak 71 persen

Dari seluruh provinsi di Indonesia, ia menuturkan kemiskinan paling banyak terdapat di Papua dengan jumlah 30,05 persen dan Papua Barat sebesar 27,13 persen.

"Paling berat Papua karena kini satu dari tiga penduduknya masuk kategori miskin," kata dia.

Sementara itu, upaya percepatan pencapaian MDGs diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Surat Edaran Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0068/M. PPN/02/2012 dan Nomor 050/583/SJ. /Ant-Tri Harningsih

## PDIP Dukung Menko Maritim, Garuda Fokus Penerbangan Domestik

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai masuknya Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja sebagai langkah yang tepat. Pasalnya, pemerintah membutuhkan orang-orang yang mampu berinovasi.

Inovasi dimaksud merujuk pada pernyataan Rizal Ramli yang ditunjuk sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya terhadap rencana pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus. Rizal meminta Presiden Jokowi meninjau ulang rencana ekspansi PT Garuda Indonesia tersebut.

Menurutnya, rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus ini justru akan membuat Garuda merugi. Terlebih anggaran pembelian pesawat dilakukan dengan meminjam uang dari China Aviation Bank sebesar USD 44,5 miliar.

"Orang yang tidak inovatif akan ditinggal. Paling ujung-ujungnya mengeluh. Ini krisis, itu krisis. Rakyat gak perlu itu. Rakyat butuhnya pejabat yang bikin terobosan seperti dia (Rizal Ramli),"



ucap Masinton dalam diskusi salah satu TV nasional, Kamis (13/8).

Masinton, anggota Komisi III DPR, juga menyinggung protes yang disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Yang mana disebut Rini, Garuda adalah BUMN yang bertanggung jawab kepada Menko Perhubungan, bukan Menko Kemaritiman.

Padaحال, jika Rini paham bernegara, Kementerian Perhubungan dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman.

"Sudah bagus itu. Kita terima kasih ke Pak Rizal. Menko sudah ingatkan jangan umbar-umbar uang negara, lagian Garuda juga belum bisa bersaing. Jadi saran beliau tepat, Garuda lebih baik konsen domestik," demikian Masinton. //Novrizal Sikumbang-Karel Stefanus

## Eksekusi 'Hutang' Soeharto, Jaksa Agung Pelajari Putusan MA

Mahkamah Agung (MA) akhirnya memperbaiki salah ketik terkait putusan kasasi antara Pemerintah Indonesia dengan Yayasan Supersemar, dan keluarga mantan Presiden Soeharto. Dalam hal ini keluarga Cendana harus membayar Rp 4,4 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyambut baik putusan itu meski dirinya mengaku belum membaca putusan tersebut secara utuh.



"Saya belum membaca bagaimana putusannya. Nanti saya baca dulu dan bagaimana selanjutnya tentu kita akan tahu," kata Prasetyo ketika dihubungi, Senin (10/8).

Mahkamah Agung memutuskan keluarga mantan Presiden Soeharto membayar Rp4,4 triliun. Putusan itu dilakukan sebagai perbaikan salah ketik putusan kasasi antara Pemerintah Indonesia dengan Yayasan Supersemar pada 2010 silam. //Fadlan

Syam Butho-Nebby Mahliburrohman

## Infrastruktur Mandek, Jokowi Ancam Copot Direksi dan Menteri BUMN



Infrastruktur sebagai roda perekonomian Indonesia diyakini Presiden Jokowi akan berjalan pada semester II tahun ini. Bahkan, pihaknya tidak segan-segan untuk mencopot direksi yang menghambat jalannya infrastruktur.

Jokowi pun berjanji akan segera mengganti jajaran direksi BUMN yang lamban dalam merealisasikan proyek infrastruktur, termasuk menteri BUMN sekaligus.

"Kalau tidak ada progress, kita akan lihat kinerjanya, kalau BUMN-nya lambat harus dilihat, direksinya yang tidak bisa kerja, saya ganti, kalau menteri BUMN, saya ganti, saya simpel saja berpikrnya. Kita fokus, selalu dikontrol, dan diawasi," ujar Jokowi dalam acara Peringatan 38 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/8).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong jalannya infrastruktur yaitu meningkatkan investor swasta. Namun, jika investor swasta belum juga masuk, pemerintah tak akan menunggu lama, melainkan akan mendorong BUMN.

"Jadi bukan sedikit-sedikit BUMN, swasta juga kita dorong. Karena kita butuh infrastruktur, hilirisasi butuh waktu," pungkasnya.

Presiden Jokowi akan fokus dalam progres proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang diambilalih oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setiap adanya laporan groundbreaking proyek infrastruktur, Salah satu cara, dia melakukan peninjauan proyek setiap tiga bulan sekali. //Nicha Muslimawati-Ismed Eka Kusuma



Rois Aam PBNU Mustofa Bisri (kiri) memberikan fatwa saat pembahasan rancangan Tatib Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang, Jawa Timur, Senin (3/8).

## Menjaga Tradisi NU di Tanah Kelahirannya

**N** KH Achmad Mustofa Bisri selaku Rois Aam PBNU menjabarkan dengan baik bagaimana menjaga dan membesarkan organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Ia terpaksa menyampaikan demikian dihadapan muktamirin. Sebab tradisi ulama nahdliyin mulai memudar. Padahal, Muktamar NU ke-33 dihelat ditanah kelahirannya, Jombang.

“Di tanah ini terbujur kiai-kiai kita. Disini NU didirikan, apa kita mau meruntuhkan disini juga? Naudzubillah,” tuturnya, Senin (3/8).

Dibawah sorotan media, dinamika yang terjadi pada dua hari pertama gelaran muktamar disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Permasalahan registrasi awal peserta, isu penculikan, penginapan, hingga aksi provokasi dalam pembahasan tata tertib muktamar.

“Kami menemukan semalam di penginapan ada oknum yang mau membagi uang dan kami menangkapnya. Saat sosialisasi pra muktamar di Medan, Rois Aam sosialisasi sistem Ahwa untuk mengurangi politik uang, tapi kami justru melihat para ulama yang melakukan politik uang,” kata peserta muktamar asal Kepulauan Riau.

Tudingan dan penghinaan ulama terhadap ulama lainnya sesama peserta juga dilakukan perwakilan Riau. Mereka menyebut pimpinan pleno dan peserta muktamar lainnya akan menerima karma atau kualat apabila memaksakan sistem Ahwa.

Dua peserta tersebut dirangkul keluar oleh Banser yang mengamankan jalannya pembahasan tatib. Itu dilakukan untuk menghindari tindak kekerasan, sebab sebagian peserta muktamar terbawa emosinya mendapati aksi provokasi tersebut.

PBNU dibawah kepemimpinan KH Said Aqil Sirodj disebut menjadi biangnya. Sistem pemilihan Rois Aam menggunakan Ahlu Halli Wal ‘Aqdi (Ahwa) menjadi senjata utama.

Ahwa terdiri dari 9 (sembilan) ulama hasil usulan pengurus wilayah dan cabang. Dalam prosesnya, pengurus wilayah dan cabang mengusulkan nama-nama calon tim Ahwa. Apabila dari usulan dihasilkan lebih dari 9 nama maka akan dilakukan perengkingan.

Sembilan nama teratas itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Ahwa. Kemudian dari Ahwa dilakukan sidang untuk menunjuk satu orang sebagai Rois Aam, baik dari internal Ahwa sendiri maupun dari luar.

Dalam pembahasan Pleno I yang mengagendakan Tata Tertib, Minggu (2/8) malam, muktamirin yang memenuhi ruang utama Muktamar NU ke-33 di Alun-alun Jombang terbelah. Satu kubu mendukung Ahwa, satu kubu lainnya menolak Ahwa. Alotnya pembahasan Ahwa berujung *deadlock*.

Situasi muktamar menjadi tidak

kondusif hingga kiai kultural atau kiai sepuh turun tangan. Senin (3/9) pagi, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jombang, mereka berkumpul. Pertemuan berlangsung sekitar 3,4 jam dihadiri pengurus besar (pusat) dan wilayah (propinsi) dan menghasilkan keputusan penting, merubah nomenklatur Ahwa.

"Karena ini urusan pemilihan Rois Aam, maka kiai-kiai yang akan memilih pemimpin kiai," jelas Gus Mus.

Harapan tinggal harapan, Selasa (4/8) siang, muncul lagi isu tidak sedap yang memanasakan muktamar. Sejumlah Rois Syuriah dari wilayah dan cabang dikabarkan telah dikumpulkan oleh tim salah satu paket pasangan Rois Aam (Penasehat/Syuro) dan Ketua Tanfidziyah (Ketum PBNU).

Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Fadlolan Musyaffa, mengatakan Rois Syuriah wilayah dan cabang itu dikumpulkan di Pondok Pesantren Tebuireng untuk menyatukan barisan. Yakni menolak Ahwa dan memenangkan pasangan dimaksud.

Sementara Forum Rois Syuriah, forum yang dibentuk panitia menindaklanjuti kesepakatan kiai sepuh, menggelar pertemuan di Ponpes Mambaul Ma'arif, Denanyar. Melalui pembahasan yang alot, Forum Rois Syuriah akhirnya sepakat menggunakan sistem Ahwa untuk memilih Rois Aam.

Kata Kiai Ma'shum Abrory, Rois Syuriah PCNU Pasawaran, Lampung, jumlah peserta dalam Forum Rois Syuriah terdiri 436 peserta dari syuriah PCNU dan PWNU. Dalam pembahasannya, Forum Rois Syuriah dipimpin KH Yahya Staquf, KH Malik Madani dan KH Masdar F Mas'udi.

"Kalau kemarin kan berbeda. Semua orang bisa bicara, makanya sampai ribut. Kalau di sini hanya syuriah saja," ucap Fadlolan.

Zuhairi Misrawi, peninjau muktamar sekaligus pengamat muda NU, menyayangkan sikap muktamirin yang mengedepankan egonya masing-masing diatas kepentingan besar NU.



*Ketua Umum PBNU terpilih KH. Said Aqil Siradj (kanan) didampingi Rais Aam Syuriah PBNU KH. Maruf Amin tersenyum ketika dirinya kembali terpilih sebagai Ketua umum PBNU periode 2015-2020 pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Kamis (6/8) dini hari.*

"Soal ahwa ini sebenarnya sistem terbaik, NU itu kan ormas ulama. Sudah seharusnya pemilihan Rois Aam dan Tanfidziyah dilakukan oleh kiai sepuh yang memang di pandang sebagai ulama wara'. Mereka punya visi ke-NU-an yang kuat," ucap Gus Mis di lokasi muktamar.

Sistem Ahwa merupakan alternatif terbaik untuk memilih pemimpin NU ke depan. Sistem ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan supremasi kiai sekaligus meminimalisir terjadinya politik uang.

"Dalam tradisi NU, menjadi pemimpin itu adalah musibah, bukan diperebutkan," jelasnya.

#### **Duet Kiai Ma'ruf - Kiai Said**

Rois Syuriah wilayah dan cabang sendiri menyepakati 9 nama Tim Ahwa. KH Ahmad Muzakki yang memimpin pleno menyampaikan ke-9 nama dimaksud sesuai dengan perolehan suara terbanyak.

Pertama KH Ma'ruf Amin 333 suara, KH Nawawi Abd Jalil 302 suara, KH Turmudzhi Badrudin 298 suara, KH Khalilurrahman 273

suara, KH Dimiyati Rois 236 suara, KH Syekh Ali Akbar 186 suara, KH Mahtum Hannan 162 suara, KH Maimun Zubair 159 suara dan KH Massubadar 135 suara.

Tim Ahwa melalui musyawarah mufakat internal memilih KH Mustofa Bisri sebagai Rois Aam PBNU masa khidmat 2015-2020. Akan tetapi, beberapa saat setelah terpilih, melalui sepucuk surat Gus Mus menyatakan tidak bersedia menjadi Rois Aam. Ahwa menggelar musyawarah lagi dan menyepakati KH Ma'ruf Amin sebagai penggantinya.

Sementara itu dalam pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah, KH Said Aqil Sirodj menang telak. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang berlangsung Rabu (5/8) malam hingga Kamis (6/8) pagi, Kiai Said memperoleh 287 suara.

Calon lainnya berturut-turut KH As'ad Said Ali 107 suara, KH Sholahuddin Wahid 10 suara, KH Hilmi Muhammadiyah 3 suara, KH Muhammad Adnan 1 suara, KH Muhammad Idrus Ronli 1 suara, KH Asad Said 2 suara, KH Mustofa Bisri 1 suara dan KH Saad Ali 1 suara. Dua suara lainnya dinyatakan abstain.

Untuk nama calon KH As'ad Said Ali, dalam proses pemilihan tersebut ditulis dalam tiga nama terpisah. Pasalnya, penulisan dalam lembar kertas suara oleh peserta salah menyebutkan. © Soemitro

**M**uktamar Muhammadiyah ke-47 yang digelar di Makasar, 1-7 Agustus 2015, menahbiskan Haedar Natsir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2015-2015. Istrinya, Noordjannah Djohantini terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisiyah periode yang sama.

Terpilihnya duet suami-istri Haedar dan Noordjannah mengulang sejarah. Pada awal berdirinya di Yogyakarta tahun 1912 silam, organisasi ini juga dipimpin duet suami-istri pendirinya, KH Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Haedar terpilih melalui sidang 13 anggota formatur PP Muhammadiyah. Abdul Mu'ti mendampinginya sebagai Sekretaris Umum.

"Alhamdulillah rapat berjalan lancar dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit," kata Ketua Panitia Muktamar Dahlan Rais di Makasar, Kamis (6/8) malam, seraya menambahkan terpilihnya Haedar dan Mu'ti melalui musyawarah mufakat.

Sebelum itu, melalui pemungutan suara menggunakan e-counting untuk calon pengurus PP Muhammadiyah 2015-2020, Haedar meraih suara terbanyak. Tercatat ia memperoleh 1947 suara, unggul 19 suara atas Yunahar Ilyas yang memperoleh 1928 suara.

Calon lain berturut-turut Dahlan Rais 1827 suara, Busyro Muqoddas 1811 suara, Abdul Mu'ti 1802 suara, Anwar Abbas 1436 suara, Muhadjir Effendy 1279 suara, Syafiq Mughni 1198 suara, Dadang Kahmad 1146 suara, Suyatno 1096 suara, Agung Danarto 1051 suara, Goodwill Zubir 1049 suara dan Hajriyanto Y Tohari 968 suara.

Ke-13 formatur pengurus PP Muhammadiyah ini merupakan hasil seleksi dari 39 nama dalam Sidang Tanwir yang dihelat sebelum muktamar. Pada Muktamar di Universitas Muhammadiyah Makasar, formatur inilah yang menentukan pucuk pimpinan pengganti Din Syamsuddin.

"Kami tentu harus mengucapkan



## Mufakat dalam 10 Menit untuk Haedar

terima kasih kepada Ketum PP Muhammadiyah periode 2010-2015 Profesor Din Syamsuddin yang telah mengantarkan Muhammadiyah selama lima tahun ini dan banyak meraih capaian cemerlang," ucap Haedar usai ditetapkan sebagai Ketum PP Muhammadiyah.

Pria kelahiran Bandung 25 Februari 1958 silam itu juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan muktamar sehingga berjalan lancar dan sukses.

Ke depan, Haedar menyatakan ingin meneruskan warisan cemerlang Din saat memimpin Muhammadiyah selama dua periode. Diantaranya jihad kebangsaan, jihad konstitusi dan menebar pesan perdamaian global. Apa yang disampaikannya tersebut sejalan dengan harapan mantan Ketum PP Muhammadiyah ke-13, Ahmad Syafii Maarif.

Dakwah konteks kekinian dilakukan dengan penekanan meluruskan jalannya pemerintahan dan sejumlah perundang-undangan yang dianggap kurang



*Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin (kedua kanan) menyerahkan berkas serah terima jabatan kepada Ketua Umum Muhammadiyah terpilih Haedar Nashir (kedua kiri) pada Mukhtamar ke-47 Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/8).*

berpihak kepada rakyat. Jihad konstitusi kini merupakan salah satu dari tiga belas poin rekomendasi Mukhtamar Muhammadiyah ke-47.

### 13 Rekomendasi Mukhtamar Muhammadiyah

1. Membangun masyarakat dengan ilmu. Mengajak perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah, untuk menjadi Center of Excellence (pusat inovasi unggulan) berbasis sustainability dan center of technopreneurshop dalam bentuk universitas riset.
2. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Mengajak umat Islam, khususnya warga persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah

- yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkasi sosial yang santun.
3. Peningkatan daya saing umat Islam. Mengajukan agar umat Islam Indonesia berperan lebih aktif di tingkat internasional dan berkompetisi dengan umat Islam lain.
  4. Penyatuan kalender Islam. Memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya. Diperlukan komitmen dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasinya sebagai insan Tuhan.
  6. Pengendalian narkotika psikotropika dan zat adiktif. Muhammadiyah akan menggalang kerjasama dan sinergi dengan seluruh potensi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, keagamaan maupun organisasi profesi untuk memberi perhatian dan berperan aktif dalam menanggulangi darurat zat adiktif (rokok, alkohol dan narkotika) di negara ini.
  7. Tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Muhammadiyah telah menerbitkan buku Teologi Bencana serta memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana, Muhammadiyah Disaster Management Center dan relawan kemanusiaan yang piawai.
  8. Memaksimalkan bonus demografi. Dalam dua dasa warsa ke depan

Indonesia mendapatkan anugerah kependudukan atau bonus demografi dimana mayoritas penduduk terdiri atas kelompok usia produktif. Muhammadiyah mendorong seluruh kekuatan bangsa lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan akhlak bangsa, terutama generasi muda.

9. Gerakan berjamaah lawan korupsi. Mendorong gerakan melawan korupsi terus diduplikasi secara masif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal Muhammadiyah bisa mendorong seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih baru tentang haram memilih pemimpin yang korupsi.
10. Jihad konstitusi. Menjadikan Jihad Konstitusi sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa.
11. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mendorong aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui usaha-usaha penghijauan hutan, mengubah gaya hidup yang boros energi, membersihkan polusi, membangun infrastruktur fisik yang ramah lingkungan, dan meminimalkan penggunaan kertas.
12. Pemanfaatan teknologi komunikasi. Mendorong umat Islam menguasai teknologi informasi. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama. Jejaring antar manusia dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi dan kerja sama yang membuana.
13. Human trafficking dan perlindungan buruh migran. Memandang perlu dilakukan advokasi secara serius terhadap para pekerja Indonesia di luar negeri dan memberikan wacana yang benar mengenai kesamaan derajat manusia. © Dedy K

## Gebrakan Rizal Ramli Ditolak Menteri BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli langsung bikin gebrakan di hari pertamanya menjabat. Ia meminta pemerintah selaku pemegang saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan pembelian pesawat jenis Airbus A350. Rizal beralasan, langkah tersebut diambil supaya pemerintah tidak menderita rugi. "Beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden saya minta tolong. Saya tidak ingin Garuda Indonesia bangkrut lagi karena sebulan lalu pinjam US\$ 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk membeli Airbus A350 sebanyak 30 buah," kata dia di Jakarta, Kamis (13/8).

Dia menuturkan, pesawat itu hanya cocok untuk penerbangan jarak panjang seperti Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Padahal, tingkat keterisian untuk rute tersebut minim. "Itu hanya cocok Jakarta- Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini punya Jakarta-Amsterdam dan Jakarta-London penumpangnya 30 persen," tutur Rizal.

Berkaca pada pengalaman rekan

sewilayah Singapore Airlines yang memiliki rute sama. Dia mengatakan maskapai tersebut juga mengalami rugi. "Saya katakan pada Presiden, 'Mas Singapore Airlines sekarang babak belur,'" kata Rizal Ramli.

Karena itu, pihaknya meminta membatalkan pembelian tersebut dan fokus untuk penerbangan domestik dan Asia. "Saya minta batalkan pembelian itu ganti pesawat lebih rendah kelasnya. Kita kuasai dulu pasar domestik," ujar Rizal.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Rini Soemarno yang membawahi langsung Garuda Indonesia mengaku belum mendengar usulan tersebut. Rini juga mengingatkan bahwa BUMN itu berada di bawah Kemenko

Ekonomi, bukan di bawah Kemenko Maritim. "Saya tidak mendengar hal itu. Dan BUMN itu di bawah kementerian koordinator ekonomi bukan di bawah kemaritiman. Berdasarkan apa, didasari apa bicara seperti itu. Karena kan kita ngeliatnya Garuda itu kan mengembangkan usahanya. Jadi dasar apa *cancellation* (pembatalan) itu," kata Rini saat di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8).

Ia menegaskan, siapapun jangan hanya asal bicara tanpa memiliki dasar. Terlebih, selain sebagai BUMN Garuda Indonesia juga merupakan perusahaan publik sehingga harus bertanggung jawab pada masyarakat luas. "Jadi jangan, saya rasa tidak bisa bicara A tanpa ada dasar. Kita harus bicara A, B, C dengan dasar. Garuda juga perusahaan publik, kita bertanggung jawab kepada masyarakat luas, apa-apa yang akan kita lakukan. Tidak bisa langsung diputuskan begitu saja," tegas dia. /Nailin In Sarah-Karel Stefanus



Mahkamah Agung memutuskan keluarga mantan Presiden Soeharto membayar Rp4,4 triliun. Putusan itu dilakukan sebagai perbaikan salah ketik putusan kasasi antara Pemerintah Indonesia dengan Yayasan Supersemar pada 2010 silam.

Vonis itu diputuskan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Nonyudisial hakim agung Suwardi, dengan anggota Mahdi Soroida Nasution dan Soltony Mohdally.

## MA Putus Keluarga Mantan Presiden Soeharto Bayar Rp4,4 Triliun

Putusan itu, diketuk pada 8 Juli 2015.

"Mengabulkan PK I (Negara Republik Indonesia), menolak PK II (Yayasan Supersemar)," sebagaimana dikutip dari laman *Mahkamahagung.go.id*, Senin (10/8).

Kasus ini sebelumnya diputuskan di pengadilan negeri Jakarta Selatan 27 Maret 2008, Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar. Majelis memvonis yayasan tersebut, mengganti kerugian kepada negara senilai USD105 juta dan Rp46 miliar.

Putusan itu sendiri, akhirnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 2009 dan juga majelis kasasi MA pada 28

oktober 2010.

Namun majelis hakim yang ketika itu di ketuai Harifin Tumpa, melakukan salah ketik. ketika itu, Yayasan mesti membayar 75 persen x USD420 ribu atau sama dengan USD315 ribu dan 75 persen x Rp 185.918.904 = Rp 139.229.178.

Semestinya pada putusan itu, ditulis Rp185 miliar, namun justru tertulis Rp185.918.904. Alhasil putusan itu, tidak dapat dieksekusi, dan membuat jaksa melakukan peninjauan kembali pada September 2013, yang juga diikuti Yayasan Supersemar.

Jika mengikuti kurs mata uang dolar amerika saat ini, total yang harus dibayarkan senilai Rp4,4 triliun. /Nailin In Sarah-Karel Stefanus Ratulangi



## Fadli Zon Nilai Pidato Presiden Cuma *Lips Service*

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015), jauh panggang dari api.

Salah satunya menyangkut komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kinerja lembaga tinggi dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional. Apa yang disampaikan Jokowi justru berbeda dengan kenyataan dilapangan.

“Misalnya dalam parpol, kalau mau persatuan diselesaikan dong jangan dipecah-belah. Jangan yang diomongkan dan dilaksanakan berbeda. Kita dukung apa yang diomongin itu, tapi yang dilaksanakan belum tentu,” ucapnya di Gedung DPR Senayan, Jumat (14/8).

Menurutnya, masih ada kesenjangan antara kata-kata dan pelaksanaannya.

“Kata-kata bagus, tapi berbeda. Berkali-kali menekankan persatuan tapi prakteknya tak tercermin,” kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan, semestinya setiap kata yang keluar seiring sejalan dengan perbuatan. Bukan sebaliknya, kata-katanya manis namun tidak diikuti dengan perbuatan.

Akan lebih baik jika Presiden menyampaikan kata-kata pahit, tetapi bisa menjadi obat bagi rakyat.

“Pelajaran yang berharga yang harus kita timba, pemerintah masih menganggap enteng. Kita disajikan impian kosong, lebih baik kata-kata pahit, tapi itu menolong rakyat,” tandasnya. /Nailin In Saroh-Karel Stefanus Ratulangli

## Effendi Simbolon Sebut Jokowi Kembali ke Jalan yang Benar

Politikus PDI Perjuangan Effendy Simbolon mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Rizal Ramli masuk dalam struktur Kabinet Kerja.

Ia menilai dengan masuknya Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Jokowi sudah mulai menemukan jalan kebenaran. Paling tidak, Jokowi mulai menyadari jalan yang ditempuhnya selama ini adalah salah.

“Kalau dia (Jokowi) sudah membawa Rizal Ramli maka itu sudah pintu masuk bagi Jokowi kembali ke jalan yang benar,” jelas Effendy usai menghadiri sidang Tahunan MPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).

Meski demikian, Effendy mengaku heran dengan langkah presiden yang menempatkan

Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian. Anggota Komisi I DPR RI itu menilai bahwa adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan Darmin Nasution dengan Rizal Ramli.

Darmin, disebutnya bermadzabkan neo liberalisme sementara Rizal Ramli yang merupakan mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur bermadzabkan ekonomi kerakyatan.

Dua orang dengan madzab berbeda dibidang ekonomi inilah yang membuatnya terheran-heran.

“Kok ada dua mazhab dibidang yang linier perekonomian dan kemaritiman sama disektor produktif semua, ini kan (Darmin) mahzabnya neolib. Terus digabung dengan Rizal Ramli yang ekonominya berbasis kemandirian,” tandasnya. /Novrizal Sikumbang-Karel Stefanus Ratulangli



## Jokowi Beri Penghargaan Pada Dua Orang Terkaya Indonesia

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada Dato Sri Profesor Tahir bos PT Mayapada Group dan Mohctar Riyadi bos PT Lippo Group. Keduanya mendapatkan anugerah bintang jasa utama yang disematkan Jokowi di Istana Negara, Kamis (14/8).

Penganugerahan juga diberikan kepada 44 orang lainnya. Banyak politisi Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mendapatkan penghargaan pada kesempatan ini. Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan politisi senior PDI-P Sabam Sirait diantaranya.

/Nailin In Saroh-Karel Stefanus Ratulangli

Rp.12.198/USD

27 Januari 2014

Anton Gunawan  
Kepala Ekonom Bank Danamon

"Kami melihat rupiah masih mengalami gejolak pada semester I tahun ini. Akan tetapi, nilai tukar akan kembali menguat pada paruh kedua 2014 setelah Pemilu..."

Rp.11.407/USD

20 Maret 2014

Ali, HSBC

"Percaya atau nggak sudah ada beberapa analis luar seperti Morgan Stanley sampai menghubungkan, kalau Jokowi jadi presiden, rupiah bisa tembus Rp.10 ribu /dolar AS..."

Rp.13.059/USD

10 Maret 2015

Bambang PS Brodjonegoro  
Menteri Keuangan

"Memang kurs yang terjadi sekarang berada di atas asumsi APBN tetapi saya sampaikan bahwa setiap pelemahan kurs sebesar Rp.100 akan menciptakan surplus di APBN."

Rp.12.963/USD

4 Maret 2015

Sofyan Djali  
Menteri Koordinator Perekonomian

"Melemah terhadap dolar, Rupiah justru menguat terhadap mata uang lain seperti Korea"

Rp.13.164/USD

11 Maret 2015

Joko Widodo, Presiden RI

"Sore hari ini kita akan bicara mengenai perkembangan ekonomi global meskipun perlu saya sampaikan fundamental ekonomi kita baik"

Rp.13.400/USD

8 Juni 2015

Bambang PS Brodjonegoro  
Menteri Keuangan

"Malaysia Ringgit (melemah/depresiasi) sebesar 1,1%, Won Korea 1,07%, dan Peso Filipina juga 0,7%"

Rp.11.415/USD

16 Mei 2014

Lana Soelistianingsih  
Kepala Riset Samuel Sekoritas

"Bisa saja lah. Kalau ditanya bisa, selalu bisa, tapi itu kan jangka panjang. Butuh proses. Kalau jangka pendeknya paling baik mungkin bisa menguat ke 10.800-10.500 itu sudah paling kuat,"

Rp.11.787/USD

7 Juli 2014

Kiswoyo Adi Joe  
Analisis dari Investa Saran Mandiri

"Jika pasangan Prabowo-Hatta menang, Rupiah berpotensi jatuh hingga Rp.13 ribu /USD"

Rp.12.794/USD

12 Februari 2015

Joko Widodo, Presiden RI

"Tapi ini kan memerlukan waktu, saya ini baru 3 bulan lebih sedikit lho,"

Rp.12.720/USD

17 Desember 2014

Joko Widodo, Presiden RI

"Dengan fundamental ekonomi kita, dengan perbaikan ruang fiskal kita, ya moga-moga (pelemahan rupiah) tidak berjalan lama. Mulai tahun depan moga-moga sudah mulai baik"

Rp.13.542/USD

2 Agustus 2015

Bambang PS Brodjonegoro  
Menteri Keuangan

"Kebijakannya ada di Bank Indonesia, nilai tukar bukan tanggung jawab kita, utamanya adalah tanggung jawab Bank Indonesia".

Rp.13.495/USD

4 Agustus 2015

Joko Widodo, Presiden RI

"Saya yang pusing menjaga kondisi ini".



# Semua Berawal dari Jalan Situbondo

**P**emerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah memasuki Semester II/2015. Pada Semester I lalu, pemerintahan baru hasil Pemilihan Presiden 2014 disibukkan penataan organisasi kementerian. Kerja itu hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda rampung.

Kerja yang diketahui bernama 'perubahan nomenklatur' kementerian itu menyita segala-galanya. Jokowi, mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, dasarnya ingin merealisasikan janji. Perubahan nomenklatur menjadi sarananya. Akan tetapi realisasi janji itu bukan semata perubahan papan nama, kop kementerian hingga stempel. Sebab ada banyak hal fundamen disitu.

Merunut ke belakang, penyusunan struktur kelembagaan ini tertuju pada Tim Transisi pimpinan Rini Soemarno. Rini yang pada akhirnya menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saat itu tercatat sebagai Kepala Staf. Ia dibantu lima deputi masing-masing Hasto Kristiyanto, Akbar Faizal, Andi Widjojanto, Anies Baswedan dan Eko Putro Sanjoyo.

Tim Transisi berkantor di Jalan

Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Dibentuk Jokowi untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan baru. Khususnya menyangkut penjabaran visi, misi dan sembilan program aksi pemerintahan baru. Kemudian mengkaji serta menyusun struktur dan kelembagaan kabinet.

Dipertegas Rini, selain tugas-tugas tersebut timnya juga menjaring sejumlah tokoh yang layak masuk kabinet. Nama-nama sejumlah tokoh, berdasarkan keahliannya masing-masing, melalui seleksi ketat selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun penentuan akhir hak prerogatif berada ditangan Presiden.

Kerja besar berkenaan dengan jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Di tangan Rini Soemarno dan lima deputi menghasilkan kajian dan rumusan komprehensif. Menyangkut efektifitas dan efisiensi kinerja kabinet ke depan.

"Kami menyiapkan *tool and talent*, menyiapkan bagaimana talenta-talenta di negeri ini, *the right man in the right place*. Itu tujuan yang ingin diterapkan beliau (Jokowi). Dengan begitu, waktu beliau masuk di pemerintahan,



langsung bisa bergerak. Semua menteri, siapa pun menteri, langsung bisa kerja," kata dia, 4 Agustus 2014.

Representasi kinerja Tim Transisi diumumkan Presiden Jokowi di Istana Negara, 26 Oktober 2014, menghasilkan 34 kementerian. Dengan sejumlah perubahan nomenklatur dan penggabungan beberapa kementerian. Tidak disampaikan sampai kapan proses penataan organisasi pemerintahan dilakukan.

Akhir bulan Juli 2015, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 telah berusia 284 hari. Belum terselesaikannya perubahan nomenklatur diakui pemerintah telah menghambat jalannya pemerintahan.

Perubahan inilah yang menjadi



Presiden Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK berbincang bersama Politikus PDIP Puan Maharani (kanan), Ketua DPP PKB Marwan Ja'far (kedua kiri) dan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno di Rumah Transisi di kawasan Menteng, Jakarta, Agustus 2014.

awal lesunya perekonomian nasional di triwulan I. Tercatat pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,7 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tidak menyangkal hal itu. “Ada 10 kementerian dan lembaga yang nomenklaturnya perlu disesuaikan, sehingga pengeluaran pemerintah masih terhambat,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, 6 Mei lalu.

Keputusan pemerintah merombak 10 kementerian membuat anggaran yang sudah diplot tidak bisa langsung diserap. Pada bulan April tercatat penyerapan anggaran untuk proyek infrastruktur di dalam negeri baru mencapai empat persen dari total anggaran Rp 118,54 triliun. Jumlah tersebut jauh di bawah rencana target sebesar 11,07 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) Basuki Hadimuljono terus mengupayakan penyerapan anggaran dengan sejumlah inovasi. Ia menjelaskan, lambatnya penyerapan dana infrastruktur disebabkan adanya perubahan nomenklatur. Selain itu, juga disebabkan masalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). “Karena perubahan nomenklatur dan orang-orangnya di awal tahun, kementerian hanya boleh melakukan belanja rutin,” ujar Basuki.

Untuk mengejar keteringgalan di sisa waktu 7,5 bulan, menurut Basuki, pihaknya harus bisa menyerap anggaran minimal Rp 14,46 triliun per bulan atau Rp 578,45 miliar per hari. Anggaran tersebut akan dipakai untuk pembangunan jalan nasional.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finances (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menyebut, buruknya realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengamatan Indef, hal tersebut

### Perubahan Nomenklatur Kabinet Kerja

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipersingkat namanya menjadi Kementerian Pariwisata.</li> <li>3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset dan Teknologi dilebur menjadi dua kementerian. Pertama, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dijadikan satu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi dua kementerian. Yakni Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.</li> <li>6. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan.</li> </ol> |
|--|--|



*Petugas menghitung pecahan Dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (12/8). Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS pada perdagangan Rabu (12/8) ditutup pada kisaran Rp.13.800.*

disebabkan lambatnya persiapan administrasi kelembagaan sejumlah kementerian yang kemudian menghambat pencairan belanja pemerintah pada kuartal I 2015.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, terjadinya kondisi pelemahan ekonomi di Tanah Air antara lain karena lambatnya realisasi anggaran yang seharusnya sudah dikucurkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur penting.

“Dunia usaha konsumsi direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah,” kata Bahlil baru-baru ini. Dengan demikian, menurut dia, pelemahan ekonomi yang terindikasi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 tidak lepas dari lemahnya kinerja realisasi anggaran, baik di pusat maupun di daerah.

Bahlil mengingatkan bahwa perekonomian nasional, baik di pusat maupun daerah, juga masih sangat bergantung pada sektor konsumsi. “Sektor ini pun sangat bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.

Sejak awal Presiden Joko Widodo melakukan perubahan nomenklatur dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR RI sejumlah kalangan sudah memprediksi akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal

itu sempat diutarakan oleh mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie pada bulan Oktober 2014.

Menurutnya perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat secara otomatis akan diikuti dengan perubahan tata nama kantor-kantor kedinasan terkait di tingkat daerah. Tidak hanya sebatas perubahan pelang nama dan atribut seperti kop surat dan lain-lain, perubahan nomenklatur secara otomatis akan mengubah standar operasional, budaya kerja serta alur koordinasi antar lembaga. “Konsekuensi ke anggaran pasti besar,” ujar Marzuki

Selain itu, kata Marzuki Alie, perubahan nomenklatur akan memakan waktu yang cukup lama bagi kementerian dan kantor-kantor dinas di daerah untuk melakukan penyesuaian. Dia memperkirakan butuh waktu sekitar satu sampai dua tahun bagi kementerian dan lembaga untuk benar-benar efektif memulai tugas dan fungsi utamanya. “Saya sejak awal ketawa saja karena ini justru akan menghambat. Pemerintah jadi tidak bisa langsung lari,” tuturnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akhir bulan lalu mengungkap bagaimana rendahnya serapan APBN-Perubahan 2015. Penyerapan anggaran per 16 Juli 2015 tercatat baru sekitar 41 persen atau Rp 820 triliun dari total pagu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1.984 triliun. Atas dasar itu, pada Semester II/2015, pemerintah berketetapan untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Bambang meyakini penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi-JK akan mencapai 96 persen atau sekitar Rp 1.905 triliun pada akhir tahun ini. Disampaikan juga rendahnya tingkat serapan ini sebagai hal yang wajar, sebab pemerintahan Jokowi-JK masih melakukan penataan organisasi.

Kondisi minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah bertambah sulit dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Pasalnya, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, perlambatan ekonomi saat ini semakin menekan dunia usaha di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini telah memengaruhi daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berimbas pada sektor industri di dalam negeri.

“Pelemahan rupiah mempengaruhi daya beli masyarakat. Semua kebutuhan masyarakat yang sifatnya sekunder (jadi) tidak banyak dibeli, seperti mobil, motor, dan barang-barang sekunder lainnya, (dunia usaha) sepi,” ujar Ade di Jakarta kemarin. Karena itu, Ade berharap belanja pemerintah dapat digenjut untuk mengompensasi hal tersebut.

Dari awal pemerintahan pemerintahan baru nilai tukar rupiah terus melemah. Membaiknya kondisi ekonomi di Amerika Serikat memang menjadi faktor utama pelemahan ini. Pada perdagangan Jumat (31/7) lalu nilai tukar rupiah bahkan mencapai Rp13.500. Posisi ini setara dengan saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998.  Soemitro

Sidang The 7th AIPA Caucus

## DPR Perkuat Kohesifitas Sosial Kawasan ASEAN



**B**adan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menghadiri Sidang The 7th AIPA Caucus di Siem Reap, Kamboja, 26-30 Juli 2015. Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin oleh Junico BP Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, diikuti Betti Shadiq Pasadigoe dari Fraksi Partai Golkar dan Kartika Yudhisti dari Fraksi PPP.

Dijelaskan, sidang The 7th AIPA Caucus merupakan sarana untuk mengevaluasi implementasi resolusi yang telah diadopsi dalam Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang terakhir dilaksanakan di Vientiane - Laos pada September 2014.

Sebelum sidang The 7th AIPA Caucus dibuka, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Kamboja, H.E Mr. Chheang Vun menggelar jamuan makan malam di kantor dinas. Esok harinya, dilaksanakan Opening Ceremony AIPA Caucus yang diawali dengan *Courtesy Call* antar Ketua

Delegasi dengan H.E. Dr. Nguon Nhel.

“Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) akan mempererat kemitraan parlemen ASEAN. Apalagi akan ada sistem pasar terbuka dan komunitas ekonomi ASEAN yang diharap dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh kawasan Asia Tenggara,” ujar Junico BP Siahaan.

Junico menjelaskan, DPR sebagai delegasi Parlemen Indonesia mengambil peran strategis dalam mewujudkan AIPA sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat di seluruh kawasan Asia Tenggara. AIPA bukan sebatas asosiasi antar pejabat dan pemimpin negara, tetapi juga jembatan penghubung antar rakyat (*people to people*).

Para wakil rakyat dapat menyebarkan gagasan, visi dan kemajuan ASEAN kepada masing-masing konstituennya sehingga ASEAN dapat menjelma menjadi kumpulan antar rakyat yang semakin kohesif. Hal ini akan mempersolid integrasi ASEAN di

mata dunia Internasional.

Pada bagian lain, DPR juga aktif menggelar pembinaan dan dialog dengan pelajar dan mahasiswa luar negeri di Indonesia. Misalnya pada tanggal 28 Juli lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR Mohamad Sohibil Iman menerima kunjungan studi para murid Jakarta Japanese School (JJS) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Banyak hal yang didiskusikan antara murid JJS dengan Sohibil, mulai dari promosi batik sebagai identitas budaya Indonesia hingga kebersihan fasilitas umum seperti toilet dan penyediaan sarana pedestrian (pejalan kaki) yang sangat minim.

“Dalam kesempatan ini juga dibahas seputar pemanfaatan energi matahari, promosi perikanan dan fasilitas telepon pengaduan keadaan darurat. Dialog ini dapat menumbuhkan pengertian tentang realitas budaya dan perilaku antara masyarakat Indonesia dan Jepang,” tuntas Mantan Wakil Ketua DPR ini. *Adv*

# Rombak Kabinet Penahanan Krisis

Lesunya perekonomian nasional diperparah dengan kebijakan pemerintah China yang sengaja melakukan pelemahan terhadap mata uang yuan. Selasa 11 Agustus 2015, People's Bank of China (POBC) atau Bank Central China mengambil langkah untuk pelemahan terhadap yuan. POBC melakukannya dengan mengubah kalkulasi kurs tengah yuan terhadap dolar AS. Kurs tengah diambil lewat dari angka nilai tukar penggerak pasar dan penutupan hari sebelumnya.

Kurs tengah yuan terhadap dolar AS oleh POBC ditetapkan 6,2298, turun dari sebelumnya 6,1162. Nilai tukar yuan di pasar spot turun hampir 2% di awal perdagangan hari ini. Ini merupakan penurunan harian terbesar dalam sejarah. Nilai yuan terhadap dolar AS diperdagangkan 6,3080, melemah dari sebelumnya 6,2097 pada penutupan Senin kemarin.

Langkah ini diambil pemerintah China untuk menggenjot ekspor. Pelemahan yuan secara otomatis membuat dolar Amerika Serikat menguat. Hal ini membuat barang produk Amerika tidak dapat bersaing dengan barang produksi China yang semakin murah. Namun kondisi ini langsung berimbas pada Indonesia.

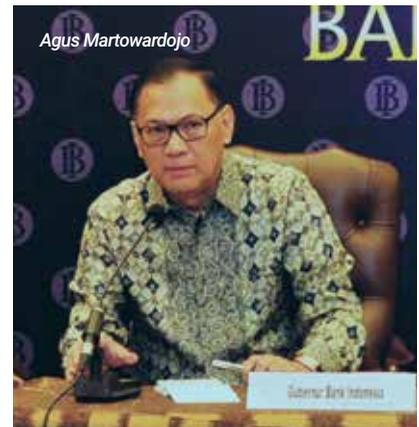
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 11 Agustus langsung terkoreksi anjlok 2,66 persen atau merosot 126 poin dibanding perdagangan sebelumnya. IHSG kembali terperosok pada perdagangan Rabu 12 Agustus mencapai 3,1 persen atau mencapai 143,1 poin. Nilai tukar rupiah berdasarkan pemantauan Aktual pada 12 Agustus

sempat menyentuh Rp13.800 per dolar Amerika.

Ditengah ketidakpastian pasar Presiden Indonesia Joko Widodo 12 Agustus melakukan perombakan Kabinet Kerja. Enam menteri diganti oleh Jokowi. Yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) dari Tedjo Edy kepada Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Sofyan Djalil diganti oleh Darmin Nasution mantan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dari Indroyono Susilo diganti oleh Rizal Ramli, Menteri Perdagangan dari Rahmad Gobel diganti oleh Thomas Trikasih Lembong. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Adrinof Chaniago diganti oleh Sofyan Djalil. Sementara itu politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung menggantikan Andi Widjojanto sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

Perombakan ini direspon positif oleh pasar. Pada perdagangan hari Kamis 13 Agustus IHSG menguat 2,34 persen. Namun sejumlah pelaku pasar masih memprediksikan efek devaluasi yuan akan menekan IHSG dan rupiah dalam pekan-pekan ini.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah menyiapkan jurus ampuh untuk mencegah efek dari devaluasi tersebut. Ditemui usai serah terima jabatan, di Kantor Kementerian Perekonomian Lapangan Banteng, Jakarta, Darmin meminta seluruh lembaga keuangan



untuk saling komunikasi dan koordinasi. "Yang pertama harus ada perbaikan dan akurasi data, apalagi kalau ada aturan itu sudah diterapkan dan dikoordinasikan dengan berbagai instansi," ujarnya.

Devaluasi yuan menjadi perhatian serius Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Menurutnya meskipun efek devaluasi menyebabkan rupiah melemah namun kondisi ini dinilai masih lebih baik dibandingkan negara-negara dikawasan Asia. Sampai 12 Agustus 2015, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 10,16 persen (year to date/YTD). Pelemahan ini, kata Agus, lebih dalam jika dibandingkan dengan won Korea yang melemah 8,35 persen YTD, bath Thailand yang melemah 6,62 persen YTD, serta yen Jepang yang melemah hanya 3,96 persen YTD.

"Meski demikian, pelemahan rupiah masih lebih baik jika dibandingkan dengan ringgit Malaysia yang melemah 13,16 persen YTD, lira Turki yang melemah



*Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kedua kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (ketiga kiri), Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (kiri), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), berfoto bersama se usai mengikuti acara pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8).*

16,23 persen YTD, real Brazil yang melemah 29,4 persen YTD, dan dollar Australia yang melemah 10,6 persen YTD,” ungkap Agus usai rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), pada Kamis (13/8).

Agus menuturkan, dalam

beberapa hari terakhir depresiasi rupiah terhadap dollar AS meningkat tajam, terutama dipicu devaluasi yuan China. Hal demikian terjadi di tengah menguatnya indikasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Bank Sentral China mendevaluasi mata uang yuan sebesar 1,86 persen terhadap dollar AS pada 11 Agustus 2015, diikuti dengan devaluasi kedua sebesar 1,62 pada 12 Agustus 2015. Asal tahu saja, Bank Sentral China kemudian kembali melakukan devaluasi yuan sebesar 1,11 persen terhadap dollar AS. “(Devaluasi yuan) Dikarenakan kondisi di China terjadi

pelemahan kinerja ekspor, capital outflow, dan cadangan devisa di China juga mengalami penurunan,” imbuh Agus.

Agus mengatakan, kebijakan pemerintah China tersebut berdampak negatif terhadap pergerakan mayoritas mata uang negara-negara di dunia, tak terkecuali rupiah. Sementara itu, data terkini khususnya data tenaga kerja Amerika Serikat mengindikasikan perkembangan positif. “Sehingga semakin meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS dalam waktu yang lebih cepat,” tutur Agus. *Moh Sallian*

# Ketika Tom Menjadi Menteri

**H**ari itu, Selasa, 4 November 2014. Ada yang tak biasa terjadi di Istana. Sekitar dua puluhan orang asing berkumpul di Istana Negara. Kabarnya, Jokowi akan menemui mereka untuk bicara soal rencana investasi.

Ternyata benar, beberapa saat berikutnya Humas Sekretariat Kabinet RI dalam laman *setkab.go.id* memberitakan bahwa orang asing itu adalah perwakilan dari 20-20 Investment Association, sebuah lembaga non profit bentukan George Russell, yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia.

Profesional di bidang global financial and investment pasti tahu, George Russell adalah pendiri Russell Investments, sebuah lembaga global financial and investment yang mengelola dana pensiun AS terbesar sampai saat ini.

Yang mengejutkan, dari dua puluhan investor asing itu ternyata ada orang asli Indonesia, Thomas Lembong namanya. Dia menyatakan diri sebagai wakil dari Qufat Investment yang tercatat sebagai anggota di 20-20 Investment Association.

Tom, begitu sapaan Thomas Lembong sehari-hari, mengaku

bahwa seluruh investor yang menghadap Jokowi saat itu bukan investor ecek-ecek. “Kami 20-20 sudah sejak awal tahun punya rencana investasi di Indonesia. Tapi terus terang magnetnya Pak Jokowi. “Kami ini investor kualitas tinggi, bukan investor spekulatif. Asosiasi 20-20 adalah para investor *buy and hold*, bukan jual-beli semata. Ini yang akan mengurangi Indonesia dari ketergantungan *hot money*,” katanya seperti ditulis di laman *setgab*.

Ya. Magnet itu adalah pernyataan Jokowi ini: “Kita memang membutuhkan dana segar untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, jaringan kereta api di luar Jawa karena APBN kita tidak mencukupi...Membangun infrastruktur itu mahal, dan makin ditunda makin naik harganya,” saat itu ketika rupiah masih belum mendekati Rp14 ribu per Dollar seperti saat ini.

Magnet itu akhirnya mampu menarik magnet lain untuk mendekat yakni tawaran investasi sebesar USD8 triliun (sekitar Rp90 ribu triliun lebih) dari beberapa perusahaan finansial yang tergabung dalam 20-20 Investment Association itu.

Menurut Tom yang jadi duta untuk 20-20 Investment Association saat itu, sebagian besar tawaran investasi banyak untuk proyek padat modal seperti tol laut, kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik sampai jalan tol yang ada di Jawa dan Bali.

*Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kanan) usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/8).*





Presiden Joko Widodo (tengah) menerima kunjungan sejumlah penanam modal (investor) yang tergabung di dalam 20-20 Investment Association di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014 lalu. Pertemuan tersebut membahas soal berbagai peluang investasi yang ada di Indonesia.

Investor tersebut masih enggan untuk masuk di sektor pertambangan atau kelapa sawit karena dianggap harganya komoditasnya melorot cukup tajam.

Yang cukup menarik adalah kabar bahwa sekitar 80 persen investor tersebut rencananya akan masuk lewat investasi portofolio di pasar modal, terutama saham-saham BUMN. Hanya sekitar 20 persen saja yang berupa investasi langsung.

Ini artinya, besar kemungkinan mereka akan membeli saham-saham perusahaan BUMN yang bergerak

di bidang infrastruktur. Apalagi kondisi pasar modal di Indonesia saat ini dikhawatirkan anjlok akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global, maka besar kemungkinan banyak harga saham akan hancur. Bisa jadi harga saham BUMN yang ada juga ikut hancur. Akankah harga saham-saham BUMN akan dijual murah?

Mari kita kembali melihat pengalaman Quvat Investment yang justru menanggung untung saat terjadi krisis finansial global tahun 2008 dengan cara memborong saham-saham BUMN. “...around the time of the global financial crisis of 2008, Quvat bought Garuda Indonesia bonds paying 23%, and state utility PLN bonds that offered 18%. While others saw these as risky, the Quvat trio figured the chance of default was

*small (and they were right),” tulis forbesindonesia.com pada 2013 lalu.*

Lalu apa komentar Tom? “*We are really quite expert in lending and fixed income. Investing in distressed bonds can make you a lot of money,*” demikian pernyataan Tom kepada *forbesindonesia.com* saat itu.

Akankah cara Quvat Investment itu akan terjadi lagi saat Indonesia sedang menghadapi krisis finansial global 2015 ini? Dan akankah terulang lagi kata “*Investing in distressed bonds can make you a lot of money*”. Namun kali ini yang “*make you a lot of money*” bukan hanya Quvat Investment saja tapi puluhan investor dibalik 20-20 Investment Association yang sudah menyiapkan uang sekitar Rp90 ribu triliun itu. Apakah ini yang akan terjadi? Dhanu Akbar, Nicha Muslimawati, Tri Harningsih

# Tangan-Tangan AS dan Cina Mulai Susun Kekuatan Goyang Jokowi?

Dana bantuan dari Pemerintah Tiongkok sebesar Rp 461 triliun yang dijanjikan kepada Pemerintahan Jokowi-JK belum juga cair hingga kini. Para taipan tim sukses Jokowi seperti Mochtar dan James Riadi yang punya koneksi luas dengan Amerika Serikat, sepertinya mulai dilanda kekhawatiran dan ketidakpastian. Jika situasi ini semakin krusial, bukan tak mungkin kedua negara adidaya ini justru bersatu lancarkan aksi destabilisasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK?

**M**eskipun pemerintahan Tiongkok daratan di Beijing dan para pebisnis *overseas* Tiongkok punya jaringan yang berbeda dalam mengakses pemerintahan Jokowi-JK, namun saat ini nampaknya mereka kembali ke pakem awal yang bertumpu pada ungkapan: *One country two system*. Para taipan atau Tiongkok pedagang berada di garis depan, otoritas politik dan militer di Tiongkok daratan mendukung dari belakang.

Untuk menelisik para taipan yang bermain dalam konstalasi politik Indonesia saat ini, dan temalnya dengan pemerintahan Tiongkok di Beijing, sebenarnya cukup mudah untuk melacak jejak-jejaknya. Karena jaringan yang menciptakan persenyawaan dan keterhubungan antara pemerintah Tiongkok daratan di Beijing dan para taipan Tiongkok rantau di Indonesia secara sistematis dan terencana dirajut melalui sebuah

skema yang dibangun oleh Deng Xio Ping sejak 1979.

Semuanya bermula pada 1979, ketika Deng Xio Ping, pemimpin baru Tiongkok yang menggantikan Mao Zhe Dong, menggagas apa yang disebut *Special Economic Zone* (SEZ). Gagasan dasar Deng dengan membuat SEZ adalah, untuk menjalin persekutuan strategis dengan para pebisnis Tiongkok Rantau yang sebagian besar merupakan pebisnis besar yang merajai negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, agar bisa menanam investasi secara besar-besaran di Tiongkok Daratan. Sehingga para Taipan yang menyebar di berbagai kawasan dunia termasuk Asia Pasifik, bisa ditarik kembali ke negeri para leluhurnya, agar berinvestasi.

Dengan begitu, pintu gerbang itu dibiarkan sedikit terbuka untuk perusahaan-perusahaan asing. Dan ini berarti, termasuk para Taipan Tiongkok rantau yang kebetulan



Deng Xiaoping (tengah) bersama presiden Amerika Serikat Gerald Ford, di Beijing, China, 1975.

sebagian besar para leluhur mererka daerah kelahirannya berasal dari Tiongkok Selatan.

Sterling Seagrave, mantan wartawan investigasi di Asia asal Inggris, menulis buku menarik 'Lords of the Rim'. Membongkar jaringan Tiongkok Perantauan atau Tiongkok Pesisir (*Overseas Chinese*). Dan sepak-terjangnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Menurut Seagrave dalam bukunya ini, kampung leluhur para pengusaha kakap Tiongkok berasal dari Pesisir (Pacific Rim) atau Tiongkok Selatan,



terutama Kwangtung, Fukien. Masuk akal jika Deng melalui kebijakan strategisnya menggalang dukungan para Taipan Tiongkok Selatan ini kemudian memprioritaskan Provinsi Kwantung dan Fukien, basis kekuatan dan kampung leluhur para Taipan Tiongkok Selatan.

Inilah awal mula Deng menerapkan kebijakan Zona Ekonomi Khusus di Tiongkok Selatan, dimana 14 kota di sepanjang Tiongkok pesisir tersebut dibuat menjadi “Kota Terbuka” dan diberi status perdagangan khusus dan mendapat potongan-potongan pajak untuk mendorong investasi para Taipan Tiongkok Selatan yang para leluhurnya juga merupakan

pedagang, sudah berabad-abad meninggalkan Tiongkok.

Bahkan lebih daripada itu, penciptaan skema SEZ secara efektif mampu menggalang loyalitas kesukuan Hakka, Hokkien, Hokchiu, Henghua, Teochiu, Canton, dan Hainan. Mereka semua bisa tergerak menanam investasi di Tiongkok karena 14 Provinsi yang dicanangkan sebagai SEZ merupakan kampung halaman mereka.

Dengan diberlakukannya skema SEZ di 14 kota tersebut, maka liberalisasi ekonomi praktis telah diterapkan di Tiongkok Selatan. Bahkan melalui skema SEZ tersebut, semua sindikat Tiongkok Rantau mendapat pintu masuk untuk menjalin hubungan-hubungan

rahasia dengan jaringan bawah tanah yang bermukim di kampung-kampung leluhur melalui Hongkong.

Begitu Tiongkok daratan membuka diri, pelabuhan-pelabuhan besar di Fukien dengan diam-diam memperbaharui koneksi-koneksi sindikat langsung dengan Taiwan, Jepang dan Asia Tenggara. Lebih gilanya lagi, sindikat-sindikat Canton dan Teochiu meningkatkan operasi-operasi penyelundupan ke Kwangtung dan Hongkong.

Bisa dibayangkan. Jika SEZ pemerintah pusat Tiongkok berhasil menggalang para Taipan Tiongkok Rantau yang sudah lama meninggalkan negeri leluhurnya kembali ke Tiongkok melalui iming-iming keuntungan

ekonomi, maka dengan keinginan Tiongkok agar memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, bisa dipastikan pemerintah Tiongkok dan para konglomerat Tiongkok yang berkiprah di Indonesia, akan bersatu-padu melakukan invasi ekonomi di Indonesia.

Jalanan kerjasama Pemerintah pusat Tiongkok di Beijing dengan para konglomerat Tiongkok Rantau di Indonesia yang umumnya juga berasal dari Tiongkok Selatan seperti Salim Group atau Lippo Group, memang sudah ada sarannya sejak dahulu kala. Terkait penerapan skema SEZ yang berhasil menjalin aliansi strategis antara pemerintahan Deng di Tiongkok daratan dan para Taipan asal Tiongkok Selatan, rupanya dijalin melalui sistem koneksi sosial yang unik, Guanxi. Melalui sistem koneksi sosial inilah modal para Taipan Tiongkok Selatan berhasil dialirkan ke negeri leluhurnya di Tiongkok daratan.

#### **Anatomi Para Taipan Indonesia yang Bersenyawa dengan Pemerintah Tiongkok**

Ketika pemerintahan Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xio Ping mulai memberi payung hukum bagi masuknya investasi para Tiongkok rantau di Tiongkok melalui skema SEZ, siapakah para pemain utama Taipan Indonesia yang investasi di Tiongkok?

Menurut penulisan Aktual, ada tiga kekuatan besar Taipan Indonesia yang bermain di Tiongkok, yang pada perkembangannya kemudian, menjadi mata-rantai penting persekutuan strategis pemerintah Tiongkok dan Tiongkok pedagang (Tiongkok Rantau) di Indonesia. Liem Soe Liong (Salim Group), Eka Cipta (Sinar Mas Group) dan Mochtar-James Riady (LIPPO Group). Namun berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber Aktual, Riady dan LIPPO Group-lah yang paling agresif investasi di Tiongkok.

Mari kita urai satu-persatu. Berdasarkan penulisan Tim Riset Global Future Institute, sejak 1990-an Liem Soe Liong dan Salim Group



Liem Soe Liong

telah menanam modal di Fu Qing, propinsi Fujian. Melalui Indofood, anak perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa, konglomerasi milik Liem Soe Liong, membangun pabrik dengan investasi sebesar USD 600 ribu, sekitar Rp 1,2 milyar. Tentu saja harus dinilai nominal ini pada era 1990-an kala 1 dolar AS masih berkisar Rp 2000.

Selain itu, Liem berpatungan dengan beberapa pengusaha dan BUMN Singapura, membangun kawasan industri seluas 5000 Hektar, juga di Fujian. Bukan itu saja. Melalui Rong Chiao Industrial Group (kelompok sekitar 30 pengusaha asal Fujian yang kini sukses di berbagai negara), Liem punya andil juga dalam beberapa proyek besar. Kelompok ini, yang dikenal sebagai Fujian Clan, antara lain memiliki Guan Yuan Light Industry, pabrik sepatu dan bunga kain sutera yang terletak di Shangzeng Honglu. Hasilnya diekspor, antara lain ke Indonesia.

Eka Cipta, konglomerat besar Tiongkok lainnya yang mukim di Indonesia, juga menanam modal di Tiongkok. Eka Cipta yang pemilik Sinar Mas ini, membeli 55 persen perusahaan kertas milik pemerintah di Ling Po. Untuk itu, Eka Cipta yang nama aslinya Oei Ok Tjhong ini, mengucurkan dana sebesar USD 1 juta.

Eka Cipta dan Sinar Mas juga mengambil alih 101 BUMN Tiongkok. Kantor Sinar Mas di Hongkong



Chairman Lippo Group Mochtar Riady (di monitor), menyampaikan sambutan pada Halal bi Halal Karyawan Lippo Group di Karawaci, Tangerang, Banten, Selasa (4/8).

yang menangani pengambilalihan ini, menyediakan dana sekitar USD175 ribu. Namun, Eka Cipta di Tiongkok tidak mengibarkan bendera Sinar Mas Group. Melainkan melalui putranya, Oei Hong Leong yang berwarganegara Singapura, mengibabarkan bendera: Tiongkok Strategic Investment (CSI) yang berbasis di Hongkong.

Maret 1993 misalnya, CSI menanamkan USD175 juta untuk konsesi 50 tahun menjalankan 101 perusahaan BUMN di Dalian, Timur Laut Tiongkok. Suatu kesepakatan bisnis terbesar dalam menangani perusahaan BUMN yang pernah dilakukan oleh perusahaan Hongkong.

Cerita tentang Mochtar Riyadi dan LIPPO Group, bahkan lebih spektakuler lagi sepak-terjangnya di Tiongkok. Lippo bekerjasama dengan mitra lokal, menanam modal sebesar 11,85 juta Dolar Hongkong di Fujian. Rupanya, Fujian juga merupakan tanah leluhurnya Mochtar Riyadi. Mochtar Riyadi yang nama aslinya adalah Li Wen Zheng ini, melalui Lippo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara dan perumahan. Proyek-proyek ini dibangun di kota



Fuzhou, ibukota propinsi Fujian.

Berita Asian Business edisi April 1993 mewartakan, bersama investor Taiwan, Lippo menggarap proyek di Pulau Mei Zhou. Dengan porsi 60 persen saham. Patungan ini membangun kawasan peristirahatan mewah. Tahap pertamanya memakan biaya sekitar USD 40 juta.

Juga pada April 1993, di Propinsi Shandong, Lippo juga punya proyek. Bersama pemerintah setempat, membangun infrastruktur senilai USD 350 juta. Di sini, Lippo bertanggungjawab untuk mengkoordinasi konsorsium untuk memobilisasi dana sebesar USD 300 juta.

Melalui serangkaian fakta-fakta tersebut, Riyadi dan Lippo nampaknya yang paling agresif menanam modal di Tiongkok, tanah leluhurnya. Sedemikian rupa, sehingga tak mudah untuk merinci semua investasi Lippo di daratan Tiongkok. Bahkan terbetik kabar Lippo mengadakan rencana paturan pendirian bank secara *offshore* dengan menyeter modal sebesar USD50 juta. Selain itu, Lippo juga membeli kawasan seluas 135 ribu kaki persegi di atas rencana stasiun bawah tanah di Guangzhou.

Di sektor keuangan, Lippo juga mulai menanamkan pengaruhnya di daratan Tiongkok. Lippo mendirikan perusahaan sekuritas di Shenzhen dan Shanghai, melalui pembelian The Nanhai Commercial Bank.

Menurut catatan Tim Riset Global Future Institute, modal para konglomerat Indonesia uang dipertaruhkan di tanah leluhurnya di daratan Tiongkok, mencapai triliunan rupiah. Bahkan melebihi investasi Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Singkat cerita, Salim-Riyadi-Eka, merupakan tiga konglomerasi terbesar Indonesia yang lahir Tiongkok tapi dibesarkan di Indonesia. Barang tentu, ketiganya bukanlah satu-satunya yang menanam modal di tanah leluhur.

Dan persis seperti analisis Seagrave, para taipan yang besar di Asia Tenggara itu, umumnya menanamkan modalnya di daerah kelahirannya sendiri, atau leluhurnya.

Liem Soe Liong, industrinya berbasis di kawasan Fujian, tanah kelahirannya. Mochtar Riyadi, di Propinsi Shandong, atau lebih dikenal dengan kawasan Fuzhou. Dan investasi yang dilakukan, umumnya berupa investasi jangka panjang, dan tidak mengejar keuntungan jangka pendek.

Tak pelak lagi, strategis ini diterapkan atas dasar ikatan emosional dengan tanah leluhurnya, tanpa mengesampingkan aspek keuntungan bisnisnya itu sendiri. Liem membangun kota kelahirannya Fuqing menjadi kawasan industri. Mochtar Riyadi membangun proyek turisme dan infrastrukturnya di Putian. Eka Cipta membangun kerajaan industrinya di Quanzhou.

### **Mengarah pada Menghangatnya Konspirasi AS-Tiongkok?**

Yang patut dicermati oleh para pengambil kebijakan strategis bidang Politik-Keamanan maupun Ekonomi di Indonesia, gelombang investasi para taipan ke Tiongkok daratan bukan sekadar konsekuensi dari perubahan orientasi pembangunan ekonomi Tiongkok dari sosialisme ke kapitalisme. Bukan sekadar

itu. Melainkan didasari dorongan primordial untuk menyatukan langkah strategis antara pemerintah Tiongkok daratan dan para taipan (*Overseas China*) yang tersebar di Asia Pasifik, seraya mengkondisikan suatu kerjasama strategis antara para pebisnis Amerika-Eropa dengan para Taipan Tiongkok rantau di berbagai negara. Yang tentunya bisa membawa dampak menghangatnya kembali hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok di era pasca perang dingin, yang dijumpai melalui para taipan yang menanam investasi di Tiongkok, maupun di negara-negara di Amerika dan Uni Eropa.

Sehingga tak tertutup kemungkinan antara kedua negara adidaya ini, sewaktu-waktu bisa saling bersekutu untuk melemahkan Indonesia dari dalam, seperti yang mereka lakukan pada krisis moneter 1997-1998, menjelang kejatuhan pemerintahan Suharto.

Skenario ke arah itu bukan suatu hal yang mustahil, menyusul adanya konsolidasi para ekonom Universitas Indonesia berhaluan Neoliberal, menyusul peluncuran buku Profesor Dr Ali Wardhana, mantan menteri keuangan di era pemerintahan Suharto.

Minggu 7 Juni 2015 lalu, nama Ali Wardhana kembali terdengar. Menyusul peluncuran sebuah buku yang bertajuk: "A Tribute to Ali Wardhana Indonesia's Longest Serving Finance Minister: From His Writing and His Colleagues", di Jakarta.

Buku yang diedit mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu ini, dari judul bukunya saja sudah mengesankan gagasan utamanya, yaitu melihat kembali peran penting mantan Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden Suharto ini. Seraya hendak membuktikan bahwa sejumlah pemikiran Ali lainnya yang sampai saat ini dianggap masih relevan.

Maka itu, momentum peluncuran buku yang isinya meliputi 15 pidato di forum Bank Dunia dan IMF, empat makalah yang pernah ditulis, dan pandangan dari 16 kolega Ali, kiranya perlu dibaca secara tersirat sebagai langkah konsolidasi politik

Mantan Menteri Keuangan yang sekarang menjabat Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani berfoto selfie dengan Mantan Menteri Keuangan Era Orde Baru, Ali Wardhana, saat peluncuran buku *A Tribute to Ali Wardhana Indonesia's Longest Serving Finance Minister: From His Writing and His Colleagues* di Jakarta, Minggu (7/6/2015).

para teknokrat ekonomi Universitas Indonesia untuk kembali memegang kendali dan pengaruh dalam penyusunan kebijakan strategis ekonomi Indonesia yang berhaluan neo-liberalisme dan pro pasar.

Betapa tidak. Dalam peluncuran buku tersebut hadir Managing Director and Chief Operating Officer World Bank Sri Mulyani Indrawati, Emil Salim (beberapa kali menjabat menteri dalam pemerintahan Suharto), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 Anwar Nasution, serta pengusaha Sofyan Wanandi.

Sri Mulyani, Emil Salim dan Anwar Nasution, merupakan alumni Fakultas Ekonomi UI. Sedangkan Sofyan Wanandi, pada era 1966 dikenal sebagai salah seorang aktivis mahasiswa UI yang ikut dalam aksi menggoyang pemerintahan Presiden Sukarno dengan menunggangi gerakan anti komunis dan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Selain itu, dalam acara peluncuran buku itu, hadir beberapa ekonom berhaluan "neolib abu-abu" seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.

Menokohkan kembali Ali Wardhana, kiranya sulit dengan jelas mengindikasikan adanya upaya untuk mengkonsolidasikan kembali para ekonom berhaluan Neoliberal untuk kembali merebut pengaruh pengambilan kebijakan strategis perekonomian nasional.

Ali Wardhana memang dipandang sebagai salah satu perancang kebijakan strategis pembangunan ekonomi Indonesia yang berhaluan neo-liberalisme dan pro pasar, bersama-sama dengan Wijoyo



Nitisastro, Radius Prawiro, JB Sumarlin, dan belakangan Adrianus Moy, di era pemerintahan Suharto.

Bahkan bersama dengan Wijoyo Nitisastro, Ali Wardhana terhitung sebagai Godfather Mafia Berkeley. Mereka berdua ini selain sebagai arsitek pembangunan ekonomi pemerintahan Suharto, juga punya akses dan lobi kuat ke sumber-sumber dana internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Melalui Wijoyo dan Wardhana inilah, Indonesia mendapat kucuran utang atas restu kedua badan keuangan dunia tersebut. Bahkan sekarang, akibat kebijakan neoliberal keduanya, negeri kita dililit utang triliunan dolar AS. Sekarang, salah satu kadernya, Sri Mulyani, dipercaya Bank Dunia untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif.

Siapa yang menikmati utang yang gagasannya dirancang oleh Wijoyo dan Wardhana? Siapa lagi kalau bukan para konglomerat Tiongkok yang dibesarkan Orde Baru seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, dan Mochtar Riadi. Bahkan bukan itu saja. Sejumlah konglomerat Indonesia lainnya juga ikut menikmati utang luar negeri seperti Henry Pribadi, Sudwikatmono, Ibrahim Irsyad, Teddy Johar, Ciputra, Anthony Salim, Budiarsa Sastrawinata, Anre Halim dan Ismail Sofyan.

Dalam sistem perekonomian

bebas yang dikembangkan sepanjang masa Orde Baru, para konglomerat menjadi urat saraf perputaran roda ekonomi. Dalam pembangunan yang mementingkan angka pertumbuhan ekonomi, tak dapat ditampik konglomerat tampil menjadi motor yang menggerakkan gerbong ekonomi nasional.

Dengan begitu, kemungkinan persekutuan strategis antara para ekonom neoliberal yang pro pasar dan para taipan sebenarnya sudah ada landasannya jauh hari di era pemerintahan Suharto.

Akankah mereka bersatu di kala krisis ekonomi nasional saat ini memasuki zona merah?

Bukan suatu hal yang tidak mungkin. Pada Mei 1998 yang bermuara pada kejatuhan Presiden Suharto, *capital flight* yaitu larinya modal dan uang para taipan ke luar negeri, bahkan dilarikannya modal pinjaman para taipan dari bank-bank pemerintah, maupun desakan para ekonom Mafia Berkeley (Wijoyo, Wardhana, Radius Prawiro, Emil Salim) yang mendesak Ginandjar Kartasasmita berikut 14 menteri mengundurkan diri dari kabinet Suharto, pada akhirnya menjadi persekutuan strategis menuju kejatuhan rezim Suharto.

Bukan tidak mungkin, pola ini akan berulang. by Hendrajit



# Geliat Perbukuan Indonesia di Kancah Dunia



"Buku adalah jendela dunia" dan "Baca adalah kunci kesuksesan" dua kata itu sering kita baca di dinding perpustakaan. Dari kata-kata tersebut dapat kita simpulkan betapa pentingnya arti buku dalam dunia pengetahuan manusia. Maka dari itu pada sekitar abad ke-15 setelah mesin cetak ditemukan oleh Guttenberg dibukalah pameran terbesar didunia yang kini dikunjungi tidak kurang dari 260 ribu orang dari 132 negara. Pameran buku tersebut dinamakan Frankfurt Book Fair (FBF). Pameran ini diikuti 100 negara dan disorot lebih dari 9.300 jurnalis seluruh dunia.

Sesuai dengan tradisi yang berlaku di Frankfurt Book Fair (FBF) panitia akan memilih satu dari berbagai negara yang ikut untuk menjadi Guest of Honor untuk pameran FBF. Menjadi Guest of Honor di FBF bukanlah hal yang mudah karena waktu untuk seleksinya yang panjang dan ketat. Salah satu syarat agar terpilih ialah kelayakan industri perbukuan setiap negara. Dengan terpilihnya Indonesia pada tahun ini maka bisa dibilang industri perbukuan Indonesia sedang menggeliat kembali.

Setelah terpilih sebagai Guest of Honor Frankfurt Book Fair tahun ini, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah pameran FBF pada bulan Oktober mendatang. Bermodalkan 2000m3 di area pameran kita memiliki kesempatan untuk diplomasi budaya dengan cara memamerkan buku-buku anak bangsa seperti sastra, humaniora dan *sains* yang telah di terjemahkan kedalam bahasa Jerman dan Inggris. Diantaranya sejumlah karya penulis indonesia yang telah dibeli oleh penerbit Jerman dan negara lainnya seperti Amba (Laksami Pamuntjak), Pulang (Leila S. Chudori), Lelaki Harimau dan Cantik Itu Luka (Eka Kurniawan).

Tak hanya buku saja yang dipamerkan, indonesia juga akan menampilkan kampanye seluruh budaya, Naskah Kuno, Fotografi, Arsitektur, Festival Film, serta Seminar tentang Indonesia. FBF 2015 di Indonesia ini bertemakan "17.000

Islands of Imagination".

## Dukungan kebijakan perbukuan

Geliat perbukuan yang telah diakui dunia ini mesti diimbangi dengan dukungan kebijakan dari pemerintah dengan bentuk UU Perbukuan sebagai payung hukum yang mengatur industri perbukuan. Diharapkan, konteks UU Perbukuan yang sedang dirancang saat ini dapat memperhatikan pula fenomena perbukuan yang berkembang, tidak hanya mengaitkannya dengan buku-buku ajar.

Dalam Konkernas IKAPI disebutkan bahwa pemerintah mengucurkan dana sekitar 11 Trilyun untuk pembelanjaan buku nasional, tetapi dalam penggunaannya 70% dana tersebut merupakan dana buku-buku proyek dimana hanya penerbit yang memiliki lobi kuat yang bisa mendapatkan hak untuk menerbitkannya.

## Buku, Tanda Intelektualitas yang Tinggi

Tak dapat dipungkiri bahwa buku merupakan karya yang mumpuni sebagai penunjang intelektualitas seseorang. Buku mampu menyebarkan gagasan dan fikiran sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga mampu memberikan kontribusi pemikiran secara nyata dan faktual. Tanpa buku, kita tidak akan mengenal si anak singkong atau pemilik sepatu usang yang mampu menjadi pengusaha besar bahkan dipilih sebagai seorang menteri. Kedua contoh tersebut menjadi bukti bahwa seseorang dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya melalui kisah hidup yang dituang dalam sebuah buku.

Namun, tidak semua penulis mampu menembus seleksi penerbit, salah satunya karena persaingan pasar dan tema yang tidak sesuai dengan visi penerbit. Untuk itulah dibutuhkan satu pintu bagi para penulis tersebut untuk bisa masuk dalam industri perbukuan. *Self Publishing* menjadi jawaban bagi penulis yang tidak memiliki akses ke industri perbukuan. Banyak politisi dan tokoh akademisi yang memanfaatkan jalur ini agar pemikirannya dapat tersebar luas.

Bagaimana menjadi *self publishing* jika waktu yang ada sudah habis untuk mengurus bisnis atau hal lain yang juga penting? Untuk itulah kami melalui **buku.in** hadir guna untuk bekerjasama dengan siapapun yang ingin menuliskan pemikirannya dalam bentuk buku agar dapat memberikan sumbangan intelektual bagi masyarakat.

**buku.in** sangat memahami bahwa setiap gagasan unggul dan perjalanan hidup sukses seseorang yang mencerahkan harus disebarluaskan supaya diketahui oleh masyarakat umum. Masalahnya, tidak semua orang mengetahui dan paham bagaimana caranya gagasan atau kisah hidupnya itu dikomunikasikan kepada publik baik karena persoalan teknis atau waktu. Untuk itu, kami hadir menjembatani hal tersebut.



**Oleh: Rizal Ramli**

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

# TANTANGAN PRESIDEN JOKOWI

**P**residen Republik Indonesia Joko Widodo sudah seharusnya berhenti menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu dan hanya perlu terfokus pada hal yang penting. Kurang dari satu tahun dalam masa jabatannya, Jokowi telah menghadapi serangkaian tantangan, baik politik dan ekonomi.

Serangkaian tantangan antara lain, pertama, yaitu isu perombakan kabinet (*reshuffle*). Beberapa menteri kabinet kerja dinilai gagal dalam melakukan tugasnya, sehingga Jokowi harus berlaku adil antara tuntutan dari anggota koalisi dengan kebutuhan profesional nonpartisan. Bagi Jokowi, tuntutan ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.

Tentu saja, Jokowi berkewajiban memenuhi tuntutan semuanya. Paling tidak sebagian untuk kepentingan bisnis dan sebagian untuk kepentingan politik. Namun, tantangan nyata bagi Jokowi pada masa mendatang adalah menunjuk individu untuk memimpin kementerian ekonomi. Karena posisi tersebut merupakan komandan tertinggi bagi perekonomian Indonesia, mereka (menteri ekonomi) juga merupakan posisi yang paling berharga untuk kepentingan politik.

Tuntutan kepentingan politik tentu menimbulkan risiko besar. Jika Jokowi terlalu menenangkan pemimpin koalisi dan memberikan posisi Menteri Ekonomi, Jokowi bisa berakhir dengan hal yang lebih buruk.

Terkait dengan melemahnya dan terpuruknya ekonomi rakyat Indonesia, pemilih Jokowi pada

Pemilu lalu tidak akan menyalahkan para pemimpin partai politik karena mereka telah bekerja dengan baik sejauh ini. Sebaliknya, mereka akan menyalahkan Jokowi.

Di sisi lain, jika dalam menjalankan perekonomian Jokowi berhasil menemukan dan memilih individu-individu terbaik dan tercerdas di Indonesia, maka Jokowi akan mendapatkan musuh lebih banyak dari koalisi berkuasa. Di sisi lain, dia akan mendapatkan pujian dari para pemilihnya, bahkan lebih penting, pujian dari komunitas bisnis.

Tugas kedua Jokowi adalah menenangkan situasi ekonomi yang sedang goyah. Meskipun Presiden dan penasihatnya percaya, badai ekonomi hanya sesaat.

Berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi China yang menurun diluar perkiraan, harga komoditas yang lebih rendah, dan hilangnya kepercayaan investor di Indonesia menunjukkan bahwa mereka membutuhkan tindakan yang nyata dari pemerintah.

Perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh tidak lebih dari 5 persen pada 2015. Pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal menurun, bahkan bisa dikatakan belum menyentuh nilai dasar. Faktor eksternal menyebutkan perekonomian melambat, sebagian besar perlambatan karena kesalahan kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan banyak dari mereka merupakan orang lama yang sebelumnya telah berada di pemerintahannya.



Satu pelajaran penting yang harus diambil Jokowi beberapa hari ini adalah melakukan lebih banyak kerja. Kebijakan Kabinet Kerja diambil tanpa memiliki tujuan dan prioritas yang matang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat prioritas.

Alih-alih mencoba melakukan semuanya sekaligus, pertanyaan muncul: Apa yang paling penting, apa kendala yang dialami pertumbuhan ekonomi saat ini, dan bagaimana kita dapat mengatasi kendala tersebut dengan cara yang paling bijaksana?

Kendala yang paling nyata adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi harus sadar belanja infrastruktur pemerintah rendah. Lebih dari setengah tahun pemerintahan berjalan, realisasi serapan anggaran hanya 8

persen. Disini jelas ada kemacetan (*bottleneck*) serius. Jika dibiarkan terus-menerus, ini menjadi ancaman bagi perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun menengah.

Untungnya, ada perbaikan cepat. Jokowi memiliki penasihat ekonomi yang bisa mengatur revaluasi aset BUMN. Banyak dari perusahaan BUMN nilai asetnya dibawah nilai semestinya (*undervalued*), sehingga setelah BUMN direvaluasi dengan baik, BUMN bisa meningkatkan pembiayaan sendiri untuk proyek-proyek infrastruktur dengan menerbitkan obligasi (utang) domestik dan global.

Dengan mata uang rupiah yang terus melemah dan kelebihan kapasitas industri sebesar 30 persen, terlihat ada potensi untuk peningkatan ekspor. Namun, saat

ini eksportir dibatasi oleh kurangnya fasilitas kredit. Jika Jokowi menggunakan bank-bank BUMN sebagai kendaraan untuk memperluas kredit bagi eksportir, dengan sedikit usaha, akan didapat hasil yang cepat.

Terakhir, pemerintah perlu mengatasi penurunan belanja konsumen. Penurunan ini sebagian terjadi karena kurangnya percaya diri terhadap perekonomian bangsa. Selain itu, inflasi komoditas pangan juga turut mendorong turunnya belanja konsumen. Pendapatan rumah tangga dihabiskan untuk membeli sembako, padahal sebagian besar pasokan bermasalah.

Terkendalanya pasokan pangan tidak hanya menyebabkan penurunan produksi dalam negeri, tetapi juga kuota impor. Sebagian besar kuota dikuasai “mafia pangan” yang mengontrol impor komoditas pangan dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Penghapusan kuota impor akan menghasilkan harga pangan yang lebih rendah dan meningkatkan daya beli konsumen.

Pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan pasti akan memprotes langkah tersebut. Mereka akan menggunakan bendera nasionalisme sebagai alasan ketika berdebat melawan pencabutan kuota. Jokowi harus berpegang teguh pada pendiriannya dan menggunakan otoritas sebagai Presiden demi kebaikan rakyat Indonesia. itu adalah kunci keberhasilan sebagai presiden. ◦

Ditulis sebelum menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.



# PEGIAT ANTI KORUPSI BUKAN ORANG SUCI

**B**adan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjadi perhatian publik tidak lama ini. Mulai dari penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka sampai dengan pengungkapan kasus korupsi berskala besar menjadi penyebabnya. Satu orang yang paling berperan dalam rentetan peristiwa hukum di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso.

Namanya tidak pernah dijagokan sebagai Kabareskrim. Maklum karir pria asal Pati, Jawa Tengah tersebut banyak menghabiskan karirnya di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Namun redupnya kinerja KPK berhasil ia tambal dengan pengungkapan kasus korupsi oleh Bareskrim. Mulai kasus korupsi di Pemprov DKI Jakarta, dugaan korupsi di BP Migas, pembangunan stadion Gede Bage Jawa Barat dan masih banyak lagi lainnya.

Kepada wartawan Majalah Aktual Wahyu Romadhony dan Fadhlán Syiam Butho, di ruang kerjanya, Selasa (28/7) ia bahkan berjanji akan mengungkap 9 kasus korupsi dengan nilai triliunan rupiah. Ia juga menjawab desakan tentang petisi yang meminta dirinya untuk dicopot.

Juga tentang kontroversi kasus yang menjadi perhatian publik. Berikut petikan wawancaranya.

**Selama ini Bareskrim kurang memiliki peran yang menonjol dalam pengungkapan kasus korupsi, namun kenapa sekarang terlihat menjadi prioritas?**

Sebenarnya karena yang menjadi perhatian masyarakat tentang korupsi padahal banyak hal yang saya kerjakan masalah pertambangan, penggelapan iya. masalah sengketa tanah iya, banyak sekali. Tapi yang perhatian korupsi itu yang ternyata menjadi fokus pada penanganan masalah ternyata soal korupsi. Mungkin dikaitkan apa yang ditangani KPK ada perselisihan KPK-Polri seolah dimunculkan, kayaknya Bareskrim sekarang mau unjuk gigi, padahal tidak. Itu suatu pertanggungjawaban tugas kewajiban amanah. Sekarang saya duduk Kabareskrim selesaikan PR yang ada. Nah ini upaya saya, saya kerja *full* artinya semua kasus itu jadikan prioritas. baik penganiayaan, kasus sifatnya umum atau orang bilang kasus kecil apapun bobotnya itu pekerjaan dan itu harus selesai.

**Pengungkapan kasus korupsi yang anda lakukan sekarang, relatif punya**

**efek politik yang besar seperti TPPI.  
Apa tidak ada ketakutan?**

Bagi saya apa yang harus ditakutkan, itu kewajiban selama berpijak pada UU peraturan. tidak ada indikasi apa yang ditakutkan. Berani jujur adil bicara dengan fakta. Ada yang mau intervensi dan intimidasi?

Kita jelaskan ini tugas penyidikan pengungkapan yang penting adalah pekerjaan ini harus jujur adil dan terbuka, supaya masyarakat tahu mengawasi. Intervensi atau penekanan kan akan berhadapan dengan masyarakat.

**Anda tadi berbicara tentang kejujuran seperti slogan KPK bagaimana hubungan lembaga anda dengan KPK?**

Tidak ada masalah, bagus, tim saya paparkan kasus ini ke KPK dalam rangka koordinasi dengan pengawasan, karena pekerjaan saya diawasi KPK. Saya merespon, pekerjaan terkait korupsi saya laporkan ke KPK. Ada satu kasus kita paparkan ke KPK, jadi kita tangani ini bukan berarti tidak melaporkan itu wujud kerjasama.

**Walaupun sampai sekarang anda tidak melaporkan harta kekayaan kepada KPK?**

Saya ingin jujur ingin isi yang benar, ternyata tidak gampang mengisi itu tidak gampang. Ada *pointer* rupanya ada nilai. memang harus dihitung cermat jangan dikemudian hari jadi masalah.

**Anda sekarang menjadi *newsmaker*, terakhir anda berhadapan dengan Buya Syaife Maarif sampai ada petisi untuk menurunkan anda, bagaimana anda menanggapi?**

*Ndak* ada masalah biasa saja. saya bilang gini, Buya kan tokoh senior pasti paham. artinya saya kan tidak tahu tiba-tiba nilai saya seperti itu. Saya dikoreksi senang ingin bekerja dengan baik. Saya pasti perbaiki diri. Sekarang perbaiki dari mana kalau tidak ada faktanya. Lain kali kalau menilai ada faktanya, sehingga bisa berangkat dari situ. Sekarang ujung-ujung minta dicopot karena tidak benar, dimana tidak benarnya?



Kriminalisasi dimana? Merekayasa kasus dimana? Bukan berarti benci. Bukan berarti saya benci, saya tidak pernah marah. Kritisi silahkan sah saja. Asalkan sesuai dengan fakta, sehingga saya bisa perbaiki diri.

Karena kalau tidak seorang tokoh menyampaikan sesuatu itu pasti didengar dipercaya masyarakat. Nah tiba-tiba yang disampaikan salah, kan kasihan. Saya lindungi beliau dari hukum. Kalau beliau sampaikan salah kalau menyangkut pidana kan masalah juga. Siapapun yang ragukan saya, tanya saya. Lihat faktanya gak ada masalah.

**Anda banyak mengungkap kasus besar namun sedikit sekali yang tersangka yang ditahan, kami mendengar ada kaitannya dengan dana penyidikan?**

Dana penyidikan bukan kaitan penahanan. Cepat penahanan itu tergantung alat bukti, saksi yang didapat, fakta. Itu yang membuat cepatnya proses penahanan. Saya prinsip seorang pidana dikenakan penahanan kan ga harus kan

dapat. jadi pertimbangannya membahayakan, hambat penyidikan, nah itulah penyidik yang ambil kesimpulan. Kenapa harus ditahan kalo kooperatif. Sekarang Pak Bambang Widjojanto, Abraham Samad tidak dilakukan penahanan karena pro aktif. Tapi dikala tidak proaktif kita ambil langkah hukum. Jadi tidak ada hubungannya dengan cepat atau lambat atau biaya.

**Publik banyak yang menilai anda ingin menyaingi KPK, anda setuju dengan anggapan itu?**

Gak lah, jabatan itu amanah harus dipertanggung jawabkan, sekarang saya punya tanggung jawab. Jangan bekerja hanya ingin dinilai, terpaksa. Bekerja kewajiban, soal hasil atasan saya yang menilai. Tandingan dengan KPK itu tidak ada yang penting kerjaan saya selesai bekerja dengan sebgus dan sebaik mungkin. tidak meninggalkan pekerjaan.

Saya selalu begini, pekerjaan saya selalu maksimal, di Kasespim selalu tuntas dan tidak meninggalkan PR.



### **Kasus pimpinan Komisi Yudisial (KY) dianggap sebagai serangan balasan Polri, anda sepakat?**

Jadi ini kan orang yang kaitkan seolah ada Budi Gunawan, Hakim Sarpin. Ini hanya kebetulan. Ini pribadi seorang Sarpin, melaporkan seorang yang kebetulan di KY. Apakah salah? Apakah harus membedakan? Tugas kita berikan pelayanan terbaik siapapun kita lakukan. Masalahnya laporan Sarpin, hampir 4 bulan kita tangani, dan tidak mudah, harus ada pembuktian. Bukti yang didapat kita rinci. Kita sampaikan ahli bahasa, pidana, dan saksi lain. Setelah dinyatakan unsur pidana. Dilanjutkan ke penyidikan. Itu sebenarnya proses biasa, ini delik aduan selesai sudah. Jangan dikaitkan dengan institusi lembaga apalagi masalah. Ada yang ingin benturkan KPK-Polri. Ada kelompok yang inginkan itu, terserah sih saya profesional. Saya tidak memilah memilah, saya panggil sudah waktunya. Mediasi silahkan kita kasih kesempatan, tapi proses tetap jalan.

### **Ada juga persepsi, kinerja anda bentuk pengadilan untuk rezim SBY?**

Ya itu saya bilang, orang berpikir gitu, kenapa gak lihat kasus lain. Orang melihat supaya ada unsur balas dendam, saya *pure ga* ada kriminalisasi di prapreadilan buktinya kalah kan. Tidak mungkin saya berbuat itu, faktanya begitu. Hanya orang mengartikan. Sekarang Denny, karena laporan, sekarang saya buktikan laporan itu benar atau tidak.

Pak Denny, penggiat antikorupsi, pertanyaan saya apakah pasti dia suci bebas korupsi? Saya Kabareskrim apakah bersih? Belum tentu tergantung manusianya. Kesempatan dan niatnya kan begitu.

### **Jika desakan untuk mencopot anda sukses, anda legowo?**

Sangat siap, dari awal saya bilang ini amanah. Saya tidak pernah minta jabatan. Kalau saya dicopot, ikhlas pengganti saya masih banyak lebih bagus. Yang nilai atasan saya Presiden dan masyarakat. Kalo desakan itu 18000, saya tidak bilang pro dan kontra.

Penduduk Indonesia berapa juta, masa dikalahkan. *Ga fair* kalau gak ada faktanya. Saya manusia biasa juga. Buktikan kesalahan, itu yang paling penting. Bukan karena kepribadian saya.

### **Pada awal jabatan sebagai Kabareskrim kan ada tiga kasus besar, kemudian terakhir usut 9 kasus besar korupsi, bagaimana tindak lanjutnya?**

Begini, akhirnya banyak laporan semakin bertambah. Saya sudah temukan sembilan kasus korupsi triliunan, bukan ratusan miliar. 23 kasus dengan nilai ratusan miliar. Sebanyak 35 kasus dengan nilai puluhan miliar, ini harus ditindaklanjuti, sekarang sudah proses lidik. Sebagian besar sudah bisa naik sidik.

Sekarang kalo sidik itu harus tuntas, harus ada dukungan tim dari wilayah. Memakan jumlah 500, kan perlu anggaran saya ajukan anggaran penyidikan mau segera selesai khusus

korupsi. Bisa saja 9-10 atau 12. Sekarang masyarakat lihat Bareskrim giat tangani korupsi, jadi masyarakat lapor. Sekarang mau tidak mau akan bertambah. Saya tidak paksakan, kan negaranya juga terbatas. Tapi kalau dengan anggaran rutin menunggu anggaran berikutnya. Ya berarti tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Anggaran negara siapapun Kapolrinya.

### **Apakah anda sudah membentuk 500 penyidik itu?**

Sudah terbentuk sudah dibuat *sprint*.

### **Proses penyelidikan hampir selesai naik sidik selidik berapa?**

Artinya gini, 67 kasus korupsi total sebenarnya sebagian besar lebih 50 persen sudah naik penyidikan. datanya sudah lengkap, tinggal pemeriksaan beberapa saksi dan saqli. Sama mungkin nunggu audit. Setengah matang, lebih dari 50 persen.

### **Berapa ajuan anggaran sidikan, secara ideal, kalau tidak salah ada pembatasan?**

Kalau saya dibatasi, Rp 243 juta seperti kemarin tangani TPPI, sekarang tim ke Singapura mau tiga kali kan biayanya berapa. Artinya memang dibatasi, memang kadang-kadang polisi mau sidik terbentuk anggaran. Jangan sampai memaksakan, membebankan korban lain, hilang ayam hilang kambing. Semangat mengungkap, orang itu bukan kehilangan ayam tapi kambing.

### **Tim anda akan berangkat ke Swiss untuk kasus besar, apa benar?**

Begini saya jelaskan, Viktor dapat undangan BI berkaitan ada permasalahan yang kita tangani yang bermuara di Swiss. Di sana minta penjelasan, karena ada dana yang harus kita tarik. Dari kasus kejahatan yang kita ungkap. Dari Swiss ingin tahu, gimana caranya kita bisa ungkap. Yana bisa jelaskan Pak Viktor, Kepolisian Swiss ingin tahu. Dari pihak BI ingin, akan menyerahkan barang bukti itu milik Indonesia. ▀

# Kronologi Penetapan Otto Cornelis Kaligis Sebagai Tersangka

**K**omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis sebagai tersangka pada kasus penyuaian terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

KPK sendiri mendapat petunjuk untuk menjerat OC Kaligis berasal dari pengakuan anak buahnya yang bernama, Yagari Bhastara Guntur alias Gerry yang sudah terlebih dulu dicokok KPK.

Dihadapan penyidik, Gerry mulai berkicau, Gerry mengungkapkan bahwa bukan dirinya sebagai otak pemberian suap, tetapi ada orang lain yang menyuruhnya untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para hakim PTUN Medan.

Kicauan Gerry tidak berhenti sampai disitu, Gerry juga mengungkap tabir baru, dan menyebut jika kantor OC Kaligis disewa pihak Pemprov Sumatera Utara untuk kepentingan pemenuhan gugatan di PTUN Medan yang bertujuan untuk mementahkan penyelidikan yang dilakukan Kejati Sumut terkait kasus korupsi Bansos Sumut Tahun 2012-2013.

Bahkan pengacara yang baru satu tahun memperoleh izin sebagai pengacara itu juga menyebut 'bandar' pemilik uang suap.

Pengakuan Gerry, juga diakui oleh Plt Pimpinan KPK, Johan Budi. Johan menyebut jika pengakuan Gerry telah banyak memberi masukan dan cukup membantu KPK hingga berujung pada penetapan tersangka dan penangkapan OC Kaligis di Hotel Borobudur, Jakarta dan langsung menjebloskannya ke Rutan Guntur, Selasa (14/7).



*Pengacara dari OCK and Associate Yagari Bhastara atau Gerry (kir) berjalan ke mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/7).*

"Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka kita lakukan, dan kemudian disimpulkan bahwa OCK diduga melakukan tindak pidana korupsi. Lalu dipanggil sebagai tersangka. Surat panggilan dibawa kemudian dijemput dari sebuah hotel di Lapangan Banteng," ungkap Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan diketahui jika penetapan tersangka terhadap OC Kaligis berbeda dengan penetapan tersangka yang lain pada kasus yang sama.

Pada panggilan pertama, Senin (13/7), OC Kaligis sebenarnya akan diperiksa sebagai saksi untuk Gerry. Namun sehari bersela kemudian, penyidik langsung mencokok OC



*Pengacara Otto Cornelis Kaligis (tengah) keluar ruangan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/7).*

Kaligis dan menetapkannya menjadi tersangka.

Johan Budi menyebut jika awalnya OC Kaligis dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, tetapi pada waktu bersamaan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan ayah dari artis Velove Vexiaini sebagai tersangka.

Sebelumnya diberitakan, Kamis (9/7), KPK menangkap lima orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor PTUN Medan. Mereka adalah Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro, dua hakim anggota PTUN Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan, serta anak buah OC Kaligis Gerry.

Dalam OTT tersebut, petugas berhasil menyita uang 15 ribu dolar



Berikut data dari berbagai sumber tentang sepak terjang OC Kaligis sebagai pengacara kawakan.

#### **Pengacara Wong Cilik**

- 35 orang sopir PPD yang menuntut pembayaran dana pensiun
- Residivis bernama Sudarto yang ditembak polisi tanpa dibayar
- Kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional

#### **Pengacara pada kasus yang pernah melibatkan Artis**

- Skandal video porno Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut Tari
- Pernah menjadi pengacara Ida Iasha, Lidya Kandou, Onky Alexander, Nike Ardilla, dan Zarima

#### **Pengacara sejumlah pejabat tinggi negara**

- Pengacara kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin
- Pengacara mantan Presiden RI Ke 2 Soeharto
- Pengacara mantan Presiden RI Ke 3 BJ Habibie
- Pengacara mantan Menko Perekonomian Ginjar Kartasasmita
- Pengacara Mantan Mempora Akbar Tanjung

#### **Kasus manca negara yang pernah ditangani**

- Australian Dairy Corporation,
- Kebun Bunga di Melbourne,
- Moh. Said (Pilot Garuda) di Belanda,
- HendraRaharja di Sidney,
- Garnett Investment di Guernsey, Swiss
- Sonira Foundation di Leichtenstein

#### **Kasus di Sulut yang pernah dibela**

- Memenangkan perkara antara Pemkab Minahasa melawan PT Newmont Minahasa Raya yang saat itu OC Kaligis menjadi kuasa hukum Pemkab era bupati Dolfie Tanor.

AS dan 5.000 dolar Singapura. Diduga, Gerry telah menyuap tiga majelis hakim dan panitera PTUN Medan sebanyak tiga kali.

Sogokan tersebut diberikan untuk memenangkan perkara klien Gerry di PTUN, yakni Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis.

#### **Kronologis Kasus OC Kaligis**

Kasus suap tersebut berawal dari penyidikan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 yang melibatkan mantan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasus Dana Bansos dan BDB Sumut sebenarnya sudah diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara. Berbekal putusan PT Sumut, Ahmad Fuad Lubis kemudian balik memperkarakan Kepala

Kejaksaan Tinggi atas kasus yang telah menyeretnya.

Ahmad menggugat kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara tersebut ke PTUN. Perkara ini dipegang Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, dan dua koleganya Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis kemudian diputus menang dalam gugatan tersebut di PTUN Medan.

Diduga putusan Tripeni mengundang kecurigaan. Pasca membacakan putusan, dia dan dua rekannya, serta panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok. Diduga waktu itu mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry yang menjadi pengacara Ahmad Fuad.

Kemudian Senin (13/7) lalu, KPK melayangkan surat permintaan cekal ke Imigrasi terhadap OC Kaligis. © Deddy K

## Puan Ingatkan Penegak Hukum Tidak Mengejar Sensasi

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengingatkan pejabat negara dan penegak hukum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Bersinergi menghadapi tantangan yang dihadapi ke depan, bukan semata mencari sensasi.

Ia menyatakan demikian sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum MPR/DPR di Senayan, Jumat, (14/8).

"Lembaga negara itu kan memang harus bersatu-padu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bagaimana menyelesaikan masalah yang ada melalui musyawarah dan mufakat dengan asas gotong-royongnya, jangan kemudian itu menjadi suatu hal yang sensasional," ucapnya.

Putri Ketua Umum PDI



Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini sepakat dengan pesan yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya. Hendaknya pejabat negara dan penegak hukum lebih menonjolkan aspek penyelesaian masalah dibanding mencari sensasi.

Kerja nyata lebih dibutuhkan, terlebih disaat pemerintah berupaya keras menangani dampak krisis ekonomi nasional.

"Pemerintah harus siap dengan masalah ekonomi ini, rakyat dengan masalah pendidikan, kesejahteraan itu tidak terkena imbasnya," demikian Puan. /Novrizal Sukumbang-Sukardjito



## Sidang Perdana PK atas Putusan Praperadilan Hadi Poernomo

Sidang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait praperadilan Hadi Poernomo, digelar pekan ini.

"Kami sudah mengajukan PK. Kami tunggu tindak lanjut PK tersebut. (Pengajuannya) sudah sejak beberapa hari yang lalu. Lebih dari seminggu. Sidang PK ada pemanggilan 19 Agustus," kata Pelaksana Tugas (Plt) KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta,

Jumat (14/8).

KPK mengajukan dan memberikan memori PK atas putusan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo pada 28 Juli 2015 lalu.

PK diajukan setelah PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. KPK menganggap putusan Hakim Haswandi yang memimpin sidang melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon (Ultra Petita).

Dalam putusannya, PN Jaksel memerintahkan KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi Poernomo. Di sisi lain, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Hakim Haswandi menilai penyelidikan dan penyidikan KPK atas perkara Hadi Poernomo batal demi hukum, karena dia menilai penyelidikan dan penyidik kasus tersebut adalah tidak sah. Atas putusan tersebut, KPK kemudian memastikan akan melakukan perlawanan hukum.

/Zhacky Kusumo-Nebby Mahliburrohman

## Bareskrim Peringatkan Pansel KPK soal Catatan Capim KPK

Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumumkan 19 peserta yang lolos ke tahap berikutnya. Mabes Polri memberikan warning kepada Pansel terkait calon-calon yang diduga mempunyai catatan pidana.

Catatan dimaksud sejalan dengan proses penelusuran yang dilakukan pihaknya terhadap calon-calon pimpinan KPK.

"Saya tidak mencampuri (proses) itu, yang penting sudah kami berikan laporan (penelusuran)," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Jumat (14/8).

Pihaknya enggan disalahkan jika kemudian hari ternyata pimpinan KPK terpilih diduga mempunyai catatan pidana. Begitu halnya jika dikemudian hari Bareskrim menindaklanjuti calon terpilih yang diduga mempunyai catatan pidana.

"Kalau dibilang kriminalisasi, kami akan tunjukkan datanya karena sudah diberikan, file yang kita berikan. Mengapa diluluskan, berarti bukan salah saya," jelas Budi.

Pansel KPK diketahui telah meloloskan 19 nama. Melalui seleksi tahap uji profile assesment, ke-19 calon tersebut lolos dari 48 kandidat.

"Berdasarkan hasil dari tes profile assesment yang sudah dilakukan pada 27-28 Juli lalu, Pansel meloloskan 19 orang yang terdiri dari 4 wanita dan sisanya pria," ucap Ketua Tim Pansel, Destry Damayanti di Gedung 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (12/8).

Ke-19 calon yang lolos seleksi tahap III itu adalah Ade Maman Suherman, Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Brigjen Basaria Panjaitan, Budi Santoso, Chesna Fizety Anwar, Firmansyah TG Satya, Giri Supradiono, Mayen (Purn) Hendarji Soepandi, Jimly Asshidiqie dan Johan Budi Sapto Pribowo.

Selanjutnya Laode Muhammad Syarif, Muhammad Gudono, Nina Nurlina Pramono, Saut Situmorang, Sri Harijati, Sujarnarko, Surya Tjandra dan Irjen Yotje Mende. /Zhacky Kusumo-Fadlan Syiam Butho-Nebby

## Hakim 'Bebaskan' Dahlan Iskan, Kejati Tegaskan Tak Akan Mundur



Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tak tinggal diam meski Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lendriaty Janis, mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Dahlan Iskan.

Atas putusan tersebut, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) tersebut terbebas dari status tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan 21 Gardu Induk (GI) PLN tahun 2011-2013 senilai Rp 1 triliun.

"(Putusan) praperadilan bukan akhir, kita akan diskusikan. Yang jelas, Kejaksaan tidak akan mundur," tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Kendati demikian, Waluyo belum bisa menentukan sikap, apakah akan kembali menetapkan Dahlan sebagai tersangka, setelah Hakim Lendriaty membebaskan status tersebut karena menyatakan penetapan status Dahlan tidak berdasarkan hukum.

"Pertama, kita meneliti putusan dari hakim tersebut. Kedua, kita akan melaksanakan apa yang dianggap salah dari hakim tersebut. Kemudian ketiga, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta takkan mundur sedikitpun," tegasnya.

Ditambahkan Waluyo, dalam perkara ini pihaknya akan menyeret siapapun yang diduga terlibat, termasuk Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi 21 GI PLN yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air pada tahun 2011-2013 yang anggarannya sebesar Rp Rp 1,063 triliun ini.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menuntaskan siapapun yang bertanggung jawab dalam kasus gardu induk itu. Yang jelas, Kejaksaan Tinggi DKI tidak akan mundur," demikian Waluyo. /Nebby

## Cucu RADIUS Prawiro Dijerat Pasal Berlapis

Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Markas Kepolisian Republik Indonesia Brigadir Jenderal Anjan Pramuka Putra mengatakan pasal yang disangkakan kepada Reza Alexander Prawiro, cucu mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Radius Prawiro adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. "Karena terbukti mengedarkan narkotik golongan 1," jelas Anjan di Jakarta, Selasa, (4/8).

Kendati demikian Anjan membantah jika Reza disebut sebagai pengedar narkoba di kalangan artis. "Tak ada mengedarkan ke artis. Ini masih kami kembangkan peredaran narkobanya," jelas dia.

Tidak hanya itu saja, Reza juga dikenakan pasal subsider, yakni Pasal 112 ayat 1 dalam undang-undang yang sama karena memiliki dan menguasai narkotik golongan 1. Ancaman hukumannya 20 tahun kurungan penjara. Dua pasal ini juga dikenakan kepada dua tersangka lainnya, yakni Rubi alias Kubil, 28 tahun, dan Armada, 32 tahun.

Minggu, (2/8) sekitar pukul 17.00 Wib, polisi menangkap Kubil saat tengah memakai sabu di Hotel Boutique, Jakarta Selatan. Kubil sendiri telah menjadi target operasi penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim selama dua bulan.

Satu jam berselang, polisi pun mencokok Reza (mantan kekasih artis Luna Maya) di kediamannya di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pada pukul 19.30 Wib, anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba kemudian menangkap seorang tersangka bernama Armada di apartemen Bellagio Residences Tower A, Kuningan, Jakarta.

Adapun barang bukti sabu yang ditemukan dari penangkapan tiga tersangka berupa sabu sebanyak 58 gram. Anjan menduga sabu itu berasal dari Cina dengan kualitas



bagus atau KW 1. Polisi juga mendapati ganja sebanyak 12 gram dari tersangka Kubil serta lima senjata api jenis revolver dan FN dari tersangka Armada.

Kemudian 3 Agustus 2015, pukul 16.00 Wib, polisi bersama tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjemput narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cirebon bernama Sofyan. Sofyan diduga menjadi pengendali peredaran narkoba jaringan Reza.

Hal tersebut didapatkan berdasarkan dari hubungan komunikasi ponsel milik Rubi alias Kubil, 28 tahun. Kubil sendiri biasa memperoleh narkoba dari Sofyan. Sebelum dipindahkan ke LP Cirebon, Sofyan sempat ditahan di LP Jakarta. "Berarti sudah lama Kubil membeli ke SF," jelas Anjan. Anjan sendiri memastikan jika jaringan narkoba Sofyan merupakan jaringan baru.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisararis Besar Suharsono mengatakan Sofyan menjadi tersangka dan dijerat Pasal 114 dan 112. Saat ini polisi masih memeriksa Sofyan. "Tiba di Jakarta kemarin malam dan langsung diperiksa terkait dengan jaringan narkoba ini. Keempatnya diduga satu jaringan", kata dia. /Deddy K



## Jepang - Cina Balapan Proyek Kereta Cepat

**P**erdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengirim utusan khusus bernama untuk menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada pekan pertama bulan Juli lalu.

Tangan kanan PM Jepang ini lebih dari satu jam bercuap-cuap di hadapan Presiden Jokowi untuk menyampaikan proposal pembangunan kereta supercepat (Shinkansen) Jakarta-Bandung. Jokowi yang didampingi tim ekonomi pemerintah membalas dengan senyum hampa yang sulit dimaknai. Apakah setuju atau menolak.

Jepang memasang langkah kuda untuk merebut proyek kereta api cepat agar tidak jatuh ke tangan Cina. Proposal yang diajukan kepada

Jokowi menjabarkan secara detail proyek kereta cepat yang sulit ditandingi. "Mereka datang dengan proposal yang cukup teknis. Jauh lebih baik daripada proposal-proposal yang kita terima sebelumnya. Itu intinya," kata Menko Perekonomian, Sofyan Djalil yang hadir dalam pemaparan proposal itu.

Dalam proposal itu, Jepang menjanjikan penggunaan kandungan konten lokal dan transfer teknologi. Artinya, ada peluang besar yang dibuka kepada perusahaan dalam negeri, khususnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang spesifik menangani perkeretaapian dalam negeri. Selain pengadaan konten lokal, putra bangsa pun dijanjikan

mendapat transfer ilmu dari Jepang.

Jepang memang sudah melakukan studi kelayakan proyek rel kereta api cepat melalui Investor Jepang dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/ JICA). Studi Kelayakan pertama ini sudah menuntaskan studi kelayakan tahap pertama pada Triwulan I-2015 dengan biaya yang dihabiskan sebesar USD15 juta.

Proposal terbaru itu memuat hasil studi kelayakan fase pertama yang disesuaikan dengan keinginan Pemerintah Indonesia. Hasil studi kelayakan fase sendiri menggagas peluang pelebaran proyek, dari Jakarta-Bandung lanjut ke Cirebon, Semarang, dan tembus ke Surabaya. Adapun titik awal di Ibu Kota Jakarta

*Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi (kedua kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/7).*



*Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mendengarkan paparan petugas dari Laboratorium Aerodinamika, Gas dan Getaran milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat melakukan kunjungan ke Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/7).*

akan melihat nanti ada tim evaluasi proposal dari Tiongkok dan proposal dari Jepang. Pokoknya dibuat fair, nanti akan ditunjuk konsultannya untuk bandingkan dua proposal tadi," kata Luhut.

Ucapan Luhut ini mengingatkan kembali momentum kekraban Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung beberapa bulan lalu. Kala itu, PM Jepang tersisih. Bahkan, kekraban Jokowi dan Jinping dibarengi dengan janji-janji proyek infrastruktur, termasuk memberi lampu hijau bagi Cina untuk merebut proyek kereta api supercepat Jakarta-Bandung yang tengah dirintis Jepang.

Saat KAA berlangsung di Bandung dan Jakarta Tiongkok mengikat Indonesia dengan melalui melalui Asian Infrastructure Asia Investment Bank (AIIB). Saat itu PT Wijaya Karya (Persero) dipastikan akan menangani pembangunan kereta cepat atau yang disebut Light Rail Transit. Penandatanganan kerjasama pembangunan kereta cepat tersebut dilakukan saat KAA. Pemerintah Tiongkok menunjuk menunjuk konsorsium China Railway untuk menuntaskan proyek ini.

Dalam proyek ini Kementerian BUMN menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN bersama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT LEN (Persero), PT Industri Kereta Api (INKA), dan juga PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Sementara itu konsorsium Tiongkok dipimpin oleh China Railway International Co. Ltd., China Railway Group Limited, Sinohydro Cororation Limited, The Third Railway Surrey and Design Institute Group Corporation, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation Ltd., dan China Railway Signal and Communication Corp. © Moh Sahlan

bermula di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat dengan rel kereta api yang dibangun di bawah tanah.

Dijelaskan bahwa kereta api super cepat Indonesia akan membuat waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 34 menit, dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam. Proses pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung diprediksi tidak banyak mendapat hambatan teknis. Misalnya untuk lahan, proyek ini tidak akan diganggu proses pembebasan lahan karena akan memanfaatkan areal jalan tol untuk jalur kereta. Jepang mengestimasi waktu pembangunan selama tiga tahun.

Terkait nilai investasi, Jepang menawarkan angka sekitar Rp60 triliun dengan suku bunga di bawah 0,5 persen, dan masa pinjaman dengan grace periode 10 tahun. Jepang sendiri tampaknya akan melunak dan mau mengikuti merevisi pengajuan proposal bulan April yang ditawarkan Indonesia. Pada saat itu,

Jepang membuat estimasi bahwa porsi pendanaan Pemerintah Indonesia sebesar 16%, namun kemudian pemerintah meminta agar pendanaan Indonesia dihapus alias 0%.

Pemerintah beralasan, karena proyek ini bukan merupakan program pemerintah melainkan inisiatif usulan investor sehingga pemerintah menilai tidak perlu mengeluarkan alokasi dana khusus karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2014-2019.

Meski proposal yang diajukan sudah sempurna, namun Jepang tampaknya tidak bisa tenang. Sebab peluang penolakan masih bisa terjadi. Sinyal penolakan ini terbaca dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan memilih proyek kereta Jepang atau Tiongkok. Kedua negara itu diketahui diwajibkan melakukan feasibility studies sebelum akhirnya dipilih oleh pemerintah Indonesia. "Presiden

## Pelemahan Rupiah Tanggung Jawab BI, Ini Jawaban Agus Marto



Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin hari menembus level Rp13.550 bukanlah tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, Bank

Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Sebagai otoritas fiskal, kami bertugas menjaga kondisi fiskal agar tetap stabil, sustainable, dan sinkron dengan kebijakan moneter,” ujar Bambang saat rapat koordinasi di gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8).

Tugas pemerintah saat ini yang paling penting adalah mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Pasalnya, kondisi global saat ini mengancam ekonomi domestik.

Belanja pemerintah saat ini mencapai 45 persen atau Rp900 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah beredar di perekonomian.

“Itu yang kami lakukan selain

perpajakan berupa insentif atau stimulus,” jelasnya.

Ditemui terpisah, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan akan selalu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing (valas). Hal tersebut dibuktikan, kata dia, dengan volatilitas rupiah yang masih terjaga dengan baik, yaitu di bawah 8 persen.

“Sedangkan di negara-negara lain volatilitasnya bisa sampai 15 persen. Rupiah tertekan karena eksternal, karena ada kelanjutan ekonomi AS dan statement Fed rate yang akan naik,” tandas dia.

Masa-masa pelemahan nilai tukar rupiah, lanjut Agus, akan mereda setelah adanya kepastian Fed rate naik. /Nicha Muslimawati

## Jokowi Respon Kelulut Go-Jek Vs Ojek Tradisional

Sejak pertama kali diluncurkan, layanan jasa ojek ‘online’ Go-Jek sukses menarik minat masyarakat. Layanan berbasis aplikasi ‘e-commerce’ yang menyediakan jasa ojek motor ini bahkan telah mengubah gaya hidup masyarakat yang bermukim di wilayah Jabodetabek.

Kendati demikian sukses, keberadaan Go-Jek bukannya tanpa kendala dan masalah. Persaingan bisnis menyeret Go-Jek dalam perseteruan dan kemelut dengan ojek tradisional hingga Organisasi Angkutan Darat (Organda). Menurutnya, Go-Jek telah melanggar undang-undang LLAJ Nomor 22/2009 tentang Angkutan Umum Orang dan Barang.

Organda bahkan telah meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan wacana ojek dijadikan angkutan umum. Pasalnya, dikaji dari aspek manapun ojek tidak masuk dalam kategori angkutan umum.

Menanggapi kemelut tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, ekonomi tradisional Indonesia perlu sentuhan aplikasi yang memang akan memudahkan masyarakat menerima



info secepat-cepatnya.

“Go-Jek masih kejar-kejaran sama ojek ya? Memang sebetulnya ekonomi tradisional kita perlu sentuhan aplikasi yang memang akan memudahkan mereka menerima info secepat-cepatnya, saya kira Go-Jek sangat bagus dan sangat kreatif aplikasinya,” ujar Jokowi dalam acara Dialog Komunitas Kreatif di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Selasa (4/8).

Jokowi juga menyatakan setuju dengan investasi bisnis seperti Go-Jek. Ia menilai bisnis yang di buat Nadiem Karim, lulusan Universitas Harvard ini merupakan bentuk pengembangan ekonomi tradisional menjadi ekonomi yang berbasis teknologi.

Saya sangat menghargai apa yang telah dibuat Go-Jek, dan saya setuju kebebasan investasi di bidang ini dibuka seluas-luasnya agar perkembangan cepat melejit,” tandasnya. /Triharningsih

## Sebuah Keajaiban Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,7 Persen

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada semester II 2015 hanya mencapai 4,7 persen, melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,08 persen. Padahal, target pertumbuhan ekonomi 2015 yang dicanangkan Bank Indonesia mencapai 5,2 persen. Artinya, untuk mencapai target tersebut pemerintah perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi di semester II 2015 mencapai 5,7 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan berat untuk mencapai target ekonomi tersebut pada semester II. Pasalnya, hampir semua industri tumbuh negatif, bahkan pertumbuhan bank-bank komersil pun tumbuh negatif.

“Hitung-hitungan kasarnya saja darimana bisa 5,7 persen, kecuali ada miracle (keajaiban),” ujar Suhariyanto di Jakarta, Rabu (5/8).

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III 2015, dirinya belum bisa memprediksi apakah bisa di atas 5 persen. Namun menurutnya yang terpenting untuk digenjot pada kuartal III adalah belanja barang dan modal. /Nicha Muslimawati

## Komisi III DPR : Kejagung Mesti Taat Prosedur, Jangan Sampai "Kriminalisasi" Terkait Victoria Securities Indonesia

Komisi III DPR RI siap membantu laporan permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait pengeledahan salah subject dan objek alamat yang dilakukan Satgas Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Agung terhadap PT Victoria Securities Indonesia.

"Menurut saya boleh mengadakan ke pimpinan DPR atau Komisi III, ada baiknya dilaporkan ke Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan), nanti perlu juga Komisi III bantu memfollow up laporan itu," kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat dihubungi, Minggu (16/8).

Politikus PPP ini menyarankan, agar PT Victoria Securities Indonesia yang merasa dirugikan membuat surat ke Komisi III.

"Silahkan menulis surat pengaduan, nanti minta diberi kesempatan di Komisi III untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, sejatinya sebuah pengeledahan

yang dilakukan penegak hukum, harus menggunakan surat tugas pengeledahan.

"Pertama itu harus di cek apakah betul Satgas Kejaksaan Agung atau hanya orang-orang yang mengatasnamakan saja.

Yang pasti karena namanya pengeledahan itu, kecuali operasi tangkap tangan, harus ada surat izin dari pengadilan," kata Arsul.

Menurutnya, setiap instansi penegak hukum memiliki standar dalam menindak, bahkan mengeledah sebuah tempat.

"Yang namanya pengeledahan instansi penegak hukum manapun harus menunjukkan surat tugas. Dia juga harus menjelaskan apa yang dicari. Semua itu tertulis dalam berita acara, jadi ada izin pengadilan, jangan sampai kejagung di tuduh melakukan kriminalisasi" katanya.

"Tidak boleh misalnya ada upaya paksa. Kalau tidak menunjukkan surat ya berhak menolak," tegasnya.

Namun ada kesalahan subyek

dan objek dalam tindakan pengeledahan dan penyitaan. Penyelidikan perkara ini tidak secara profesional memisahkan antara Victoria Securities International Corp, yang merupakan badan hukum asing, dengan PT. Victoria Sekuritas (PT. Victoria Investama, Tbk) atau juga dengan PT. Victoria Sekuritas Indonesia, yang merupakan badan hukum Indonesia.

Pada hal jelas-jelas keduanya ialah badan hukum berbeda, kantor dan alamat domisili berbeda, memiliki pengurus dan manajemen berbeda, dan dimiliki pemegang saham berbeda.

Diketahui, PT Victoria Securities Indonesia yang berdiri sejak tahun 2011, salah satu lembaga keuangan terkemuka yang sangat menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan nama baik dalam menjalankan usaha di Indonesia, secara sepihak oleh Kejagung

Pada hari Rabu dan Kamis (12-13/8/2015), kantor PT Victoria Securities Indonesia di Panin Tower, Senayan digeledah Kejaksaan Agung, terkait jual beli piutang antara BPPN dan Victoria Securities International Cooperation tahun 2003 yang secara entitas berbeda dan tidak terkait dengan Victoria Securities Indonesia maupun Victoria Investama. /Dhanu Akbar

## Telkom: Akses Broadband Jadi Kebutuhan Pokok Masyarakat

PT Telkom Indonesia dan Perum Perumnas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyediaan Layanan Information & Communication Technology (ICT) dalam mendukung program pemerintah membangun satu juta hunian di Indonesia.

Direktur Enterprise and Business Service Telkom Muhammad Awaluddin mengatakan, dengan melakukan penandatanganan ini artinya secara tidak langsung keduanya telah melakukan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kerjasama ini merupakan

wujud komitmen Telkom untuk turut mendukung pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui pemanfaatan infrastruktur dan layanan ICT yang dimiliki telkom," kata Awaluddin di Kantor Pusat Perumnas, Jakarta, Kamis (6/8).

Dikatakannya, komitmen kerjasama dalam pemberian layanan memiliki nilai investasi sebesar Rp1,5 miliar sampai Rp 2 miliar untuk bangunan rumah susun dan apartemen. Serta sebesar Rp2 miliar sampai Rp2,5 miliar untuk perumahan. "Itu yang harus mutlak ada," ucap dia.

Ia menyebutkan, sampai saat ini, Telkom sudah memfasilitasi layanan smart building dan broadband ICT di 4 tower Sentraland Semarang dan Bekasi.

"Broadband High Technology GPON Fiber Optic 10 Gbps, layanan triple play, Indonesia Wifi 100 Mbps, layanan selular, System Integrator (Security, CCTV, Lighting, Gas Detector), Green Energy Solution, Fasilitas Internet 10 Mb, UseeTV 99 Channel, serta aplikasi lainnya seperti Digital Signage & Advertising, E-Parking System, Loyalti Card, dan lain-lain," jelasnya.

"Bagi kelas menengah ke bawah juga membutuhkan jaringan telekomunikasi. Ini bisa menjadi pendorong akses broadband ke seluruh masyarakat. Mana sih masyarakat yang enggak butuh broadband? Tinggal pilih paket, sesuai dengan nilai keekonomisan masyarakat. Jadi memang ini dibutuhkan," tambahnya. /Dhanu Akbar

# Mengamati TiSA

Wikileaks kembali merilis sejumlah data soal perdagangan global.

**B**eberapa saat lalu, Wikileaks sempat menguliti habis-habisan kesepakatan-kesepakatan rahasia beberapa negara untuk menguasai perdagangan global di bawah payung skema Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat.

Kini, Wikileaks (2 Juli 2015) membuka kembali beberapa draf kesepakatan rahasia antarnegara dalam skema *Trade in Services Agreement* (TiSA) yang dimotori Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sampai saat ini sekitar 23 negara sudah melakukan negosiasi yakni Australia, Kanada, Chile, Taiwan, Kolombia, Kostarika, Hongkong, Iceland, Israel, Jepang, Liechtenstein, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Panama, Uruguay, Paraguay, Peru, Korea Selatan, Swiss, Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa (mewakili 28 negara, termasuk Inggris dan Jerman).

Wikileaks merilis 17 draf dokumen penting skema TiSA yang saat ini masih dalam negosiasi yang sifatnya rahasia dan tertutup. Dokumen tersebut menyiratkan beberapa kesepakatan penting untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa antarnegara.

*"While the proposed Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Pact (TTIP) have become well known in recent months, the TiSA is the largest component of the United States' strategic neoliberal 'trade' treaty triumvirate. Together, the three treaties form not only a new legal order shaped for transnational corporations, but a new economic "grand enclosure", which excludes China and all other BRICS countries,"* demikian pernyataan WikiLeaks.



Public Services International (*world-psi.org*), sebuah organisasi federasi lembaga persatuan pekerja publik internasional terbesar saat ini, bahkan menyebut TiSA dan TPP adalah sebuah kesepakatan yang levelnya (daya rusaknya) melebihi WTO dan NAFTA.

Dalam sebuah laporannya yang bertajuk "TiSA versus Public Services" (2014) lembaga yang beranggotakan sekitar 20 juta pekerja publik yang tersebar di 154 negara ini menulis seperti ini, *"Current treaties have developed into constitutional-style documents that tie governments' hands in many areas only loosely related to trade. These include patent protection for drugs, local government purchasing, foreign investor rights, public services and public interest regulation, which can have consequences in areas such as labour, the environment and Internet freedom"*.

Forbes (*www.forbes.com*) Juni lalu bahkan secara khusus menyorot soal *privacy* ketika merespon data yang dirilis Wikileaks itu. *"Under the draft provisions of the latest trade deal to be leaked by Wikileaks, countries could be barred from trying to control where their citizens' personal data is held or whether it's accessible from outside the country,"* tulis Emma Woollacott salah satu kontributor *Forbes.com*.

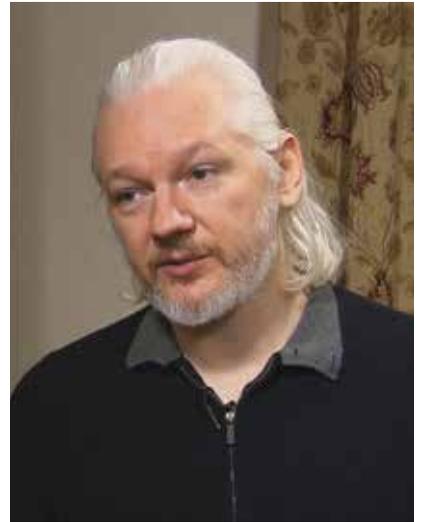
Ada dugaan kuat, dalam sebuah klausulnya, setiap negara yang ikut meratifikasi TiSA 'diwajibkan' untuk mengizinkan *data base* pendudukannya untuk diakses penuh oleh negara, institusi, lembaga, perusahaan atau individu oleh negara lain.

Tentu bagi perusahaan sekelas Facebook Google dan perusahaan



multinasional lainnya, data ini adalah surga baru. Kunci menguasai pasar. *"People are not viewed as citizens or members of their communities, they are 'consumers'... Those who provide the services do not need to have any connection to the people or communities that rely on their services,"* komentar Professor Jane Kelsey dari Faculty of Law University of Auckland, Selandia Baru ketika menganalisis draf *Financial Services Annex* TiSA yang dikeluarkan Wikileaks.

Beberapa pengamat justru melihat lebih jauh. Tujuan TiSA bukan hanya sekadar meliberalisasi perdagangan jasa antarnegara anggota TiSA. Jauh lebih dalam lagi, tujuan utamanya adalah memaksa (terpaksa atau dipaksa.red) negara yang tergabung dalam BRICS (Tiongkok, Brasil, India



Julian Assange

Presiden Joko Widodo (kanan) dan PM Inggris David Cameron (kiri) bergegas usai memberikan pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7).

and Afrika Selatan), negara ASEAN dan beberapa negara berkembang lainnya untuk tunduk dalam aturan TiSA.

Mengapa TiSA mampu memaksakan hal itu? Karena secara hitungan kasar, jika total perdagangan jasa antanegara yang tergabung dalam TiSA digabung, diperkirakan TiSA akan menguasai duapertiga GDP global. Wow....!

Maklum sektor jasa di Amerika Serikat saja sudah mampu menyumbang pendapatan nasionalnya lebih dari 75 persen. Itu belum catatan negara Uni Eropa. Saat ini, Amerika Serikat diperkirakan mengalami surplus perdagangan jasa sekitar lebih dari USD200 miliar.

Ini yang membuat Tiongkok sempat 'ketakutan' beberapa saat lalu. Tak salah kalau Tiongkok (yang

mendapat dukungan dari Uni Eropa) dikabarkan akan bergabung menjadi anggota TiSA dua tahun lalu. Namun belakangan dikabarkan, negara yang tergabung dalam BRICS ini menolak menjadi anggota TiSA.

Lalu bagaimana dengan ASEAN (termasuk Indonesia), yang juga dalam radar untuk 'dipaksa' bergabung dengan TiSA?

Melihat beberapa perkembangan terakhir hubungan luar negeri Indonesia, terutama dengan Inggris dan beberapa negara yang tergabung dalam Negara Persemakmuran Inggris seperti Malaysia atau Singapura misalnya maka konteks TiSA bisa berbicara di sisi ini.

Dan perlu dicermati dengan sungguh-sungguh langkah strategi geopolitik "Europe's Smart Asian Pivot"-nya Uni Eropa dengan

menggandeng Tiongkok untuk menguasai ASEAN. Sebab data mengatakan, Asia sudah menjadi *trading partner* penting yang menguasai sepertiga perdagangan internasional Uni Eropa. Ini sudah menyalip tingkat perdagangannya dengan Amerika Utara. Bahkan perdagangan dengan Tiongkok saja sudah mencapai lebih dari 1 juta Euro per hari!. Ini catatan pentingnya.

Namun ada hal penting yang harus menjadi catatan kehati-hatian. Bahwa sebagaimana besar motivasi dibalik regionalisasi dan liberalisasi perdagangan, baik itu yang didorong oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok atau Russia, tidak selalu membawa kepentingan kemakmuran bersama. Namun kemakmuran buat korporasasi.

Seperti kata Julian Assange ketika berkomentar keras atas klausul-klausul dibalik kata indah 'Free Trade' dan 'More Transparency' dalam skema TransPacific Partnership (TPP): "*Deal isn't about trade, it's about corporate control*".

Ya... selalu kepentingan korporasi. Bukan kepentingan rakyat. ▣

Dhanu Akbar-Tri Hamingsih

Menteri Luar Negeri Iran  
Mohammad Javad Zarif di  
balkon Palais Coburg Hotel,  
tempat untuk pembicaraan  
nuklir di Wina.



## Fajar Baru Kesepakatan Nuklir Iran

Kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara P5+1 menjadi momen yang bersejarah. Pembatasan program nuklir Iran akan diimbali dengan berakhirnya sanksi ekonomi dan embargo terhadap Iran.

**B**agi rakyat Iran, kota Vienna, Austria, menjadi saksi peristiwa bersejarah. Pada 14 Juli 2015, upaya diplomasi terbukti menghasilkan kesepakatan yang tidak bisa dicapai melalui tekanan dan ancaman militer terhadap Iran. Republik Islam Iran yang selalu dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat dan Israel itu bersedia membatasi program nuklirnya, dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi terhadap Iran.

Di balkon terkenal Palais Coburg, Vienna, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif bersama perwakilan khusus Uni Eropa Federica Mogherini mengumumkan kesepakatan yang

mengakhiri kebuntuan selama 13 tahun tentang program nuklir Iran. Lebih dari 30 tahun, Barat telah menggunakan berbagai taktik tekanan dan paksaan terhadap Iran, tetapi tidak mencapai apa-apa. Kini 22 bulan proses diplomasi --dengan cara pendekatan yang berbeda-- telah menghasilkan kesepakatan besar. Perundingan intensif terakhir tentang rincian pasal-pasal kesepakatan itu sendiri butuh 18 hari. "Perjanjian bersejarah itu akan menjadi *win-win solution*," kata Zarif.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, perjanjian itu akan memotong setiap jalur ke arah senjata nuklir bagi Iran, yang sekian lama dicurigai Barat memiliki kapabilitas untuk membuat bom nuklir. Obama juga berjanji akan memveto setiap legislasi dari Kongres AS yang mungkin ingin mencegah implementasi perjanjian tersebut. "Kita telah menyetop penyebaran senjata nuklir di Timur Tengah," ujar Obama dalam pidato di Washington,

yang disiarkan di televisi Iran. Obama dalam pidatonya sama sekali tidak menyebut-nyebut Israel, yang diduga kuat malah sudah memiliki stok senjata nuklir.

Kesepakatan itu tercapai antara Iran dengan negara-negara P5+1, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, ditambah Jerman. Empat negara pertama adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. AS memberlakukan sanksi ekonomi dan militer pada Iran sejak 2005. DK PBB menjatuhkan sanksi sejak 2006. Sedangkan Uni Eropa dan sejumlah negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Kanada, Australia, dan Swiss, selama ini juga memberlakukan sanksi ekonomi dan embargo terhadap Iran.

### Mempersulit Kehidupan Rakyat

Semua sanksi dan embargo ini mempersulit kehidupan rakyat dan menghambat ekonomi Iran, yang berpenduduk 80 juta. Iran

berkepentingan membuka hubungan ekonomi seluas mungkin dengan dunia internasional, sehingga harus berkompromi. Namun, Iran juga tak ingin menutup program nuklirnya yang bertujuan damai, yang memang merupakan haknya. Peralpnya, sedamai apapun program nuklir Iran, ia selalu jadi sasaran kecurigaan AS, Israel, dan sejumlah negara lain, dan ini menjadi dalih mereka untuk mengembargo Iran.

Sesudah pembicaraan intensif, Iran dan P5+1 menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama untuk melenyapkan semua kesalahpahaman tentang program nuklir damai Iran, dan dihentikannya secara serentak sanksi-sanksi ekonomi yang tidak adil terhadap Iran. Persetujuan itu sepenuhnya mengikuti instruksi dan batasan yang ditetapkan oleh Iran, yang menjurus ke kesepakatan tentang aktivitas nuklir dan penghentian segala jenis sanksi.

Rangkuman kesepakatan itu menyatakan, kekuatan-kekuatan dunia mengakui program nuklir damai Iran dan menghormati hak-hak nuklir bangsa Iran dalam batasan konvensi-konvensi internasional. Fakta-fakta kunci tentang program nuklir Iran selama ini telah diabaikan secara tidak adil, untuk menuduh program itu sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Namun, kini hal itu sudah diubah menjadi tema kerjasama internasional yang diperluas antara Iran dengan negara-negara lain, sesuai standar internasional.

Iran juga dibolehkan untuk memiliki dan meneruskan program-program nuklir damai, seperti siklus bahan bakar nuklir dan pemerikayaan nuklir yang komplit di bawah pengawasan PBB. Iran wajib mengizinkan pengawas Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengakses fasilitas nuklirnya selama 20 tahun. Semua sanksi yang tak adil yang diterapkan Dewan Keamanan PBB, termasuk sanksi finansial dan ekonomi terhadap Iran, akan dicabut sesuai kesepakatan dan melalui dikeluarkannya resolusi baru oleh

Dewan Keamanan PBB.

Semua instalasi dan situs nuklir Iran boleh meneruskan kerja mereka, dan –berbeda dengan tuntutan sebelumnya-- tak ada satu pun yang akan ditutup atau dibubarkan. Kebijakan untuk mencegah pemerikayaan uranium sekarang dibatalkan, dan Iran akan meneruskan program pemerikayaan uraniumnya. Infrastruktur nuklir Iran juga akan tetap dipertahankan.

### **Program Peluru Kendali Iran**

Negara P5+1 dan negara-negara lain akan berkontribusi bagi proyek teknologi nuklir yang bersifat damai di Iran. DK PBB juga akan mendorong kerjasama internasional dengan Iran di bidang tersebut. Proyek-proyek itu mencakup: pembangkit tenaga nuklir yang aman bersama dengan teknologi terkait, reaktor riset modern, produksi bahan bakar nuklir, termasuk bahan bakar modern, penelitian dan pengembangan teknologi nuklir canggih (fusi nuklir, varietas akselerator, fisika plasma), serta modernisasi Reaktor Air Berat Arak di Iran.

Kewajiban pelarangan aktivitas Iran di sektor peluru kendali (rudal), seperti rudal balistik, akan berubah ke arah pembatasan pada rudal-rudal yang dirancang untuk senjata nuklir, yang memang tidak pernah diinginkan Iran di masa lalu maupun di masa depan. Embargo senjata terhadap Iran akan dicabut atau diganti dengan beberapa pembatasan, sebagai landasan bagi impor atau ekspor barang-barang yang terkait pertahanan, yang dilihat kasus per kasus. Semua pembatasan ini akan sepenuhnya dicabut sesudah lima tahun. Larangan perolehan barang-barang sensitif yang bisa berfungsi ganda, untuk kepentingan sipil maupun militer, akan dicabut melalui acuan Komisi Bersama Iran dan P5+1.

Salah satu isu yang mengganjal dalam perundingan adalah seberapa cepat pencabutan sanksi terhadap Iran akan diberlakukan, serta mekanisme pemberlakuan kembali

sanksi-sanksi itu jika Teheran melanggar kesepakatan. Presiden Obama mengatakan, “sanksi-sanksi dalam seketika akan langsung berlaku lagi” jika Iran melanggar kesepakatan, yang bisa berarti ada “insentif” bagi Iran jika mematuhi kesepakatan. Iran setuju sanksi dapat diberlakukan 65 hari sesudah terjadinya ketidakpatuhan pada perjanjian.

Iran menjadi negara pertama di dunia yang bebas dari sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB tanpa lewat perang. Iran juga menjadi negara pertama di mana program pemerikayaan uranium untuk pembangkit energi nuklirnya sekarang diakui oleh Dewan Keamanan PBB, sesudah institusi yang sama selama delapan tahun bersikukuh bahwa Iran harus menghentikan program itu.

Seperti sudah diperkirakan, reaksi kontra muncul dari Israel, yang menyebut kesepakatan nuklir Iran itu sebagai “kesalahan yang berbahaya, yang akan memperkaya dan memperkuat Iran.” Israel selama ini memandang Iran sebagai ancaman terbesar. Mengapa Israel marah oleh kesepakatan nuklir Iran ini? Zarif punya jawaban bagus: “Mereka (Israel) membutuhkan krisis dan perang untuk terus menyembunyikan agresi dan kebijakan mereka yang tidak manusiawi terhadap rakyat Lebanon, Palestina, dan rakyat di kawasan (Timur Tengah), sehingga perdamaian adalah ancaman eksistensial terhadap mereka (Israel).”

Zarif menyatakan, Iran siap menjalin hubungan dengan kepercayaan yang baik terhadap semua negara di Teluk Persia, dan dunia Arab yang lebih luas, berdasarkan rasa saling menghormati, sikap bertetangga yang baik, dan persaudaraan Islam. “Kita memiliki banyak tantangan bersama untuk diperjuangkan, dan banyak peluang untuk dimanfaatkan, dan inilah waktunya untuk memulai kerja bersama, dan ini menjadi prioritas terpenting dari pemerintah kami sekarang,” ujarnya. © Satrio Arismunandar

# Najib Tersandung Tuduhan Korupsi

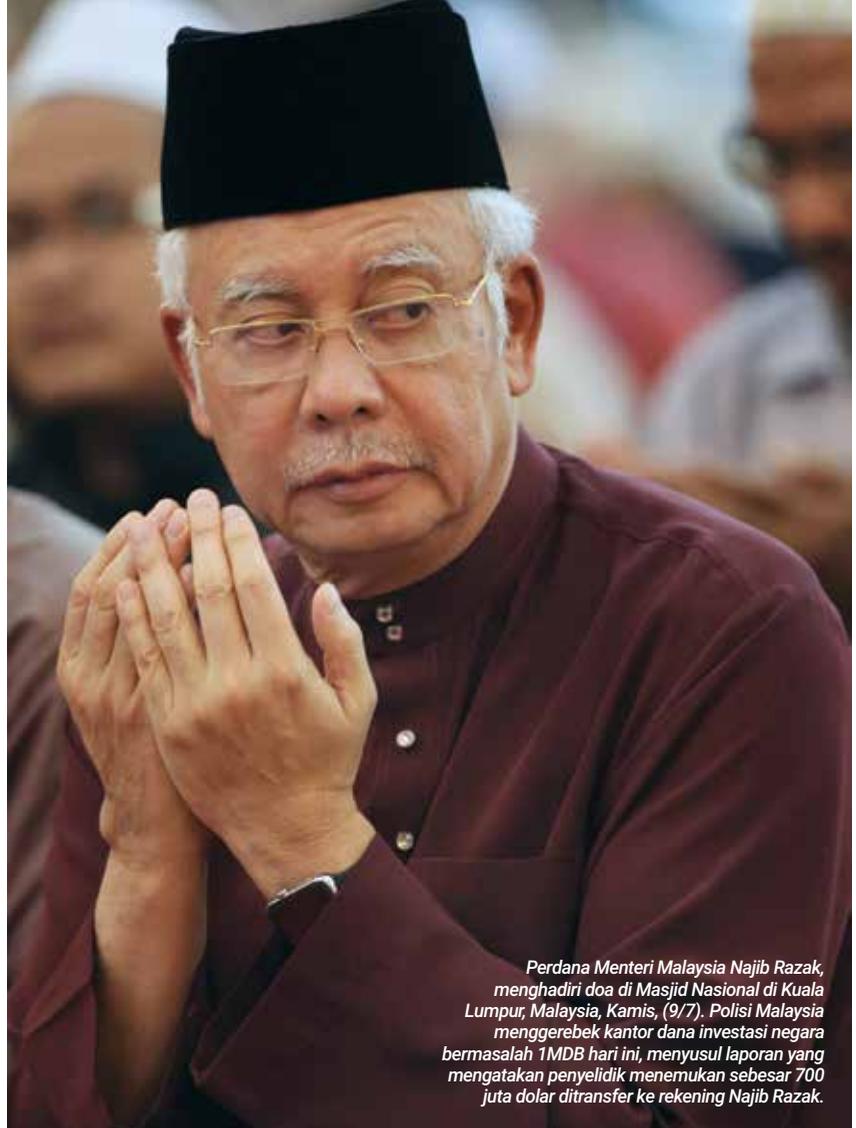
Citra pemerintah Malaysia tercoreng oleh dugaan aliran dana dari perusahaan 1MDB ke rekening pribadi Perdana Menteri Najib Razak. Meski diduga terlibat megakorupsi, posisi Najib sementara masih kuat.

**S**emua bermula dari pemberitaan surat kabar The Wall Street Journal (WSJ) pada awal Juli 2015. Media milik Dow Jones itu mengutip dokumen hasil penyelidikan resmi dan memuat tabel, yang mengindikasikan adanya aliran dana ratusan juta dollar AS dari perusahaan pengelola dana investasi pemerintah Malaysia, 1MDB (1Malaysia Development Berhad), ke sejumlah rekening pribadi milik Perdana Menteri Najib Razak.

Dalam berita yang berjudul “Government Documents from Probe of Najib Razak,” WSJ memuat sembilan dokumen tentang dugaan aliran dana ke rekening milik Najib. Menurut WSJ, dokumen-dokumen itu merupakan hasil investigasi otoritas Malaysia. Di situ ditunjukkan adanya aliran dana dari sejumlah perusahaan pada Maret 2013, Desember 2014, dan Februari 2015.

Dalam pemberitaannya, WSJ menyebut, ada lima deposito yang masuk ke dalam rekening Najib. Dua transaksi terbesar jumlahnya 620 juta dollar AS (setara Rp 8,27 triliun) dan 61 juta dollar AS (setara Rp 813,97 miliar). Transaksi tersebut dilakukan pada 2013 dari perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands melalui bank Swiss.

Najib tentu saja membantah keras tuduhan itu, yang jika



Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menghadiri doa di Masjid Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, (9/7). Polisi Malaysia menggerebek kantor dana investasi negara bermasalah 1MDB hari ini, menyusul laporan yang mengatakan penyelidik menemukan sebesar 700 juta dolar ditransfer ke rekening Najib Razak.

terbukti bisa memicu krisis politik terbesar di Malaysia. Najib menegaskan, dirinya akan berjuang untuk mencari kebenaran. Najib meminta penjelasan WSJ dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap media asing itu. Lewat kantor perdana menteri, Najib mengklaim bahwa laporan itu hanyalah upaya merusak dan melemahkan kepercayaan terhadap perekonomian Malaysia.

Najib bahkan menyebut laporan itu sebagai bentuk “sabotase politik” terhadap dirinya. Laporan WSJ itu juga dinilai akan menodai pemerintah dan pada ujungnya bertujuan menggulingkan perdana menteri yang telah dipilih secara demokratis. Pihak Najib menambahkan, semua pihak harus menyadari adanya penegasan 1MDB sebelumnya, yang memastikan tidak ada aliran dana ke PM Najib.

## Membekukan Enam Rekening

Namun, sekadar membantah memang tidak cukup. Apalagi berita WSJ itu menyatakan, aliran dana yang masuk ke beberapa rekening pribadi Najib itu sangat besar. Nilai dana yang masuk ke rekening tokoh politik nomor satu di Malaysia itu mencapai 700 juta dollar AS (sekitar Rp 9,3 triliun), dan dana itu berasal dari sejumlah badan perbankan dan 1MDB.

Jaksa Agung Abdul Gani Patail pada 8 Juli 2015 menyatakan, sejumlah dokumen yang dimuat dalam pemberitaan itu sebelumnya adalah subyek utama dari proses penyelidikan mereka. Kejagung Malaysia sudah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani hal ini. Satgas itu telah menyita sejumlah dokumen terkait 17 rekening dari dua bank untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Satgas itu

juga membekukan enam rekening yang dianggap mencurigakan.

Laporan sementara pemeriksaan audit internal pemerintah Malaysia terhadap perusahaan Negara 1MDB belum menemukan hal yang mencurigakan. Kendati demikian, tim audit mengakui bahwa 1MDB kurang mau bekerjasama. "Tidak ada yang mencurigakan dalam laporan sementara. (Tetapi) 1MDB tidak bekerjasama penuh dengan auditor umum," ujar Nur Jazlahn Mohamed, kepala Komite Akuntan Publik Bipartisan (PAC) pada 9 Juli 2015.

Meskipun pihak 1MDB membantah, dengan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar, penyelidikan masih berjalan. Laporan PAC ini memang belum menjadi kesimpulan akhir dari penyelidikan. Satgas yang merupakan gabungan dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia, Bank Negara (bank sentral), dan Polisi Kerajaan Malaysia masih mendalami kasus ini.

Dugaan korupsi terhadap Najib sebenarnya bukanlah barang baru. Desas-desus atau kecurigaan tentang aliran dana ke rekening Najib sudah lama beredar di kalangan masyarakat Malaysia. Namun, karena tidak adanya kebebasan pers di Malaysia, tidak ada satu pun media setempat yang berani memberikannya. Surat kabar The Wall Street Journal telah mengisi kekosongan informasi ini.

Publik Malaysia juga menyorot serius skandal korupsi yang melibatkan Najib ini. Di Twitter, misalnya, tagar #1MDB menjadi *trending topic* nasional dengan berbagai kicauan dan gambar satir. Kecemasan penguasa terlihat dari pernyataan Komisi Multimedia dan Komunikasi Malaysia, yang memperingatkan publik agar tidak membagi suatu informasi yang belum dipastikan kebenarannya di media sosial.

Di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, opini publik terbelah antara mereka

yang meragukan kredibilitas Najib dan yang masih tetap memercayainya. Laporan investigasi kasus ini berdampak pada nilai tukar mata uang ringgit Malaysia, yang dikabarkan jatuh ke level terendah sejak tahun 2005.

### Gerakan Kubu Oposisi

Menyikapi kasus ini, sekitar 100 anggota kelompok oposisi dan aktivis –yang mewakili sekitar 40 organisasi swadaya masyarakat– pun menggelar pertemuan darurat di Kuala Lumpur pada 7 Juli 2015. Mereka meminta PM Najib mundur agar investigasi kasus tersebut bisa dilakukan secara independen. Aktivis reformasi, Ambigala Sreenevasa, yang hadir pada pertemuan itu, meminta dibentuknya pelaksana tugas pemerintahan sambil menunggu pelaksanaan pemilihan umum satu tahun mendatang.

Kepala Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah meminta penyelidikan kasus ini dapat berjalan transparan. "Kami berharap, investigasi diketahui masyarakat untuk memungkinkan pengawasan," katanya. Sedangkan tokoh oposisi lain, Lim Guan En, meminta asset 1MDB dan Najib dibekukan.

Citra PM Najib saat ini memang sedang jadi bulan-bulanan, bahkan sebelum mencuatnya kasus aliran dana dari 1MDB ini. Tak kurang dari mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang melontarkan kritik pedas kepada pemerintahan Najib. Karena kritik-kritiknya yang keras, aparat keamanan pada Juni 2015 sempat menghentikan Mahathir ketika sedang berbicara di forum umum terbuka. Ini baru pertama kali terjadi terhadap tokoh sekaliber Mahathir di negaranya sendiri.

Mengomentari kasus tuduhan korupsi terakhir, Mahathir berpendapat, dengan adanya skandal 1MDB ini, PM Najib telah mempermalukan negara. "Seluruh dunia tahu tentang Najib, Jho Low,

dan 1MDB," ucapnya, seperti dikutip The Star. "Pada masa lalu, negeri ini belum pernah dipermalukan dengan tuduhan-tuduhan tak terjawab seperti sekarang ini," tulis Mahathir menyindir Najib dalam blog-nya.

Dalam wawancara dengan BBC, Mahathir menantang Najib untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia bahwa berbagai aset dan kekayaan yang dimilikinya sekarang diperoleh secara legal. Mahathir juga menyebut Najib memiliki gaya hidup mewah, yang selama ini sudah sering menjadi sorotan pemberitaan berbagai media asing.

Lewat akun Facebook resminya, Najib membantah semua tuduhan itu. Ia justru balik menuduh Mahathir telah ceroboh, karena menuduh sembarangan bahwa terdapat dana sebesar 42 miliar ringgit Malaysia (setara Rp 147,6 triliun) hilang dari 1MDB. "Padahal, faktanya utang yang telah diaudit itu justru didukung aset yang juga telah diaudit senilai 51 miliar ringgit Malaysia (setara Rp 179,27 triliun). Dari sini jelas terlihat, tuduhan palsu itu merupakan bagian kampanye sabotase politik," tulis Najib.

Meski diserang dengan tuduhan kasus korupsi, posisi Najib di dalam negeri relatif masih kuat karena masih cukup banyak dukungan terhadapnya. Najib pada 6 Juli 2015 mengucapkan terimakasih kepada petinggi UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), partai yang berkuasa di Malaysia, dan kepada pemimpin spiritual Partai Islam Se-Malaysia yang tak percaya pada kabar tuduhan korupsi itu.

Bagaimana kelanjutan tuduhan korupsi ini dan status 1MDB, masih jadi bahan spekulasi yang menarik. Perusahaan pengelola investasi pemerintah 1MDB yang dipimpin langsung Najib ini memiliki utang 11,6 miliar dollar AS (setara Rp 154,82 triliun). Jauh sebelum muncul pemberitaan WSJ, 1MDB telah menghadapi sejumlah penyelidikan dari bank sentral, badan pemeriksa keuangan, kepolisian, dan Komite Rekening Rakyat di parlemen Malaysia. □ Satrio Arismunandar



Mahathir Mohamad

## Polisi Tetapkan Istri Sultan Ternate Sebagai Tersangka



Istri mendiang Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Boki Nita Budhi Susanti, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan kedudukan warga.

Penetapan tersangka Boki Nita disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Hendri Badar, setelah dilakukannya gelar perkara kasus tersebut.

"Gelar perkara semalam yaitu peningkatan status Boki Nita dari saksi sebagai tersangka," katanya, Kamis (13/8).

Disampaikan, gelar perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Umum (Ditreskrim) Polda Maluku Utara dilakukan pada Kamis (13/8). Dimana dalam gelar perkara itu dihadiri Direskrim Kombes Dian Haryono serta Dir Intelkam Kombes Susilo Rahayu Irianto.

Penyidik menemukan empat alat bukti masing-masing keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta ditemukannya petunjuk.

"Sudah ada 21 saksi yang diperiksa, di antaranya dari pihak Kesultanan Ternate. Untuk Boki sendiri dalam kasus ini dikenakan Pasal 378 dan 277 ayat 1 KUHP," terang Badar.

Pada 9 September 2013, Boki Nita dilaporkan Zulkarnain ke Bareskrim Polri terkait anak kembarnya Ali Mohammad Tajul Mulik dan Gajah Mada Satria Negara.

Dalam laporannya, Zulkarnain meminta polisi mengusut kelahiran dua anak kembar tersebut. Bareskrim melimpahkan laporan tersebut ke Polda Malut. /Ant-Karel Stefanus Ratulangi

## Wabah Tomcat Serang Warga Jembrana Bali

Serangga tomcat (*paederus littoralis*) menyerang warga Desa Kaliakah, Kabupaten Jembrana, Bali, yang membuat kulit mereka gatal-gatal bahkan melepuh. Serangan serangga ini terjadi satu minggu belakangan, khususnya di Dusun Peh, dan membuat warga resah.

Salah satu warga setempat, I Komang Bagi Antara, Jumat (14/8), mengungkapkan, awalnya tidak mengetahui kenapa kulitnya gatal dan melepuh. Apalagi, setelah memeriksakan diri ke Poliklinik RSU Negara dinyatakan alergi biasa.

Nah, sepulangnya periksa ia mendapati warga lainnya mengalami hal serupa. I Komang curiga apa yang dialami bersama warga lainnya disebabkan serangan serangga jenis tomcat. Kecurigannya didasari

atas ciri-ciri yang dialaminya dari browsing internet.

"Dari pencarian di internet, warga baru tahu ini akibat tomcat, yang setelah kami amati memang banyak ada di lingkungan kami," jelasnya.

Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya tomcat pada beberapa bagian rumahnya, termasuk tempat tidurnya.

Kepala Desa Kaliakah I Made Bagiarta mengakui sebagian besar warganya terserang serangga. Meski begitu ia tidak bisa memastikan apakah serangan tersebut berasal dari tomcat. Ia melaporkan kejadian warganya ke instansi terkait.

"Sudah disemprot dengan racun serangga. Saya sendiri juga kena, dengan kulit terasa gatal dan melepuh. Sementara ini laporan terkait serangga itu hanya dari Dusun Peh, mudah-mudahan tidak meluas ke dusun lainnya," ucapnya. /Bobby Andalan-Triharningsih



## Logo Partai Komunis Muncul di Universitas Jember



Polres Jember mengamankan dua mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur, terkait munculnya gambar berlogo mirip organisasi partai politik terlarang, Partai Komunis Indonesia.

Gambar muncul di sejumlah tempat di Universitas Jember. Gambar berwarna merah dan bertandakan palu arit.

Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap kedua mahasiswa berinisial L dan M.

"Motifnya sedang kami dalam, tetapi apapun motifnya sudah meresahkan masyarakat dan akan saya proses," katanya, Jumat (14/8).

Pihak kampus sendiri menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus tersebut. Bagaimanapun, kemunculan gambar berlogo PKI berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.

"Setelah melihat gambarnya ada indikasi politik praktis yang bertentangan dengan negara, maka diserahkanlah masalah ini kepada aparat kepolisian," kata Humas Universitas Jember, Agung Purwanto.

Awal Agustus lalu, publik juga dihebohkan dengan munculnya foto bendera berlambang palu arit yang diduga berkibar di wilayah Jawa Tengah. Foto beredar di jejaring sosial Twitter.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Noer Ali menepis adanya pengibaran bendera PKI di wilayahnya. Ia menyebut foto yang beredar di Twitter adalah hasil rekayasa.

/Ant-Karel Stefanus Ratulangi

## Uang Mahar Pilkada Marak Hingga ke Papua

Uang perahu atau mahar untuk memperoleh rekomendasi dari pengurus pusat partai marak terjadi berbagai daerah. Walaupun hingga saat ini belum ada yang dapat membuktikan, namun aromanya sangat menyengat. Salah satunya terjadi di wilayah Papua dan Papua barat.

Dalam keterangan persnya, Sabtu (8/8), kader Partai Hanura Papua yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Waropen, Fak Fak, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Marauke, calon yang ingin mendapatkan rekomendasi harus membayar uang mahar sebesar Rp500 juta kepada DPP. Tidak peduli apakah dia kader sendiri atau kader partai lain.

Dicontohkan bagaimana di di Kabupaten Pegunungan Bintang, dimana Ketua DPC Hanura yang maju sebagai calon Wakil Bupati tidak mendapat dukungan dari partainya. Padahal dia berjasa membawa Hanura sebagai pemenang Pemilu 2014 dan meraih kursi terbanyak (6 kursi) di Kabupaten

Pegunungan Bintang.

DPP Partai Hanura lebih memilih calon lain karena yang bersangkutan tidak bisa membayar mahar. Lebih lanjut sumber menjelaskan, ini semua mainan AK (mantan anggota DPR RI) sebagai koordinator wilayah (Korwil) Papua DPP Hanura.

"Yang tragis, ada calon di salah satu kabupaten di Papua Barat yang sudah membayar mahar atas perintah AK, namun rekomendasinya jatuh ke calon lain, ditambah lagi AK meminta agar sekretarisnya yang mengurus administrasi juga diberikan Rp20 juta," tegas sumber berita ini.

"Kami yakin Pak Wiranto sebagai Ketua Umum Hanura tidak mengetahui permainan anak buahnya sehingga kami akan laporkan secara resmi ke internal DPP Hanura dengan bukti kwitansi agar korwil AK diberi sanksi dari partai," kata dia.

"Jika tidak mendapat respon dari DPP Hanura, akan kami bawa ke proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya. /Ismed Eka Kusuma

## Dampak Kabut Asap, 5.775 Warga Riau Terserang ISPA

Sebanyak 5.775 warga Riau terjangkit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap dampak dari pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan areal perkebunan baru periode Februari-Juli 2015.

"Terjadi peningkatan yang signifikan kasus ISPA namun tindakan perawatan dan pengobatan terus dilakukan dan stok obat mencukupi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafri di Pekanbaru, Minggu (2/8).

Menurut dia, selain ISPA penyakit lainnya yang menyerang warga Riau adalah pneumoni 165, asma 90, iritasi mata 337, iritasi kulit 646 kasus. Jumlah ini belum termasuk beberapa daerah lainnya yang diketahui belum melaporkan data akibat asap di Riau.

"Dalam menghadapi bencana asap ini, warga Riau harus banyak minum



air putih, gunakan masker jika melakukan aktivitas di luar rumah, cuci tangan pakai sabun, memakan makan yang bergizi, buah-buahan dan juga sayuran," katanya.

Pihaknya juga menghimbau siswa-siswa sekolah memakai masker ketika berada di luar rumah dan di luar kelas. Jika kondisi cuaca sudah berbahaya maka dianjurkan untuk meliburkan sekolah.

"Sejak 18 tahun terakhir, masalah asap belum teratasi yang dan tentu saja dapat mengancam kesehatan," katanya. /Ant-Zaenal Arifin

## Boy Sadikin Sarankan Persoalan Lahan Sumber Waras Dibawa ke Ranah Hukum

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI periode 2009-2014, Boy Bernadi Sadikin, angkat bicara terkait persoalan pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI di APBD 2014.

Audit BPK mengindikasikan ada dua kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut. Pertama kerugian senilai Rp191 miliar jika mengacu dengan harga pembelian dari PT CKU dan kerugian sebesar Rp484 miliar jika mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tomang Utara, Jakarta Barat.

Diakui Boy, saat menjadi Wakil Ketua DPRD DKI di periode itu, dirinya ikut menandatangani Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan di tahun anggaran 2014. Pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS Perubahan 2014, dianggarkan Rp 800 miliar untuk pembelian lahan Sumber Waras.

Setelah ditandatangani, Boy menyatakan tak tahu-menahu lagi teknis pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI.

"Kami di dewan mana tahu teknis pembayaran, itu urusan eksekutif. Jika itu tak ditandatangani tidak bisa. Mereka kan bilang untuk warga DKI," ucap Boy, Jumat (7/8).

Agar persoalan itu terang, ia menyarankan agar diserahkan ke penegak hukum. Dengan begitu akan ditelusuri bagaimana pembayaran pembelian tanah seluas 36.460 meter persegi dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebesar Rp800 miliar tahun anggaran 2014.

"Nanti ketahuan siapa calo pihak YKSW dengan Pemprov. Ini dulu yang harus dibongkar," jelasnya.

Menurutnya, Pemprov DKI tidak akan tahu ada tanah di sana jika tidak ada perantaranya, mengingat letaknya yang ada di belakang. Dan lagi, lahan itu sudah dibeli PT CKU dengan harga lebih murah Rp191 miliar atau 15 juta per meter.

/IM Kemal Macharani-M Vidia Wirawan



*“When the Missionaries arrived, the Africans had the land and the Missionaries had the Bible. They taught how to pray with our eyes closed. When we opened them, they had the land and we had the Bible.”*  
Jomo Kenyatta

## Jomo Kenyatta tak bicara Tolikara

Dhia Prekasha Yoedha

Itulah ketika kawasan Afrika Timur masih dikoloni Inggris, sebelum merdeka jadi tiga Negara terpisah, Kenya, Uganda, dan Tanganyika. Apa yang dikemukakan bapak bangsa negara Kenya itu sungguh getir. Biar pun tak bermaksud melecehkan agama, dalam hal ini agama Nasrani, Jomo mengingatkan apa yang dia tuturkan itu faktual. Apa adanya sesuai watak kolonialisme bangsa-bangsa Eropa sejak abad 15.

Presiden Pertama Kenya kelahiran Ichaweri, Gatundu 20 Oktober 1892 ini, seperti juga Nelson Mandela dari Afrika Selatan, sama-sama pengagum Soekarno. Yomo mengaku patriotisme dan nasionalisme dia sebagai putra Afrika dari Suku Kikuyu kian terbakar oleh Semangat Dasasila Bandung, yang dikobarkan Soekarno melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung April 1955.

Sebagai jurnalis dan penerbit Mwigwithania, surat kabar bulanan berbahasa Kikuyu, Jomo mengaku banyak belajar dari Soekarno tentang kejahatan kolonialisme imperialisme. Dari penggagas KAA itu, Jomo membuktikan kemunafikan Eropa di balik slogan demi 3G. Standar ganda Eropa menjustifikasikan kolonialisme imperialisme kuno terhadap bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah tugas suci demi *Gold, Glory, dan Gospel*.

3G yang terdiri dari *Gold* demi mengelola sumber daya alam (SDA) koloni, *Glory* berupa penguasaan koloni bukti kejayaan Ras Aria bangsa-bangsa Eropa sebagai pemimpin peradaban dunia. *Gospel* dalam arti memperadabkan

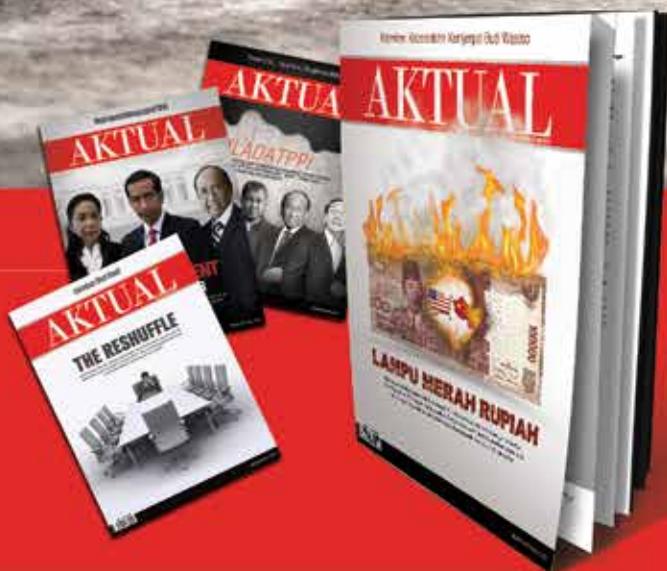
bangsa-bangsa biadab di luar Eropa, agar hidup sesuai peradaban Eropa yang didasari nilai-nilai Yudeo Christianity Roman, baik Agama Katolik Roma juga kemudian Kristen Protestan.

Itu yang mendorong kolonialis Eropa bukan hanya mengeruk SDA koloni demi kemakmuran kejayaan negara induk masing-masing, tapi juga meng-‘kristen’-kan (baca: memperadabkan) bangsa-bangsa koloni. Semua agama asli lokal dimarjinalkan. Sementara Islam meski sama-sama ‘agama samawiyah’ (monotheisme) dari Nabi Ibrahim AS, yang di wilayah koloni notabene berstatus sama ‘agama impor’ pula, diperlakukan sebagai pesaing yang harus dijinakkan. Apalagi secara kebetulan, Islam agama yang dianut mayoritas pedagang pesaing bebuyutan Eropa sejak era perdagangan global semasa ‘jalur sutra’. Saking kemaruk pun nama-nama asli tradisi bangsa di koloni pun dicampakan dan diseragamkan sesuai tradisi kenasranian nama Eropa.

Yomo memang tidak bicara tentang peristiwa pembakaran mesjid di Kabupaten Tolihara, Papua. Tapi hakekat pesan pembebas Kenya yang wafat pada 22 Agustus 1978 di Mombasa ini, mengingatkan kita pada wasiat Soekarno, bahwa kolonialisme belum lagi mati. Kolonialisme bermetamorfosa jadi Nekolim (Neo Kolonialisme Imperialisme) dengan mengubah slogan 3G jadi tiga wacana modern EDHR, *Enviromentalisme*, Demokrasi, dan *Human Right*. Tapi tetap dengan pola lama, politik adu domba alias *divide et impera*. ▢

# AKTUAL

Berani  
Beda  
Karena  
Benar



#### INFO & PEMASARAN

**Dedy** 081 20 53 8776  
**Ranie** 081 38 210 44 69  
**Rhiza** 081 828 0941 009

marketing@aktual.com  
iklan@aktual.com

# aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,  
disampaikan secara cepat, tepat, benar,  
serta makin progresif!



## INFO & PEMASARAN

☎ Dedy **081 20 53 8776**  
Ranie **081 38 210 44 69**  
Rhiza **081 828 0941 009**

✉ [marketing@aktual.com](mailto:marketing@aktual.com)  
[iklan@aktual.com](mailto:iklan@aktual.com)